

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERISTIWA 3 JULI 1946

SKRIPSI



Oleh :

Retno Kuswandari

NIM : 89 214 066

NIRM : 890052010604120058



JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

1995

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERISTIWA 3 JULI 1946

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan
Sejarah**

Oleh :

Retno Kuswandari

NIM : 89 214 066

NIRM : 890052010604120058

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1995

SKRIPSI

PERISTIWA 3 JULI 1946

Oleh :

Retno Kuswandari

NIM : 89 214 066

NIRM : 890052010604120058

Telah disetujui Oleh :

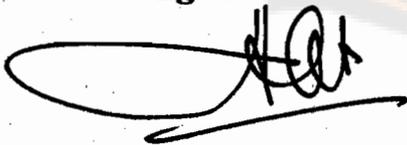
Pembimbing I



Drs. Suhardjo Hatmosuprobo

tanggal : 2 Agustus '95

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto

tanggal : 10 Juli '95

SKRIPSI

PERISTIWA 3 JULI 1946

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

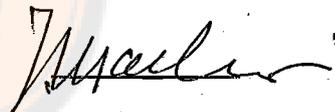
Retno Kuswandari

NIM : 89 214 066

NIRM : 890052010604120058

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
pada tanggal : 20 Maret 1995
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

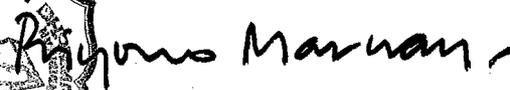
Susunan Panitia Penguji

<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
Ketua	Drs. J. Markiswo	
Sekretaris / Anggota	Drs. A. K. Wiharyanto	
Anggota	Drs. Suhardjo Hatmosuprobo	
Anggota	Drs. J. Adisusilo	

Yogyakarta, 3 Agustus 1995

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




DR. A. Priyono Marwan, S. J.



Skripsi ini kupersembahkan

kepada :

1. Bapak dan ibu tercinta.
2. Kakak-kakak tercinta.
3. Rekan-rekan yang tercinta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

v

MOTTO

* Pendapat baru selalu diragukan dan biasanya ditolak hanya karena belum umum.

(John Locke)

* Kerjakan selalu apa yang anda takut melakukannya.

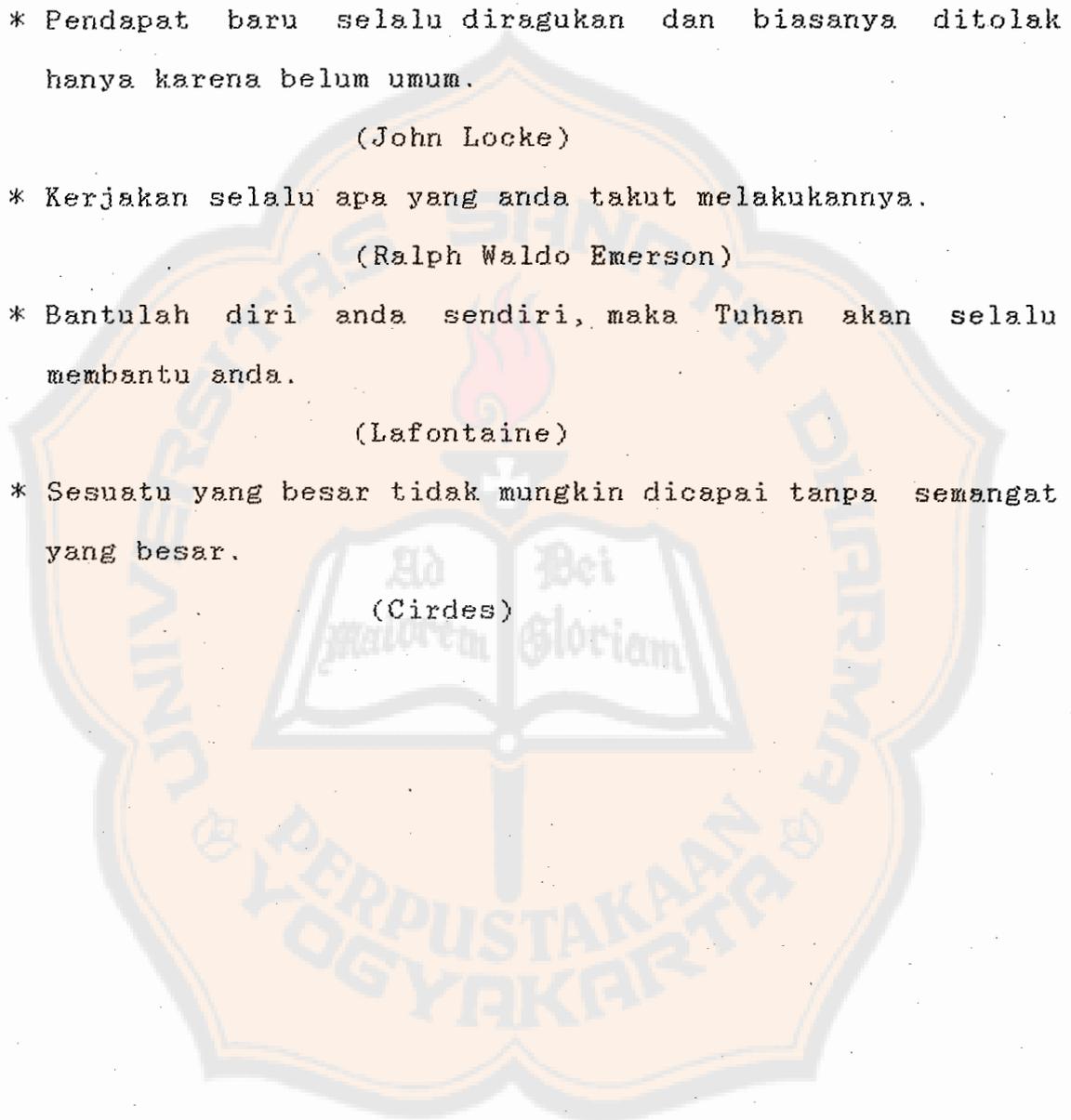
(Ralph Waldo Emerson)

* Bantulah diri anda sendiri, maka Tuhan akan selalu membantu anda.

(Lafontaine)

* Sesuatu yang besar tidak mungkin dicapai tanpa semangat yang besar.

(Cirdes)



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apa.

Memang dalam proses penyusunan ini, penulis dihadapkan pada beberapa kesulitan yang tidak bisa penulis pecahkan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Suharjo Hatmosuprobo selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto selaku Dosen Pembimbing II.
3. Seluruh karyawan Universitas Sanata Dharma, khususnya karyawan bagian perpustakaan.
4. Rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan semangat.
5. Bapak Ibu dan segenap keluarga yang tercinta yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang.

Penulis merasa tidak dapat membalas semua kebaikan ini, namun penulis senantiasa berdo'a untuk semua kebaikan ini.

Semoga skripsi ini berguna bagi pendidikan sejarah pada khususnya dan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan bagi generasi yang akan datang dan berguna bagi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

vii

penulis sendiri sebagai penambah pengetahuan serta untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan.

Kianya Tuhan selalu beserta kita.

Penyusun



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

viii

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Metodologi.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
BAB II. KONDISI POLITIK DI IBUKOTA YOGYAKARTA	
A. Kondisi Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan.....	14
B. Terpilihnya Yogyakarta sebagai Ibukota RI.....	17
C. Lahirnya Persatuan Perjuangan.....	22
BAB III. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MEMBUAT KONDISI POLITIK TIDAK STABIL	
A. Maklumat Wakil Presiden No. X.....	27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- ix

B. Perjuangan Diplomasi.....	31
C. Langkah-langkah yang diambil terhadap Oposisi.....	37
BAB IV. SIKAP PIHAK YANG KECEWA KARENA KEBIJAKAN PEMERINTAH	
A. Sikap Angkatan Bersenjata.....	41
B. Sikap Pihak Oposisi.....	48
BAB V. USAHA Mencari Pengaruh	
A. Rencana Menggulingkan Syahrir.....	52
B. Pelaksanaan Penggulingan Syahrir.....	59
BAB VI. DITUDUH MELAKSANAKAN COUP d'ETAT	
A. Sikap Pemerintah Terhadap Petisi Tertanggal 3 Juli 1946.....	66
B. Tindakan Pemerintah Terhadap Para Pelaku Peristiwa 3 Juli.....	70
C. Kegagalan Usaha Mencari Pengaruh.....	75
BAB VII. PASCA PERISTIWA 3 JULI 1946	
A. Pengadilan Oleh Pemerintah.....	81
B. Pembelaan.....	86
C. Grasi Presiden.....	93
BAB VIII. PENUTUP.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Peristiwa 3 Juli adalah sebuah peristiwa sejarah yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Untuk itu, dalam pengkajiannya tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang melatarbelakanginya.

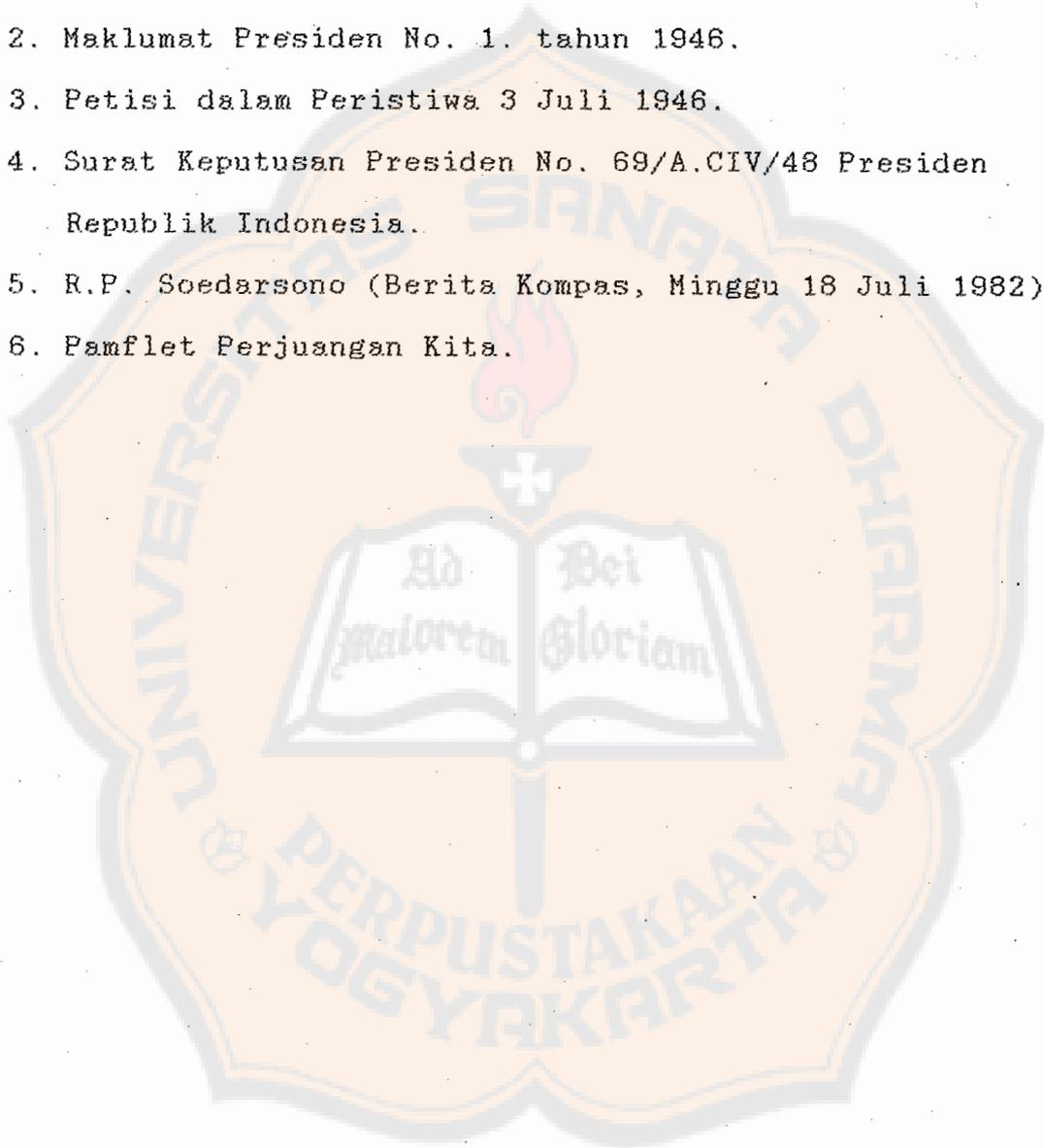
Latar Belakang terjadinya peristiwa 3 Juli sudah dimulai sejak diproklamirkannya Indonesia Merdeka. Sebagai negara yang baru saja merdeka dan masih belum punya pengalaman, maka banyak dijumpai masalah-masalah politik, yang salah satunya adalah masalah kepemimpinan.

Kedudukan sebagai pimpinan sebuah pemerintah adalah kedudukan yang menguntungkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan cita-cita politiknya tanpa gangguan dari pihak-pihak lain. Untuk mendapatkan kebebasan berpolitik tersebut, seorang pemimpin pemerintahan tidak segan-segan mengeluarkan kebijaksanaan yang pada dasarnya menghambat gerak perjuangan politik pihak-pihak oposisi. Dalam hal ini, kudeta adalah hal yang biasa.

Kudeta mungkin adalah hal yang biasa dalam berpolitik. Masalah yang muncul kemudian adalah mengapa kudeta tersebut muncul. Dalam masalah 3 Juli, kudeta muncul karena pemerintahan Sutan Syahrir yang kaku dan tidak toleransi kepada pihak oposisi. Dalam peristiwa tersebut, maka kudeta yang ada bisa dikatakan sebagai rekayasa pemerintah Sutan Syahrir.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Maklumat Wskil Presiden No. X.
2. Maklumat Presiden No. 1. tahun 1946.
3. Petisi dalam Peristiwa 3 Juli 1946.
4. Surat Keputusan Presiden No. 69/A.CIV/48 Presiden Republik Indonesia.
5. R.P. Soedarsono (Berita Kompas, Minggu 18 Juli 1982).
6. Pamflet Perjuangan Kita.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah peristiwa yang mengandung nilai-nilai kebangsaan. Dewasa ini banyak sekali bermunculan buku-buku sejarah yang berusaha untuk mengupas tentang peristiwa-peristiwa politik yang sudah berlalu. Namun demikian masih sulit dijumpai buku-buku yang bertemakan Peristiwa 3 Juli 1946. Apabila ada buku yang mengupas tentang peristiwa itu dalam salah satu babnya, bukan berarti bahwa masalah itu telah dikupas secara tuntas. Bahkan banyak sekali dijumpai ketidakjelasan tentang apa sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946.

Ada kejanggalan mengenai peristiwa 3 Juli ini. Sebagian buku yang ada menulis tentang peristiwa 3 Juli 1946 sebagai suatu peristiwa yang tidak penting, sehingga hanya mendapatkan porsi yang sedikit dan tidak seimbang dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Peristiwa ini diabaikan, seolah-olah tidak mempunyai arti sama sekali dalam sejarah perjuangan politik bangsa Indonesia.

"Dalam beberapa peristiwa, yaitu peristiwa 3 Juli dan pemberontakan Madiun"1)

1) T.B. Simatupang, Dari Revolusi ke Pembangunan Jakarta : Gunung Mulia, 1987, hal. 130.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

Pernyataan di atas banyak dijumpai dalam buku-buku tentang sejarah Indonesia. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa peristiwa ini telah diabaikan dan dianggap tidak penting.

Kejanggalan ini sangat memprihatinkan, apalagi hal ini menyangkut tentang sejarah perjuangan bangsa, yang dewasa ini sering disebut-sebut sebagai salah satu sarana untuk menambah kecintaan terhadap tanah air. Penulis sendiri di sini menyimpulkan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu peristiwa yang penting dan perlu dikaji, adalah bahwa peristiwa ini terjadi pada saat negara Indonesia yang masih muda itu masih dalam taraf mencari jati dirinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan yang ada dalam peristiwa tersebut merupakan suatu usaha untuk membantu pemerintah memberikan ciri khas pada negara yang baru merdeka tersebut.

Akan menjadi suatu pertentangan apabila peristiwa 3 Juli 1946 itu dikatakan sebagai suatu hal yang penting atau tidak. Satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa sejarah. Penting tidaknya suatu peristiwa terletak pada pengkajian atas peristiwa tersebut.

".... tanggal 3 Juli 1946, yang oleh pemerintah dinamakan perebutan kekuasaan oleh Tan Malaka cs., atau sering juga disebut sebagai peristiwa 3 Juli 1946".²⁾

2) Samawi, 25 Tahun Indonesia Merdeka, Yogyakarta : Badan Penerbit "Kedaulatan Rakyat", 1970, hal. 33.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3

".... tahun 1946 ketika sebuah kelompok pembangkang yang juga termasuk di dalamnya seorang pemuda radikal bernama Adam Malik, menculik Perdana Menteri Sukarno, yaitu Sutan Syahrir."³⁾

Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan untuk memberontak terhadap kepemimpinan, baik Sukarno maupun Sutan Syahrir.

Mungkin benar bahwa peristiwa tersebut adalah suatu pemberontakan, mengingat cara yang dilakukan sangat revolusioner dan radikal. Namun demikian hal itu tidak secara obyektif, sehingga dapat menilai apakah peristiwa tersebut merupakan suatu pemberontakan ataukah hanya sebuah peristiwa politik yang umum terjadi di negara-negara yang baru saja merdeka.

Penulis dapat menyatakan demikian, sebab banyak juga didapat peristiwa-peristiwa sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa 3 Juli bukan satu-satunya peristiwa radikal yang ada, bahkan mungkin ada peristiwa lain yang lebih berat permasalahannya dari pada peristiwa 3 Juli ini.

Peristiwa 3 Juli bisa juga dikatakan sebagai ungkapan ketidaksabaran dari suatu golongan yang menginginkan kedaulatan penuh atas wilayah Indonesia tercipta secepat mungkin.

3) Colin Wild dan Peter Carey, Gelora Api Revolusi, Jakarta : Gramedia, 1986, hal. 154.

Semua kejanggalan di atas mungkin hanya bisa dijelaskan dengan mengungkapkan apa dan bagaimana peristiwa 3 Juli 1946 itu yang sebenarnya.

B. PERMASALAHAN

Setelah mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada tentang penulisan-penulisan lain yang bertemakan Peristiwa 3 Juli 1946, maka dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam masalah Peristiwa 3 Juli 1946. Dengan kajian yang lebih mendalam, maka diharapkan masalah-masalah yang tidak jelas dalam peristiwa tersebut dapat terungkap secara panjang lebar. Masalah mengenai apa dan bagaimana merupakan inti dari penulisan yang berjudul Peristiwa 3 Juli 1946.

C. METODOLOGI

Penulisan ini merupakan sebuah studi pustaka mengenai Peristiwa 3 Juli 1946. Karena penulisan ini merupakan studi pustaka, maka data-data tentang fakta yang ada, diperoleh dari beberapa buku atau pustaka yang mempunyai kaitan dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Adapun metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode korelasi, yaitu menghubungkan data dari buku yang satu dengan data dari buku yang lain. Dengan metode ini, dapat dilihat bahwa buku yang satu dapat melengkapi buku yang lain, sehingga dapat diperoleh sebuah kronologi peristiwa yang lebih konkret. Dalam pengambilan kesimpulan tentang

penulisan ini, penulis menggunakan metode komparasi atau perbandingan. Fakta tentang Peristiwa 3 Juli 1946 dari buku yang satu dengan buku yang lainnya mungkin sama, akan tetapi perlu diketahui bahwa analisa dari masing-masing buku tentang peristiwa tersebut berbeda. Untuk itulah maka diperlukan perbandingan agar kesimpulan akhir yang diperoleh lebih jelas dan obyektif.

Penulisan ini bersifat diskriptif, yaitu hanya dengan menguraikan sebuah peristiwa. Akan tetapi untuk mengetahui tentang apa sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946, perlu diadakan analisa yang lebih mendalam tentang fakta yang ada. Dengan analisa ini, diharapkan akan dapat ditemukan hal-hal yang lain yang mendorong munculnya peristiwa tersebut.

D. KAJIAN PUSTAKA

Peristiwa 3 Juli 1946, menurut Samawi adalah suatu ikhtiar pergantian pemerintah pada tanggal 3 Juli 1946, yang oleh pemerintah dinamakan perebutan kekuasaan oleh Tan Malaka *cs.*⁴⁾ Sementara itu, pengarang lain mengungkapkan bahwa peristiwa pada pertengahan tahun 1946 dilakukan oleh sebuah kelompok pembangkang yang dipimpin oleh saingan Sukarno, Tan Malaka yang termasuk di dalamnya seorang pemuda radikal bernama Adam Malik, menculik

4) Samawi, *Op.cit.*, hal. 33.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6

Perdana Menteri Sukarno, yaitu Sutan Syahrir.⁵⁾

Sehubungan dengan Peristiwa 3 Juli 1946, Ulf Sudhausen juga mengungkapkan bahwa ketika Sudarsono muncul dikediaman presiden, dia tidak membawa pasukan. Dan persoalannya sedemikian rupa, sehingga dia ditangkap oleh pengawal-pengawal presiden. Kup itu sebagaimana diungkapkan kemudian oleh pemerintah, gagal.⁶⁾ Aboe Bakar Loebis, menambahkan bahwa pada tanggal 2 Juli 1946, pada pagi hari, Mayor Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi III, bersama Mr. Muhammad Yamin, datang menghadap Presiden Soekarno dan menyodorkan surat pembubaran kabinet Syahrir, pembentukan suatu Dewan Pimpinan Politik yang akan mempunyai kewenangan politik tertinggi, pembentukan kabinet baru dan penyerahan semua kekuasaan militer kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada alenia berikutnya, diberitakan oleh Hatta, bahwa apa yang sedang terjadi adalah suatu usaha coup d'etat.⁷⁾ Lebih lanjut, Jahja Muhaimin menerangkan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 oleh banyak pihak dianggap sebagai sebuah petisi. Berikut ini adalah kutipan dari penulisan Jahja Muhaimin :

"Pada tanggal 2 Juli Mayor Jenderal Sudarsono, bersama Mr. Muhammad Yamin, datang ke Gedung

5) Colin Wild dan Peter Carey, Op.cit., hal 154

6) Ulf Sudhausen, Politik Militer Indonesia 1945 - 1967, Jakarta : LP3ES, hal. 52.

7) Aboe Bakar Loebis, Kilas Balik Revolusi. Jakarta UI Press, 1992, hal. 164 - 165.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7

Negara untuk mendesakkan "petisi rakyat" dengan memaksakan konsepsi-konsepsi politik yang telah mereka buat.⁸⁾

Dijelaskan pula lebih lanjut oleh Jahja Muhaimin, bahwa dengan terjadinya peristiwa ini, maka telah melumpuhkan gerakan persatuan perjuangan.

Profesor Iwa Kusuma Sumantri sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli menyatakan bahwa rancangan maklumat-maklumat⁹⁾ itu hanyalah usul-usul belaka kepada Presiden Sukarno yang hakikatnya adalah pelaksanaan saran dari Panglima Besar Sudirman, yang pada masa itu, pada prinsipnya sama sekali tidak menyetujui perundingan-perundingan dengan Belanda yang dijalankan oleh kabinet Syahrir.¹⁰⁾ Selanjutnya Profesor Iwa Kusuman Sumantri tidak mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah coup d'etat. Adapun pengumpulan laskar rakyat yang terjadi dalam peristiwa tersebut hanyalah sekedar untuk berdemonstrasi ke presidenan, guna menguatkan usul-usul yang telah dirancang untuk diajukan.¹¹⁾

8) Jahja Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945 - 1946. Yogyakarta : Seri Penerbitan Skripsi terbaik UGM, 1971, hal. 48.

9) Proses pengajuan rancangan maklumat kepada presiden disebut dengan peristiwa 3 juli 1946.

10) Iwa Kusuma Sumantri, Sejarah Revolusi Indonesia. Jakarta : tanpa penerbit, 1963, hal. 143 - 144.

11) IBid., hal. 144.

Sementara itu pula, Susanto Tirtoprodjo menyatakan secara tidak langsung bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah pemberontakan fisik. Hal ini dikemukakan dalam bukunya, yaitu bahwa :

".... Mayor Jenderal Sudarsono pada tanggal 3 Juli 1946, mereka dengan pimpinan Panglima Sudarsono menyerbu istana presiden dan menyodorkan kepada presiden daftar menteri-menteri baru untuk ditandatangani."¹²⁾

Kata menyerbu yang digunakan dalam kalimat di atas sungguh tidak enak didengar, sebab menyerbu bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang brutal atau menyerang. Biasanya kata ini digunakan untuk sebuah gerakan yang menggunakan senjata, atau dilakukan secara berramai-ramai.¹³⁾

E. TUJUAN PENULISAN

Dari berbagai pustaka yang ditemui, maka dapat disimpulkan bahwa tulisan-tulisan yang ada terbatas pada Peristiwa 3 Juli 1946 sebagai suatu peristiwa sejarah biasa. Di samping itu, ada beberapa pertentangan tentang apa itu sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946. Sebagian buku menyatakan bahwa peristiwa itu adalah suatu usaha coup d'etat dari kelompok-kelompok tertentu. Buku yang lainnya menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan usaha pihak

12) Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta : PT. Pembangunan, 1963, hal. 67.

13) W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1984, hal. 926.

oposisi untuk mendapatkan pengaruh dalam politik negara Indonesia. Bahkan ada juga beberapa buku lain yang menyatakan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan pemberontakan dari kaum pembangkang.

Namun demikian, penulisan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan kesimpangsiuran bagi para pembaca, sehingga sulit untuk memahami apa dan bagaimana sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut. Dengan adanya perbedaan persepsi tentang peristiwa itu, bukan berarti bahwa buku yang satu lebih benar atau lebih baik dari buku yang lain. Dengan dasar itulah, maka penulis dalam skripsi ini, akan berusaha meluruskan dan melengkapi penulisan-penulisan yang masih kurang jelas mengenai Peristiwa 3 Juli 1946. Mungkin dengan memadukan beberapa persepsi yang berbeda, kemudian menganalisisnya, maka akan diperoleh sebuah penulisan yang lebih konkret. Latar belakang di ataslah yang sebenarnya menjadi tujuan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Peristiwa 3 Juli 1946.

F. KERANGKA TEORI

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Peristiwa 3 Juli 1946, penulis membagi penulisan ini menjadi dua pokok bahasan besar. Pokok bahasan pertama adalah mengenali latar belakang Peristiwa 3 Juli 1946. Sementara itu, pokok bahasan yang kedua adalah seputar peristiwa itu sendiri.

Dalam menjelaskan pokok bahasan yang pertama, ada beberapa hal yang penting. Pertama yang menjadi pendahuluan atau pembukaan dalam penulisan ini adalah mengenai situasi dan kondisi Yogyakarta. Ketika pemerintah pusat berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta bulan Desember 1946,¹⁴⁾ maka Yogyakarta menjadi daerah yang strategis bagi munculnya gerakan-gerakan politik yang ada. Hal ini mempengaruhi Yogyakarta sebagai ibukota negara. Salah satu partai politik yang ada, yang bernama Persatuan Perjuangan, merupakan oposisi yang kuat bagi pemerintah pada waktu itu. Persatuan perjuangan dengan program minimumnya yang radikal merupakan ancaman bagi pemerintah yang menganut sistem perjuangan yang lebih moderat untuk mendapat kedaulatan yang sepenuhnya atas nusantara. Dari pindahnya ibukota ke Yogyakarta ada beberapa hal yang perlu dibahas secara khusus, yaitu menyangkut kegiatan politik yang terjadi di wilayah ini, baik kegiatan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun kegiatan politik yang dilaksanakan oleh partai-partai politik yang ada, seperti misalnya persatuan perjuangan. Seperti telah disinggung bahwa persatuan perjuangan sebagai oposisi, dengan program minimum, salah satu isinya menghendaki perundingan dengan dasar kemerdekaan 100%. Sebagai pihak oposisi, persatuan perjuangan menghendaki perjuangan yang

14) P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintah Yogyakarta 1942-1947. Yogyakarta : Kanisius, 1994, hal. 206.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11

lebih radikal dari sekedar perjuangan diplomasi seperti yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Perjuangan yang radikal ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk beberapa anggota angkatan bersenjata, sehingga menambah sifat yang revolusioner dari golongan itu.

Pemerintah dengan perjuangan diplomasinya, menganggap bahwa perjuangan yang dilakukan oleh kaum oposisi ini akan menghambat proses perundingan-perundingan yang telah direncanakan. Dengan alasan inilah, maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya menghambat gerak perjuangan baik persatuan perjuangan maupun angkatan bersenjata. Kebijakan yang dikeluarkan, antara lain sekitar pendirian pepolit, yang dimaksudkan untuk menghambat kemajuan angkatan bersenjata dalam berpolitik, ¹⁵⁾ disamping kebijaksanaan lain tentang pengangkatan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang bukan dari angkatan bersenjata.¹⁶⁾ Hal ini telah menjelaskan secara langsung usaha konfrontasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir yang sedang berkuasa terhadap saingan-saingan politiknya.

Lebih lanjut, Syahrir tidak hanya menghentikan tindakannya pada militer saja, namun juga terhadap lawan-

15) Otoritas sipil yang kaku, rupanya telah meligitimasi ketegangan antara pihak sipil dan militer.

16) Tersingkirnya Sultan HB IX dukungan militer sebagai menteri pertahanan merupakan usaha konfrontasi langsung P.M. Syahrir dengan tentara (Lihat Ulf Sundhausen, Op.cit., hal. 35.

lawan politiknya yang lain. Pada masa kabinetnya yang kedua, Syahrir telah merencanakan penangkapan orang-orang yang telah dicurigai akan menentang persetujuan yang dibuat antara pemerintah Kabinet Syahrir dengan Pemerintah Belanda. Rencana penangkapan itu sendiri ditandatangani oleh Syahrir sebagai perdana menteri merangkap menteri luar negeri Republik Indonesia.¹⁷⁾

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Syahrir ini memang terkesan sewenang-wenang, sehingga tidak mengherankan apabila muncul reaksi yang keras dari golongan-golongan oposisi. Situasi ini menjadi pertentangan kaum revolusioner (dinamis) dan kaum evolusioner (moderat) semakin dalam.

Pada masa awal kemerdekaan ini, bukanlah hal yang mengherankan apabila ketidaksesuaian dari sebuah golongan akan menimbulkan kekacauan politik yang cukup serius. Pernyataan ini rupanya telah menghantarkan untuk menuju ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu seputar Peristiwa 3 Juli 1946. Kekacauan politik mulai dengan usaha pihak oposisi dalam mendapatkan pengaruh. Mungkin usaha untuk mencari pengaruh ini bisa dikatakan suatu hal yang biasa dalam perjalanan politik sebuah partai atau golongan tertentu. Hal yang membuat usaha tersebut menjadi luar biasa adalah cara untuk mendapatkan pengaruh.

17) Iwa Kusuma Sumantri, Op.cit., hal. 141.

Kaum revolusioner rupanya telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengaruh, baik pengaruh dari masyarakat, maupun pengaruh dari pemerintah. Cara menculik Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Menteri pertahanan, dianggap sebagai satu-satunya cara yang terbaik untuk mendapatkan posisi yang berpengaruh dalam pemerintahan. Meskipun usaha ini sebenarnya adalah usaha mengajukan usulan kabinet kepada presiden, namun cara yang digunakan justru telah menjatuhkan keberadaan kelompok oposisi ini.

Dengan tuduhan melaksanakan coup d'etat, pemerintah kabinet Syahrir dengan leluasa dapat mengambil tindakan untuk mengamankan tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha untuk mencari pengaruh tersebut (selanjutnya usaha mencari pengaruh itu dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946). Hal ini sebenarnya telah memberikan jalan bagi pemerintah Kabinet Syahrir untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, sehingga perjuangan diplomasi dengan Belanda dapat terus dilaksanakan tanpa hambatan.

Namun demikian, tuduhan coup d'etat ditolak oleh para "terdakwa" dalam peristiwa tersebut. Pada akhir penulisan ini akan dibahas pula usaha pembelaan dari para "terdakwa" dalam Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut. Pembelaan ini diharapkan dapat melengkapi penulisan ini.

Skripsi ini, kemudian akan ditutup sebuah kesimpulan dan juga pemikiran, atau sebuah pendapat baru yang muncul setelah diketahui tentang bagaimana sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946 itu.

BAB II

KONDISI POLITIK DI IBUKOTA YOGYAKARTA

A. KONDISI INDONESIA PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi negara ini masih tidak menentu. Banyak sekali terjadi kekacauan, baik secara fisik, maupun dalam usaha menjalankan pemerintahan (kekacauan di bidang ekonomi, sosial dan politik). Pertentangan antara kelompok-kelompok yang ada menimbulkan keresahan pada masyarakat. Pertentangan ini, bahkan kadang-kadang disertai dengan bentrok fisik oleh masing-masing pihak.

Kekacauan dalam pemerintahan sedikitnya banyak dapat diredam oleh karisma Sukarno sebagai presiden pada waktu itu. Akan tetapi ada juga kaum revolusioner yang merasa tidak puas lagi dengan kepemimpinan Sukarno, yang dianggap terlalu lunak, sehingga muncullah kerusuhan-kerusuhan dan kekacauan-kekacauan guna mendapat perhatian pemerintah, agar keinginan mereka untuk perjuangan yang lebih radikal dan reaksioner dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal itu menyebabkan kekacauan di bidang politik sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Sistem demokrasi liberal yang diterapkan pada masa awal berdirinya Indonesia merdeka, rupanya tidak cocok untuk iklim Indonesia yang masih muda ini. Sebagai negara yang baru saja merdeka dan dipimpin oleh orang-orang yang relatif masih muda dan belum berpengalaman dalam menye-

lenggarakan sebuah negara dengan wilayah yang besar, maka dapatlah dimengerti apabila sistem apapun yang diterapkan untuk pemerintahan, akan menemui kegagalan. Situasi tersebut dari beberapa pejuang, yang ingin segera mewujudkan negara yang aman, tentram, dan sejahtera. Akan tetapi, hal itu ternyata justru menimbulkan kekacauan-kekacauan di mana-mana. Hal ini dimengerti karena ambisi pejuang yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda, sehingga menimbulkan kontra pada masing-masing pejuang itu sendiri.

Munculnya kelompok-kelompok politik yang ingin memberikan corak politik masing-masing kepada negaranya, telah mengakibatkan pertentangan di antara mereka sendiri. Pertentangan itu bahkan berlanjut dengan usaha untuk saling menjatuhkan lawan-lawan politik mereka. Akan tetapi, situasi politik yang demikian bukanlah satu-satunya yang meresahkan masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin merosot disebabkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan militer Jepang pada masa pendudukan dan perang, telah menambah jumlah pengangguran yang memang sebelumnya sudah besar. 18) Masalah pengangguran adalah masalah yang paling besar dan rumit untuk diselesaikan oleh sebuah negara, karena pengangguran akan menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat. Masalah ini diperburuk

18) Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1988, hal. 130.

dengan kondisi negara yang masih muda dan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih belum bisa memuaskan semua pihak.

Namun demikian, masalah-masalah dalam negeri tersebut, bukanlah satu-satunya masalah yang menyebabkan kondisi keamanan Indonesia tidak stabil dan menegangkan. Masalah lain yang muncul kemudian adalah karena adanya berita tentang kedatangan-kedatangan tentara sekutu dengan maksud untuk melucitu senjata tentara Jepang. Kabar itu tidak begitu mengkhawatirkan. Akan tetapi kenyataan bahwa tentara sekutu datang, dengan disertai sedadu-sedadu Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya atas Indonesia, sangat meresahkan pihak Indonesia.

Usaha-usaha Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan jalan kekerasan, tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi bahkan terhadap pimpinan-pimpinan pemerintah Indonesia. Sukarno hampir berhasil ditembak oleh serdadu Belanda sewaktu berada di dalam mobil. Peristiwa itu juga dialami oleh Syahrir dan Amir Syarifuddin.¹⁹⁾

"Pada tanggal 26 Desember 1945, bertepatan dengan hari Natal yang kedua, beberapa sedadu Belanda telah mencegat kendaraan Sutan Syahrir, seorang diplomat, Republik yang sedang kembali dari meja perundingan dengan sekutu. Ia mendapat perlakuan

19) Yahya A. Muhaimin, Op. Cit., hal. 40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17

yang sangat tidak pantas. Sutan Syahrir dipukuli dan bajunya robek karena ditarik oleh seorang sedadu Belanda."20)

Demikianlah digambarkan kerasnya perlakuan pihak Belanda terhadap pimpinan-pimpinan Republik. Usaha Belanda untuk membenarkan tindakannya di mata dunia luar, ialah dengan menghasut dan mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan Indonesia, khususnya Sukarno-Hatta dan pengikutnya adalah kolaborator-kolaborator Jepang, sehingga harus ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang.

Situasi di atas, tidak hanya membuat resah, tetapi juga membuat panik. Kepanikan itu nampak dengan mulai dipindahkannya departemen-departemen kementerian ke wilayah pedalaman, dalam hal ini ke Yogyakarta. Perindahan itu bahkan akhirnya disusul juga oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, karena setelah pendaratan sekutu, suasana di Jakarta menjadi tidak aman. Kondisi ini dapat dilihat dari cara sekutu menempatkannya kekuatannya dengan jalan menguasai kantor-kantor, jawatan-jawatan serta instansi-instansi umum lain yang digunakan untuk kepentingan umum.

B. TERPILIHNYA YOGYAKARTA SEBAGAI IBUKOTA RI

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa setelah kedatangan tentara-tentara sekutu yang disertai dengan

20) Purnawan Tjondronegoro, Merdeka Tanahku, Merdeka Negeriku. Bandung : C.V. Harya Duta, 1990, hal. 37.

serdadu-serdadu Belanda, maka keadaan menjadi kacau. Timbul keresahan di mana-mana, baik dipihak pemerintah maupun dipihak masyarakat. Situasi kota Jakarta yang semula tampak aman, berubah menjadi tegang dan kacau. Setiap saat terjadi baku tembak, pengeroyokan dan penikaman antara pihak sekutu dan Republik.²¹⁾ Kepindahan presiden dan wakil presiden dilaksanakan tanggal 14 Januari 1946, dan sudah disetujui oleh kabinet. Dengan kepindahan presiden dan wakil presiden tersebut, maka secara otomatis Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan dijadikan sebagai ibukota untuk menggantikan kedudukan Jakarta.

Pindahnya presiden dan wakil presiden ke wilayah yang dikuasai Republik Indonesia itu, dirasakan sekali karena adanya beberapa faktor, yaitu :

1. Keamanan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta. Pihak ekstrimis Belanda tidak segan menculik atau membutuh presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta. Pihak pemerintah Hindia Belanda dan Belanda selalu mempertimbangkan sebagai penguasa yang berhak dan sebagai pemegang kedaulatan atas Indonesia, untuk secara resmi menangkap Sukarno-Hatta dengan kemungkinan diajukan ke depan pengadilan wilayah sekutu sebagai penjahat perang. Terutama tokoh Sukarno-

21) Ibid, hal. 38.

Hatta yang dianggap telah menyerahkan tenaga bangsa Indonesia untuk menjadi romusha.

2. Pimpinan bangsa dan pimpinan negara Republik Indonesia. Sebagai perwujudan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, hanya dapat diperintahkan oleh tokoh pemersatu bangsa Indonesia, yaitu dwitunggal Sukarno-Hatta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta tidak hanya diamankan dari bahaya penculikan dan penangkapan, tetapi juga sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, baik dari bahaya luar maupun dari bahaya dalam negeri.

3. Kedudukan pemerintah pusat.

Sekutu, dalam hal ini tentara pendudukan Inggris menduduki dan mengasai gedung-gedung kementerian yang digunakan untuk keperluan tentara pendudukan sehingga kantor-kantor pemerintah pusat harus dipindahkan ke pedalaman. Departemen baru, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Keamanan sudah ditempatkan di Yogyakarta.²²⁾

Adapun alasan mengapa kota Yogyakarta terpilih menjadi ibukota, adalah dengan berbagai pertimbangan. Pertama yang dapat dilihat adalah karena pimpinan Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, ternyata dapat

²²⁾ Soebadio Sastrosatomo, Perjuangan Revolusi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 202.

menyesuaikan diri dengan cita-cita dan suasana revolusi.²³⁾ Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX, dididik dalam pendidikan Barat, namun sebagai penguasa tradisional, Sultan mampu pula untuk menempatkan diri dalam suasana revolusi yang dialami bangsa Indonesia. Sikapnya yang tegas dalam melawan Belanda, serta karismanya yang kuat sebagai seorang pemimpin, telah memberikan dukungan moral dan spirituil pada para pejuang untuk melanjutkan perjuangannya melawan Belanda.

Hal lain yang dapat dilihat juga adalah karena Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang secara organisasi dan proses demokratisasi pemerintahannya paling maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.²⁴⁾ Hal ini juga tidak lepas dari keberadaan Sultan yang karena pernah mengenyam pendidikan barat, maka mampu bersikap dan melaksanakan demokratisasi di wilayahnya.

Pindahannya ibukota ke Yogyakarta, juga merupakan strategi bagi pihak Republik, untuk lebih memusatkan perhatian ke wilayah pedalaman. Pusat pemerintahan yang ada di wilayah pesisir atau pinggiran akan mudah ditaklukkan oleh pihak lawan. Sementara apabila pusat pemerintahan ditempatkan di wilayah pedalaman, maka akan memakan waktu bagi pihak lawan untuk mencapai daerah pedalaman. Waktu itulah yang diharapkan akan dapat digunakan dengan sebaik-

23) Susanto Tirtoprodjo, Op.cit., hal. 52.

24) Soebadio Sastrosatomo, Op.cit., hal. 203.

baiknya.

Dengan dijadikannya Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia, maka hal ini tentu saja mempengaruhi kondisi dan situasi kota tersebut. Sebagai pusat pemerintahan, tentu saja pemerintah tidak menginginkan adanya kekacauan-kekacauan di kota yang didudukinya. Hal ini juga telah menjelaskan mengapa Yogyakarta menjadi lebih aman dibanding dengan kota-kota lainnya. Akan tetapi kondisi yang kelihatan aman dari luar tersebut, ternyata juga tidak menjamin keamanan bagi pemerintahan yang ada. Dengan pindahannya ibukota ke Yogyakarta, maka secara otomatis, pindah pula kegiatan-kegiatan politik yang dilaksanakan dari Jakarta ke Yogyakarta. Yogyakarta menjadi pusat kedudukan dari partai-partai. Cabang-cabang yang sudah ada di Yogyakarta menjadi bisa berhubungan langsung dengan induk partai.²⁵⁾

Ibukota Yogyakarta menjadi lebih semarak daripada sebelum menjadi ibukota. Kehidupan rakyatnya kelihatan lebih tenang dan damai, serta kota Yogyakarta menjadi semakin ramai.²⁶⁾ Sebagai pusat pemerintahan maka Yogyakarta juga menjadi pusat kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pemerintah. Tahun 1946, bahkan kegiatan partai-partai di daerah Yogyakarta menjadi

25) Badan Musyawarah Musea D.I.Y., Yogyakarta Benteng Proklamasi. Jakarta : Badan Musyawarah Musea D.I.Y., 1985, hal. 224.

26) Purnawan Tjondronegoro, Op.cit., hal. 44

semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena adanya isu bahwa pada tahun tersebut akan diadakan pemilu di Yogyakarta. Akan tetapi karena alasan yang belum jelas, maka pemilu tersebut tidak jadi dilaksanakan di Yogyakarta.

C. LAHIRNYA PERSATUAN PERJUANGAN

Telah dikemukakan bahwa kedatangan sekutu menimbulkan keresahan di banyak pihak. Bahkan hal tersebut juga dialami oleh kalangan atas bangsa Indonesia termasuk presiden dan wakil presiden, sehingga memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Alasannya bukan hanya untuk menjalankan pemerintahan dengan aman, tetapi juga untuk menjaga dan menjamin keselamatan presiden dan wakil presiden. Kesempatan tersebut digunakan oleh Tan Malaka, seorang pejuang yang kurang begitu terkenal karena seringnya berganti nama untuk menyelamatkan diri dari Belanda.

Segera setelah kabinet I dibentuk, Tan Malaka mengunjungi Sukarno di rumah dokter pribadinya, dr. Suharto. Dalam percakapan berikutnya yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Tan Malaka mendesak presiden untuk mengundurkan diri ke pedalaman, dan juga mengemukakan berbagai metode untuk melakukan perlawanan yang efektif. Dengan perasaan terkesan, Sukarno menjawab, bahwa jika terjadi sesuatu pada dirinya pribadi, ia mengharapkan Tan Malaka

akan mengambil alih segala tanggung jawabnya.²⁷⁾ Saran yang diajukan Tan Malaka tersebut, rupanya hanya merupakan jebakan agar Presiden Sukarno memberikan mandat kepadanya untuk memimpin Indonesia.²⁸⁾ Kelicikan Tan Malaka tersebut terbukti dengan munculnya masalah surat wasiat.

Surat wasiat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Tan Malaka. Isi surat tersebut berdasarkan apa yang dikatakan Presiden Sukarno kepadanya pada saat Tan Malaka mengunjungi di rumah dr. Suharto. Di dalam surat tersebut, juga disebutkan adanya pewaris politik, yaitu : Tan Malaka; Syahrir; Wongsonagoro, S.H. Residen Semarang yang dianggap berpengaruh dikalangan nasionalis tua; dan dr. Sukiman, pemimpin terkemuka sebelum perang dari partai Islam modernis PII.²⁹⁾ Keberadaan surat wasiat tersebut disangkal oleh Syahrir dan Wongsonagoro yang merasa tidak pernah diberi tahu tentang adanya surat wasiat tersebut.

Lebih jauh lagi bahkan, Syahrir menuduh Tan Malaka memanfaatkan dokumen tersebut untuk kepentingannya sendiri guna memperoleh hak kekuasaan politik terutama di Jawa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Skandal tentang surat wasiat ini telah menggemparkan orang-orang kalangan

27) B.R.O'G. Anderson, Java in A Time of Revolution. Ithaca and London : Cornell up., 1972, hal. 308.

28) Tan Malaka tidak pernah menyetujui kepemimpinan Sukarno-Hatta, karena dianggap sebagai simbol kolaboratunis. (Lihat Prisma, "Manusia Dalam Kemelut Sejarah". edisi No. 8, Agustus, tahun ke VI.

29) Ben Anderson, Op.cit., hal. 308.

umum dan pejuang pada khususnya. Peristiwa itu lebih parah lagi, telah memunculkan permusuhan antara Tan Malaka dengan Syahrir.

Permusuhan antara Tan Malaka dengan Syahrir semakin menjadi-jadi, ketika Syahrir mengeluarkan dan menerbitkan sebuah pamflet "Perjuangan kita", yang berisi arah perjuangan Syahrir yang demokratis dengan jalan diplomasi (berunding). Tan Malaka yang tidak menyetujui perjuangan diplomasi, mengeluarkan pamflet tandingan yang berjudul "Muslihat". Muslihat berisikan tentang suatu konsep politik dan ekonomi yang lebih nyata dan sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, nama Tan Malaka sudah terlanjur jatuh. Hal ini membuat pamflet yang dikeluarkannya tidak mendapat tanggapan dan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Nama Tan Malaka baru muncul kembali ke permukaan umum, setelah keluarnya artikel yang ditulis oleh Yamin. Artikel-artikel ini membuat riwayat yang panjang lebar tentang Tan Malaka.³⁰⁾ Nama Tan Malaka semakin dikenal karena kehadirannya dalam sebuah konggres besar yang diadakan pada tanggal 3 Januari 1946 di Purwokerto. Dalam konggres ini pulalah lahir sebuah organisasi yaitu persatuan perjuangan dengan programnya yang terkenal dan mendapat banyak dukungan, yaitu program minimum. Adapun isi dari program minimum tersebut adalah :

30) Ibid., hal. 318.



1. Negara harus didasarkan atas pengakuan 100% dalam perundingan, dan seluruh tentara asing yang ada di Indonesia harus segera meninggalkan tanah air Indonesia.
2. Membentuk pemerintahan untuk rakyat.
3. Membentuk tentara untuk rakyat dan dari rakyat.
4. Pelucutan senjata tentara Jepang.
5. Mengurus tawanan-tawanan Eropa.
6. Menyita dan menyelenggarakan perkebunan milik bekas penjajah.
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian asing. 31)

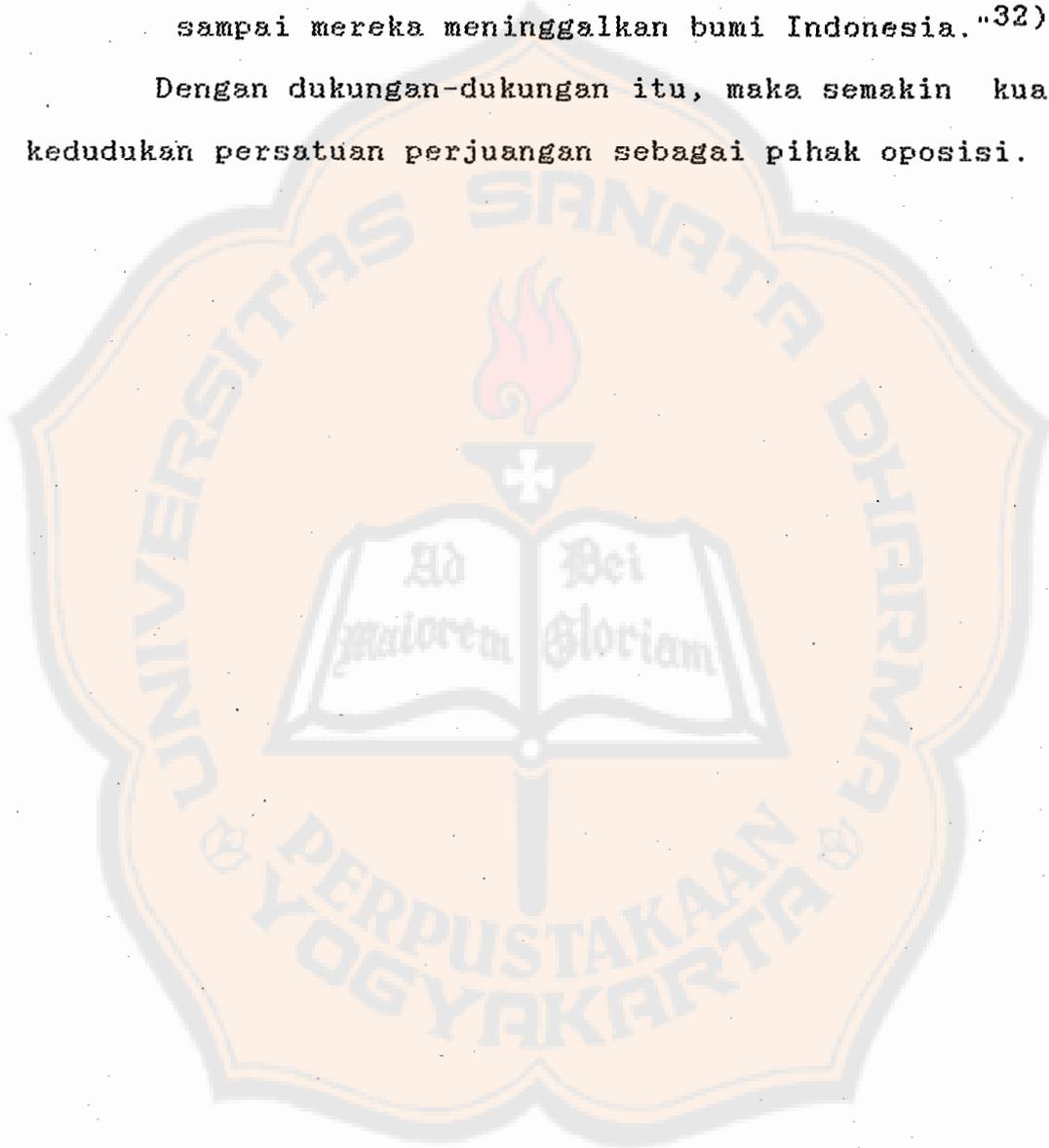
Program minimum tersebut mendapat dukungan dari banyak pihak yang menentang politik yang dijalankan oleh pemerintah. Diantara para pendukung tersebut, terdapat juga dukungan dari pihak militer. Akan tetapi program-program tersebut terbentur pada politik diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah kabinet Syahrir I. Karena persatuan perjuangan selalu berpegang teguh pada program minimum yang tidak bertoleransi kepada pemerintah moderat, maka persatuan perjuangan dianggap sebagai oposisi terhadap pemerintah. Banyaknya dukungan terhadap persatuan perjuangan dilukiskan sebagai berikut :

"Persatuan perjuangan segera memperoleh dukungan yang luas dari mereka yang menentang Sukarno-

31) B.R.O'G. Anderson, *Op.cit.*, hal. 290.

Syahrir, tetapi juga dari sebagian besar pimpinan-pimpinan politik dan militer yang setuju dengan Tan Malaka yang menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia.³²⁾

Dengan dukungan-dukungan itu, maka semakin kuatlah kedudukan persatuan perjuangan sebagai pihak oposisi.



32) George McT. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca New York : Cornell Up., 1969, hal.174.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MEMBUAT KONDISI
POLITIK TIDAK STABIL

A. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X 1945

Keberadaan dan pengaruh Tan Malaka dalam percaturan politik, dapat diukur dengan adanya isyu mengenai surat wasiat. Sementara itu, Syahrir yang merupakan tokoh penting pula dalam revolusi dengan dukungan pemuda disekitarnya, berhasil pula mempengaruhi jalannya politik.³³⁾ Pertentangan antara Tan Malaka dan Syahrir yang sudah dimulai sejak lama semakin meruncing. Dengan didirikannya sebuah organisasi oleh Tan Malaka, yaitu persatuan perjuangan pada tanggal 16 Januari 1946, maka oposisi semakin keras melancarkan kecaman-kecamannya terhadap perjuangan diplomasi yang diprakarsai oleh Syahrir.

Persaingan politik yang semakin seru antara Tan Malaka dengan Syahrir, dimana keduanya adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, maka wakil presiden Hatta berusaha untuk menghentikannya dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tertanggal 16 Oktober 1945,³⁴⁾ yang secara politis mengubah sistem pemerintahan presidential menjadi

33) _____, Prisma, Manusia dalam Kemelut Sejarah. Edisi No. 8, Agustus 1977, tahun ke VI.

34) Susanto Tirtoprodjo, Op.cit., hal. 60.

sistem pemerintahan parlementer. Akibatnya seterusnya dari kebijakan itu adalah diangkatnya Syahrir menjadi perdana menteri pada tanggal 14 November 1945.³⁵⁾ Dikeluarkannya maklumat wakil presiden no. X tahun 1945 ini, dengan mengangkat seorang perdana menteri, berarti secara konstitusional telah menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Namun demikian, secara politis pada waktu itu dibenarkan oleh suasana darurat revolusioner.

Terpilihnya Syahrir sebagai perdana menteri, mempunyai arti kemenangan Syahrir dalam mendapatkan pengaruh serta menguasai jalannya pemerintahan. Sebagai pimpinan pemerintahan, Syahrir dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, terutama dalam usaha melaksanakan perjuangan diplomasi seperti yang telah dikemukakannya dalam pamflet perjuangan kita. Strategi diplomasi, meskipun tidak mendapat dukungan dari banyak pihak, namun mendapat dukungan yang lebih berarti dari dua orang tokoh yang paling terkemuka dalam pemerintahan, yaitu Sukarno-Hatta. Dari dukungan ini, maka selama kepemimpinan kabinet Syahrir, terciptalah suasana pemerintahan yang dijuluki sebagai pemerintahan Sukarno-Hatta-Syahrir.

Dengan keberhasilan Syahrir memenangkan persaingan politik dengan Tan Malaka, bukan berarti dapat membungkam Tan Malaka. Dalam kepemimpinan Syahrir, Tan Malaka menempatkan dirinya sebagai pihak oposisi bersama dengan

35) Yahya A. Muhaimin, Op.cit., hal. 40.

persatuan perjuangan. Dukungan terhadap persatuan perjuangan yang tidak hanya datang dari pihak-pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Syahrir saja, tetapi juga datang dari angkatan bersenjata. Dukungan dari militer ini dapat terlihat dari kesediaan Panglima Besar Sudirman dalam menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh persatuan perjuangan selanjutnya, dapatlah dimengerti dan dipahami apabila dalam masalah ini, cara bagaimana angkatan bersenjata menempakan dirinya dalam persatuan perjuangan dengan program Kabinet Syahrir, terutama panglima besar selaku pimpinan operasi dan pasukan-pasukan. Umum mengetahui bahwa tentara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, dan persatuan perjuangan adalah front rakyat. Sedangkan Motto dari pada tentara adalah "Timbul tenggelam bersama-sama dengan negara."³⁶⁾

Kegagalan Kabinet Syahrir dalam perundingan dengan Belanda untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah Indonesia 100%, membuat reaksi pihak oposisi semakin keras. Pada awal tahun 1946, sekitar bulan Februari, pihak oposisi dan pemuda mengadakan demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta. Demonstrasi tersebut menuntut sikap yang lebih keras dari pemerintah terhadap Belanda. Pidato-pidato yang dilakukan oleh tokoh-tokoh oposisi, bahkan juga oleh Panglima Besar Sudirman, mengecam sikap yang ditunjukkan pemerintah

36) A.H.Nasution, Sejarah Perjuangan di Bidang Bersenjata. Jakarta : Mega Bookstore, 1966, hal 95.

terhadap Belanda, yang dianggap terlalu lunak.

Reaksi yang keras dari pihak oposisi, membuat Syahrir memutuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai perdana menteri secara diam-diam (rahasia). Hal ini membuat negara Indonesia berada di persimpangan jalan antara dua kekuatan, yaitu yang mendukung pemerintah Syahrir dan yang mendukung Tan Malaka. Namun demikian, Presiden Sukarno lebih cerdik dari apa yang dikira orang. Presiden menawarkan kepada Tan Malaka untuk membentuk kabinet sebagai pengganti kabinet Syahrir I. Akan tetapi, Tan Malaka tidak berhasil membentuk sebuah kabinet baru.

"Sukarno selalu merupakan seorang taktikus politik yang cerdik, mengetahui bahwa front ini (persatuan perjuangan) akan bersatu dan dengan senang menusuk Syahrir, sebenarnya terpecah-pecah."³⁷⁾

Perhitungan presiden bahwa persatuan perjuangan akan menemukan kegagalan apabila diberi tawaran untuk membentuk kabinet ternyata benar. Akan tetapi, hak itu bukan semata-mata karena persatuan perjuangan terpecah-pecah, tetapi karena Tan Malaka sebenarnya menginginkan kedudukan yang lebih tinggi, yaitu menggantikan kedudukan Sukarno sebagai presiden, sehingga program minimumnya dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Dengan gagalnya pihak persatuan perjuangan untuk membentuk kabinet, maka Presiden Sukarno menyerahkan

37) Louis Fischer, The Story of Indonesia, New York : Harper and Brother, 1959, hal. 91.

kembali kendali pemerintahan kepada Syahrir, sehingga terbentuklah kabinet Syahrir II. Dalam kabinet yang kedua ini, Syahrir mengadakan pembersihan dengan tidak memasukkan orang-orang oposisi ke dalam kabinetnya. Hal itu menunjukkan bahwa Syahrir ingin menjalankan perjuangan diplomasinya secara sungguh-sungguh tanpa gangguan dari pihak oposisi.

B. PERJUANGAN DIPLOMASI

Syahrir mendasarkan arah perjuangannya dengan jalan diplomasi bukanlah tanpa alasan. Sebagai orang yang telah mengenyam pendidikan Barat, Syahrir tahu betul bagaimana sifat dan watak orang-orang Barat yang tergabung dalam sekutu itu. Sekutu menganggap sebuah negara yang memusatkan diri pada bidang angkatan perang adalah negara yang menganut paham fasis. Syahrir tidak menginginkan negaranya disebut sebagai negara fasis. Alasan ini yang juga dipakai oleh Hatta, wakil presiden, dalam mengeluarkan maklumat No. X tahun 1945, tentang perubahan sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan presidentiil ke sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer dianggap lebih demokratis dan lebih dekat dengan keinginan pihak sekutu dalam berpolitik. Revolusi demokratis dalam hal ini lebih ditekankan guna melawan kecenderungan fasisme yang masih membekas, terutama di kalangan pemuda, karena pengaruh

pendudukan Jepang.³⁸⁾

Alasan lain yang juga dikemukakan adalah menyangkut tentang nasionalisme. Nasionalisme harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan akan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran. Apabila hal tersebut gagal, maka nasionalisme itu akan menjadi suatu faktor yang konservatif dan merugikan ketegangan-ketegangan yang ada di dunia.³⁹⁾

Jalur diplomasi adalah jalur damai dan bukan kekerasan. Dalam hal ini, Syahrir mengidentifikasikan kekerasan dengan perang dan dilakukan oleh angkatan perang. Untuk itulah, maka dalam pemerintahan kabinetnya, baik yang I maupun yang ke II, Syahrir selalu berusaha menekan pertumbuhan angkatan perang dengan membatasi ruang geraknya. Bukan saja untuk alasan diplomasi, melainkan juga untuk alasan lain, yaitu mengakkan supremasi sipil atas militer.

Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam usaha penekanan pertumbuhan angkatan bersenjata. Hal pertama yang menjadi awal perselisihan Syahrir dengan angkatan bersenjata, adalah tentang masalah pemilihan menteri pertahanan. Sebelum pembentukan kabinet Syahrir yang I, pihak militer mencalonkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk

38) Prisma, Op.cit., hal. 71.

39) Herbert Feith dan Lance Castales, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1946. Jakarta : LP3ES, 1970, hal 236.

menjadi menteri pertahanan, disamping dua calon lainnya, yaitu Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Sultan Hamengku Buwono IX mendapat dukungan penuh dari pihak militer, bahkan dalam perhitungan suara, ternyata perwira-perwira Jawa yang merupakan mayoritas memilih Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjadi menteri pertahanan.⁴⁰⁾ Hal itu sangat mengejutkan dan membuat kecewa bagi pihak angkatan bersenjata, karena ternyata dalam pengumuman pembentukan Kabinet Syarir yang I, yang menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan bukanlah Sultan Hamengku Buwono IX, melainkan Amir Syarifuddin. Kemarahan pihak angkatan bersenjata bukan saja karena tidak terpilihnya Sultan Hamengku Buwono IX, tetapi juga karena mengetahui bahwa Amir Syarifuddin bukanlah orang dari kalangan militer. Masalah di atas akan menyebabkan Syahrir terlibat langsung dalam konfrontasi dengan militer. Namun demikian, pengangkatan Amir Syarifuddin sebagai menteri pertahanan oleh Syahrir, dapat dimengerti melalui tiga hal, yaitu :

1. Menegakkan Supremasi sipil atas militer.
2. Menghilangkan dominasi Jawa, karena Amir dan Syahrir adalah sama-sama orang Sumatera, sedangkan pendukung Sultan Hamengku Buwono IX, mayoritas adalah perwira-perwira Jawa.
3. Tidak menginginkan campur tangan luar parlemen dalam menjalankan pemerintahannya. Intervensi

40) Ulf Sundhausen, Op.cit., hal. 34.

dalam menjalankan pemerintahan, adalah sebenarnya kata lain untuk mengatakan keterlibatan langsung dari para perwira dalam kancah politik.⁴¹⁾

Penekanan yang dilakukan terhadap pihak angkatan bersenjata tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Melalui menteri pertahanan yang telah dipilih Syahrir, yaitu Amir Syarifuddin, dikeluarkan sebuah keputusan untuk mendirikan sebuah pendidikan politik bagi tentara. Upaya pendirian pepolit ini dilakukan dengan maksud untuk mendemokratisasikan pihak-pihak yang masih kuat karena pengaruh pendudukan Jepang. Pepolit juga bertujuan untuk memberikan indoktrinasi politik kepada tentara. Hal tersebut adalah untuk menghilangkan prinsip-prinsip yang dimiliki tentara Indonesia yang masih terpengaruh prinsip-prinsip Jepang, yaitu supaya tidak mengembangkan apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai yang militeristik dan otoriter dari tentara kekaisaran dengan kemampuan untuk mencampuri urusan politik.⁴²⁾ Masalah ini adalah untuk membatasi, kalau perlu mencegah keterlibatan militer dalam politik.

Indoktrinasi ini diadakan bukan saja untuk mendemokratisasikan tentara, tetapi juga untuk mengurangi

41) _____, Prisma, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia". Jakarta : Penerbit Prisma, 1985, hal. 36.

42) Ulf Sundhausen, Op.cit., hal. 45-46.

pengaruh Panglima Besar Sudirman. Amir Syarifuddin berusaha memperkuat kedudukannya terhadap komandan-komandan yang dekat dengan Sudirman.⁴³⁾ Nyata sudah bahwa Amir Syarifuddin sebenarnya juga mempermasalahkan gelar panglima besar yang dipakai oleh Sudirman, sebab sebagai panglima besar, Sudirman mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan angkatan bersenjata daripada Amir Syarifuddin sebagai menteri pertahanan. Di samping itu, sesungguhnya Amir tidak dapat memaksakan kedudukannya untuk lebih kuat daripada Sudirman. Hal itu disebabkan karena dalam tubuh kemiliteran, terdapat hubungan hierarkis, dimana seorang bawahan akan tunduk terhadap atasannya, tanpa alasan. Dalam hal ini, Amir bukanlah orang dari kalangan militer, jadi tidak dapat mengharapkan kepatuhan dari tentara seperti yang dilakukan pada Sudirman.

Pepolit ini didirikan dengan mengambil 55 opsir politik, untuk ditempatkan di tiap-tiap divisi, masing-masing 5 orang, yang berkedudukan otonom di samping pimpinan divisi.⁴⁴⁾ Kedudukan para opsir politik yang otonom ini dimaksudkan untuk menjamin agar indoktrinasi dapat dilaksanakan secara bebas tanpa campur tangan dari

43) Ibid., hal. 46.

44) A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia. Bandung-Jakarta : Ganaco N.V., 1963, hal. 269.

Markas Besar Tentara. Hal yang lebih parah lagi adalah staf pendidikan yang ditunjuk, tidak satupun yang mengenal masalah-masalah ketentaraan, karena mereka bukan tentara, namun memperoleh pangkat selayaknya tentara yang menjadi panglima divisi, yaitu Mayor Jenderal, dan Letnan Jenderal yang setaraf dengan kepala staf di Markas Besar Tentara.

Masalah lainnya adalah masalah pengangkatan panglima divisi. Dalam pengangkatan panglima divisi ini, diperkirakan pemerintah ikut berpengaruh dalam perubahan hasil pemilihan. Hal itu dipahami, untuk mencari orang yang akan menduduki jabatan sebagai panglima divisi, adalah orang-orang yang lebih memihak kepada pemerintah. Sutarto dan Sudarsono, adalah termasuk dari perwira-perwira yang akan diturunkan kedudukannya dan diganti oleh orang-orang yang dipilih pemerintah. Akan tetapi akhirnya, Sutarto dan Sudarsono dipilih juga sebagai panglima divisi setelah melalui beberapa tantangan. Merasa sadar bahwa kedudukan yang mereka miliki adalah penting, maka Surato dan Sudarsono cenderung untuk mencari sekutu dengan golongan yang anti terhadap politik yang dijalankan pemerintah.

Masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya semua merugikan pihak militer. Hanya saja dalam masalah terakhir, Sudarsono dan Sutarto berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai panglima divisi. Dengan

kedudukan tersebut, maka mereka dapat menjadi harapan untuk dapat menolong bagi pihak-pihak yang menentang pemerintah bila terjadi urusan yang kurang menyenangkan dengan pemerintah.

C. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL TERHADAP OPOSISI

Pada uraian-uraian sebelumnya telah disinggung bahwa antara pihak oposisi, yaitu persatuan perjuangan dengan pemerintah terdapat persaingan yang ketat untuk saling mempengaruhi massa, guna memberikan dukungan masing-masing pihak dalam arah politik yang direncanakan. Kegagalan-kegagalan pemerintah dalam perundingan yang dilakukan dengan Belanda membawa angin segar bagi pihak oposisi untuk melancarkan oposisi mereka lebih keras terhadap pemerintah. Pihak oposisi tidak segan-segan mengadakan rapat-rapat besar dan terbuka untuk mengkampanyekan program-programnya yang lebih radikal dan lebih masuk akal, serta lebih mudah untuk diterima oleh alam pikir masyarakat awam.⁴⁵⁾

Pada pertengahan bulan Maret, pimpinan persatuan perjuangan, yaitu Tan Malaka dan Mr. Muhammad Yamin

45) Politik yang digunakan Perdana Menteri Syahrir, yaitu diplomasi, sulit diterima rakyat yang hampir hanya sedikit dari mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi. Politik Syahrir dianggap terlalu berbelit-belit. Sementara program minimum lebih sederhana dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

memberikan pidato-pidatonya dalam sebuah konggres yang dijaga oleh Panglima Besar Sudirman.⁴⁶⁾ Meskipun dalam konggres tersebut, suasana kurang menyenangkan, karena dalam tubuh persatuan perjuangan sendiri sudah mulai terpecah-pecah oleh karena gagalnya Tan Malaka membentuk kabinet dan melaksanakan secara penuh program minimum dalam kabinet, tetapi pidato-pidato yang dilancarkan oleh pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan tersebut sempat membuat resah pemerintah. Hal itu terbukti ketika sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 16 Maret, Sukarno mengadakan pidato balasan di Magelang, yang isinya menyatakan kepada para pendengarnya bahwa diplomasi adalah salah satu dari dua penyangga utama perjuangan Indonesia. Sukarno juga memperingatkan untuk tidak terpengaruh terhadap tuduhan-tuduhan yang menentang taktk-taktk diplomasi pemerintah.

Dalam konggres yang diadakan oleh persatuan perjuangan itu pula, keputusan yang diambil tidak hanya menyerukan pengerahan umum dari rakyat, melainkan juga delapan pernyataan kepada luar negeri yang diantaranya berisi pengakuan wilayah Indonesia atas semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Timor dan semua Papua. Pernyataan lainnya adalah mengancam akan menyita semua harta

46) Ben Anderson, *Op.cit.*, hal. 356.

orang-orang asing dari negara-negara yang bermusuhan dengan kemerdekaan Indonesia.⁴⁷⁾ Untuk mengajukan keputusan-keputusan konggres tersebut, peserta konggres mengadakan demonstrasi dengan arak-arakan dan rapat umum untuk penutupan konggres. Meskipun tidak sampai memunculkan suatu insiden, tetapi peristiwa tersebut cukup dapat membuat ketegangan yang hebat. Hal yang terpaksa disetujui oleh pimpinan persatuan perjuangan untuk memunculkan kekecewaan pada peserta konggres tersebut, rupanya memberikan alasan yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Adapun kejadian tersebut dilakukan, karena gagalnya perundingan yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi Kabinet Syahrir masih juga akan melaksanakan perundingan selanjutnya.

Untuk kelangsungan perundingan tersebut, Syahrir sebenarnya telah merencanakan sebuah penangkapan orang-orang yang sudah termasuk dalam daftar hitam yang diperkirakan akan menentang persetujuan yang akan dibuat antara pemerintah Kabinet Syahrir dan pemerintah Hindia Belanda.⁴⁸⁾ Adapun tokoh-tokoh persatuan perjuangan yang akhirnya ditangkap juga karena dianggap telah menimbulkan kekacauan dalam negeri tersebut adalah Tan Malaka,

47) Ibid., hal. 357.

48) Iwa Kusuma Sumantri, Op.cit., hal. 141.

Abikusumo Tjokrosujoso, Yamin dan Sukarni. Di tempat yang berlainan telah pula ditangkap Sayuti Melik dan Gatot yang ditangkap ketika sedang dalam perjalanan dari Purwokerto ke Yogyakarta. Tokoh lain yang ditangkap juga adalah Chaerul Saleh.

Alasan-alasan diadakannya penangkapan-penangkapan itu sendiri, selain untuk memperlancar perundingan yang akan diadakan dengan Belanda, juga ada alasan-alasan lain. Alasan dari dalam adalah kesempatan Kabinet Syahrir untuk menghancurkan pihak oposisi. Sementara itu alasan dari luar adalah untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa pimpinan-pimpinan Indonesia mampu mengatasi kekacauan-kekacauan dari dalam, dan dapat menekan tindakan-tindakan revolusioner yang selalu digunakan sebagai alasan oleh Belanda untuk mengambil alih kekuasaan atas Indonesia.⁴⁹⁾

49) Tindakan-tindakan yang reaksioner, oleh Belanda dianggap suatu tindakan yang ekstrim. Adanya tindakan reaksioner dalam perjuangan di Indonesia dianggap bahwa para pemimpin Republik tidak mampu menjalankan pemerintahan.

BAB IV

SIKAP PIHAK YANG KECEWA KARENA
KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. SIKAP ANGKATAN BERSENJATA

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pemilihan menteri pertahanan telah menimbulkan hubungan yang kurang baik dari pihak pemerintah dengan angkatan bersenjata. Hubungan yang kurang baik itu muncul, bukan saja karena tidak terpilihnya Sultan Hamengku Buwono IX, tetapi terlebih karena pihak angkatan bersenjata merasa tidak dihiraukan. Padahal pihak angkatan bersenjata mengharapkan keberadaannya dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah dalam perjuangan untuk mencapai pengakuan kedaulatan atas Indonesia merdeka. Hal itu diungkapkan oleh A.H.Nasution sebagai berikut :

"Demikianlah seharusnya bahwa kebijaksanaan politik harus memberikan syarat-syarat untuk kemampuan militer yang sebesar-besarnya, dan begitu pula sebaliknya, kebijaksanaan militer harus memberikan kemampuan politik yang setinggi-tingginya. Politik dan militer, formil terpisah, tetapi pada hakikatnya tidak, karena masing-masing adalah satu segi daripada barang yang satu.⁵⁰⁾

Tekanan pemerintah kepada militer tidak hanya berhenti

50) A.H. Nasution, Op.cit., hal. 78.

kepada pemilihan menteri pertahanan, tetapi juga masalah pendirian pepolit. Syahrir bahkan mempergawat pertentangan itu dengan pemilihan panglima besar.

Syahrir tidak hanya menolak Sultan menjadi menteri pertahanan, tetapi juga menolak Sudirman menjadi panglima besar. Penolakan ini dilakukan Syahrir, untuk menekan pihak militer agar dapat menerima dengan sepenuhnya kepemimpinan Amir Syarifuddin sebagai menteri pertahanan. Syahrir bahkan berencana mengangkat Urip Sumoharjo untuk menjadi panglima besar. Keputusan itu dilakukan mengingat Syahrir mempunyai kepentingan keahlian gaya barat. Kondisi tersebut sangat diperlukan Syahrir, karena akan lebih mudah untuk mengendalikan Urip yang berpikiran gaya barat, daripada Sudirman yang masih terpengaruh gaya Jepang.⁵¹⁾

Akan tetapi keputusan Syahrir tersebut tidaklah dengan mudah dapat dilaksanakan begitu saja. Hal ini mengingat Sudirman memiliki dukungan lebih banyak dari pihak-pihak militer, meskipun dalam pemilihan suara, selisih kemenangannya tidak jauh berada diatas Urip. Syahrir tidak dapat memaksakan keputusannya tersebut, karena hal itu akan menunjukkan keangkuhan yang berlebihan dari kabinet Syahrir. Keangkuhan yang berlebihan ini, tidak saja kurang baik, tetapi bahkan akan dapat membahayakan kedudukan kabinetnya. Apabila Syahrir memaksa

51) Ulf Sundhausen, Op.cit., hal. 39.

untuk menolak Sudirman, hal itu akan menyebabkan dukungan yang diberikan untuk Sudirman akan lebih besar. Disamping itu, kekerasan hati Syahrir itu juga akan membuat kabinet Syahrir terlihat semakin kaku dan tidak kenal kompromi. Situasi tersebut akan dapat memperburuk keadaan.

Sudirman mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang penggalang setiakawan. Kemampuan tersebut dapat terlihat pada saat dia menengahi masalah-masalah kultural, manipulasi simbol dan organisasi massa. Disamping itu, Sudirman juga merupakan penggalang persatuan di kalangan tentara dan mengerahkan dukungan bagi dirinya sendiri, terutama karena dia mampu mengesankan sesama perwiranya, dengan persatuan dan kejujurannya. Sifat-sifat ini tidak bisa ditolak oleh Syahrir. Syahrir dapat saja memaksakan kehendaknya dalam bidang pemerintahan, akan tetapi dalam bidang angkatan bersenjata, Syahrir tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Mungkin memang benar apabila campur tangan militer dalam pemerintah sering diartikan sebagai berlakunya konflik antara kelompok militer dan pemerintahan sipil.⁵²⁾ Akan tetapi adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, apabila penekanan dari pihak sipil terhadap militer terlalu berat, sehingga militer benar-benar tidak dapat mencampuri urusan politik sama sekali, maka kekecewaan dari pihak militer karena pengaruhnya dibatasi,

52) Eric A. Nordlinger, Militer dalam pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hal. 18.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

44

akan memunculkan hal-hal yang lebih serius bagi pemerintahan sipil. Dalam banyak hal, kelompok militer dapat mengambil alih sebuah kekuasaan melalui suatu coup d'etat.⁵³⁾

Rupanya hal itu dapat dimengerti Syahrir, sehingga pada tanggal 18 Desember, akhirnya pemerintah Kabinet Syahrir mengakui Sudirman sebagai panglima besar tentara. Meskipun demikian, bukan berarti pengakuan tersebut dilakukan tanpa syarat. Pemerintah bersedia mengakui Sudirman sebagai panglima besar, dengan syarat para pimpinan tentara setuju untuk tidak menentang lagi pengangkatan Amir Syarifuddin sebagai menteri pertahanan.

Perlu diketahui bahwa kekecewaan militer tentang tidak diangkatnya Sultan Hamengkubuwono IX sebagai menteri pertahanan, bukanlah satu-satunya kekecewaan yang dimiliki oleh pihak militer kepada pemerintah. Kekecewaan paling utama yang menimbulkan pertentangan adalah karena militer tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah, untuk mendapatkan kedaulatan dan pengakuan dari pihak luar. Sikap pimpinan sipil yang tidak mau menampilkan sosok penonjolan militer, adalah hal yang tidak bisa dimengerti oleh kalangan militer.⁵⁴⁾

53) Morris Janowitz, ed., Hubungan-hubungan sipil militer. Jakarta : Bima Aksara, 1985, hal. 2.

54) Todiruan Dydo, Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G. 30 S PKI, Jakarta : PT. Golden Press, 1990, hal. 31.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45

Diangkatnya Sudirman sebagai panglima besar memang sedikit dapat membuat lega kalangan militer. Hal ini disebabkan kepemimpinan Sudirman, diharapkan dapat menampung aspirasi kalangan angkatan bersenjata, terutama dalam berpolitik. Kedudukan panglima besar, berarti mempunyai kedudukan tinggi untuk dapat mengatur dan mengarahkan angkatan bersenjata yang dipimpinnya. Kesempatan inilah yang tidak akan diabaikan oleh Sudirman. Dengan kekuasaannya, Sudirman dapat sedikit membelokkan kebijakan pemerintah untuk kepentingan yang lain. Sudirman sudah dikenal sebagai tokoh yang mempunyai kecenderungan lebih terhadap pihak oposisi. Dengan kekuasaannya, Sudirman memberi kesempatan pada pihak-pihak oposisi untuk menyelenggarakan peristiwa-peristiwa besar, seperti misalnya rapat atau demonstrasi. Tidak hanya sampai di situ, kelonggaran yang diberikan Sudirman, bahkan juga disertai dengan perlindungan-perlindungan, sehingga kegiatan-kegiatan pihak oposisi tersebut tidak mendapat gangguan dari luar.

Sadar bahwa kedudukannya sulit untuk diganggu gugat, sudirman bahkan secara terbuka menyatakan kecamannya terhadap sistem perjuangan diplomasi yang dilakukan Syahrir. Tidak hanya sampai disitu, Sudirman bahkan berani mempertanyakan dan menentang penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan, pada bulan Maret 1946. Dalam hal

ini, pemerintah tidak mampu berbuat atau mengatakan secara langsung terhadap Sudirman.⁵⁵⁾ Akan tetapi, meskipun ditangkapnya pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan membuat ruang gerak Sudirman untuk bersiasat berkurang secara drastis, Sudirman menahan diri untuk tidak mengambil tindakan-tindakan keras terhadap pemerintah.⁵⁶⁾ Untuk menunjukkan penyesalannya atas tindakan pemerintah itu, Sudirman mengeluarkan perintah kepada seluruh angkatan bersenjata untuk berpuasa selama 3 hari. Pada saat mengeluarkan perintah itu, Sudirman mempunyai tujuan :

"..... memperdalam keinsyafan atas kesucian perjuangan kita menuntut kemerdekaan 100%, lagi pula memperteguh kebulatan tekak untuk mencapai cita-cita, serta mempertinggi semangat bertempur."⁵⁷⁾

Apa yang dikatakan oleh Sudirman ini dimaksudkan untuk memberi semangat di kalangan angkatan bersenjata. Namun demikian, dari perkataannya tentang penuntutan kemerdekaan 100% tersebut, menunjukkan dukungannya akan program minimum persatuan perjuangan. Hal itu berarti pula secara terbuka Sudirman tidak menyetujui perjuangan diplomasi.

Pertentangan bukan saja antara Sudirman dan

55) Ben Anderson, Op.cit., hal. 361.

56) Ulf Sundhausen, Op.cit., hal. 50

57) Ben Anderson, Op.cit., hal. 412

Syahrir, tetapi juga antara Sudirman dan Amir Syarifuddin. Sejak awal sudah diketahui bahwa Sudirman dan Amir Syarifuddin mewakili dua pandangan yang berbeda mengenai tentara dan peranannya. Masalah pepolit, pengangkatan panglima divisi, serta masalah pengorganisasian di bidang ketentaraan, di mana keduanya selalu bertentangan dalam masalah-masalah tersebut, merupakan wujud nyata dari persaingan untuk mempengaruhi dan menguasai militer.

Dalam masalah pendirian pepolit, Sudirman mengecam, bahwa pendirian pepolit hanya akan memecah belah tentara saja. Pada permulaan bulan April 1946, terlihat tanda-tanda bahwa pemerintah akan memperbesar pepolit. Untuk mengimbangnya, Sudirman mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Penasehat Pucuk Pimpinan Tentara, yang keanggotannya diisi dengan banyak tokoh-tokoh oposisi. Perintah itu juga dikeluarkan pada para pimpinan-pimpinan divisi, yaitu membentuk badan serupa untuk masing-masing divisi.

Dengan dibentuknya Dewan Penasehat Pucuk Pimpinan Tentara, yang beranggotakan sebagian besar dari kalangan oposisi, mempunyai arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, ditanggapi dengan bergabungnya tokoh-tokoh oposisi tersebut, sementara dapat menggantikan perjuangan pihak oposisi yang pemimpin-pemimpinnya ditangkap.

B. SIKAP PIHAK OPOSISI

Di atas telah diuraikan tentang sikap angkatan bersenjata, dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tokoh-tokoh militer yang tergabung dalam ketentaraan menggabungkan diri dalam Dewan Penasihat Pucuk Pimpinan Tentara. Sementara itu pihak oposisi non militer, untuk sementara membatasi kegiatannya. Ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas dan harus hati-hati, supaya tidak tertangkap seperti pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan. Tertangkapnya pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan, membuat oposisi ini untuk sementara terkesan mati. Tidak ditemui pidato-pidato yang berapi-api untuk memberikan semangat dalam mendukung program minimum. Kegiatan oposisi dilakukan dengan lebih hati-hati dan secara rahasia. Hal ini untuk menghindari supaya penangkapan tidak merajalela. Namun demikian bukan berarti keberadaan persatuan perjuangan sudah tidak perlu diperhitungkan lagi. Meskipun terlihat mati, akan tetapi persatuan perjuangan masih sangat berbahaya, mengingat besarnya dukungan yang ada padanya. Penangkapan pemimpin-pemimpinnya bukan berarti telah menghancurkan persatuan perjuangan, tetapi justru secara tidak terduga dapat memunculkan peristiwa-peristiwa yang serius, yang dilandasi rasa dendam para pengikutnya karena kesewenangan pemerintah.

"Persatuan perjuangan masih tetap berbahaya karena adanya dukungan yang terus diberikan dari sebagian besar anggota PNI, pengikut-pengikut Tan Malaka, dan sejumlah besar pemimpin TRI maupun organisasi-organisasi laskar bersenjata."58)

Perundingan Hoge Valuwe yang dilakukan di Belanda menemui kegagalan, karena pihak Indonesia tidak berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan 100% atas wilayah Indonesia. Hal ini sebenarnya telah dirahasiakan oleh pemerintah. Namun terungkap juga secara tidak sengaja, yaitu ketika wakil presiden pada hari besar Islam tanggal 27 Juni 1946 mengadakan suatu pembicaraan dalam suatu rapat besar di Yogyakarta. Wakil presiden mengemukakan sedikit dari rahasia itu, dimana isinya hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Jawa dan Sumatera saja, sedangkan lainnya dikuasai Belanda. Apa yang dikatakan oleh wakil presiden tersebut membuat keadaan menjadi kacau. Bagaimanapun juga, hasil dari perundingan tersebut jauh dari tuntutan oposisi dalam program minimum, dan kalangan umum tidak menyangka bahwa pemerintah Kabinet Syahrir akan membawa Indonesia ke posisi yang paling rendah itu.59)

58) George McT. Kahin, Op.cit., hal. 184.

59) Iwa Kusuma Sumantri, Op.cit., hal. 141.



Peristiwa tersebut telah membuat anggota-anggota pihak oposisi dalam persatuan perjuangan bangkit kembali, meskipun tanpa pemimpin-pemimpin mereka. Anggota persatuan perjuangan yang sebagian besar berasal dari kalangan pemuda bangkit kembali menggabungkan diri bersama-sama dengan tokoh-tokoh oposisi dari kalangan angkatan bersenjata. Kemarahan dari pihak oposisi tersebut, karena mereka menyadari bahwa Kabinet Syahrir ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan Kabinet Syahrir ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan Kabinet koalisi seperti yang diperintahkan oleh Presiden Sukarno. Kabinet koalisi di sini adalah kabinet yang bertugas untuk melaksanakan program lima pokok, yang meskipun isinya tidak seperti isi program minimum, akan tetapi telah mewakili tuntutan pihak oposisi. Perundingan Hoge Valuwe, tidak hanya menyimpang dari program lima pokok saja, akan tetapi sedikitpun bahkan tidak mewakili.

Kemarahan dari pihak oposisi memuncak ketika tersiar berita bahwa Syahrir mengirimkan surat balasan kepada Belanda, yang isinya menyetujui untuk mengadakan perundingan lagi. Penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan oposisi, bukannya membuat pihak ini menjadi lemah, tetapi justru semakin radikal dan keras. Pimpinan-pimpinan persatuan perjuangan sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk meredakan gejolak yang ada dalam semangat yang menyala-

nyala dari anggotanya. Akan tetapi hal itu ternyata tidak dimengerti oleh pihak pemerintah. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh oposisi yang tersisa tersebut justru tak terkendali dan semakin membahayakan kedudukan Kabinet Syahrir.



BAB V

USAHA MENCARI PENGARUH

A. RENCANA MENGGULINGKAN SYAHRIR

Kekecewaan pihak oposisi yang sudah tidak mempunyai pemimpin, membuat oposisi yang dilaksanakan menjadi tidak terkendali. Golongan oposisi muda lebih radikal, sementara golongan oposisi tua tidak ingin dikatakan tidak reaksioner lagi, sehingga mengikuti arus generasinya yang lebih muda. Meskipun oposisi ini masih radikal dan tidak terkendali, namun setelah penangkapan para pemimpin oposisi tidak ada lagi sebuah peristiwa penting yang meresahkan, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Ketakutan akibat razia bulan Maret 1946, terhadap para pemimpin oposisi, rupanya telah menjadi kendali terbaik sehingga tidak muncul kerusuhan yang berarti seperti sebelumnya.

Satu-satunya peristiwa yang menggemparkan adalah Peristiwa 3 Juli 1946. Dalam peristiwa inipun, sulit untuk dikatakan sebagai sebuah kerusuhan atau kegeparan. Dapat dikatakan demikian karena peristiwa ini terjadi tanpa melibatkan masyarakat umum, bahkan dilakukan tanpa membuat keonaran dan kegelisahan yang berarti pada masyarakat.

Adapun latar belakang Peristiwa 3 Juli 1946 adalah adanya pidato dari Wakil Presiden Moh. Hatta dalam sebuah

rapat besar pada suatu hari besar agama Islam tanggal 27 Juni 1946. Wakil presiden Moh. Hatta mengemukakan atas nama Syahrir, bahwa Republik Indonesia paling jauh hanya bisa mengklaim kedaulatan atas pulau Jawa dan Sumatera, serta bahwa Belanda telah kembali untuk membentuk pemerintahan atas wilayah lainnya.⁶⁰⁾ Sejak awal dimulainya perundingan perdamaian antara Republik Indonesia dengan Belanda, tawaran Belanda tetap dan tidak berubah, yaitu kedaulatan Republik Indonesia hanya atas wilayah Jawa dan Sumatera saja. Karena Belanda tetap pada pendiriannya, sementara situasi dalam negeri Republik Indonesia semakin memanas, maka Syahrir mengirimkan usul balasan kepada Belanda yang menyatakan persetujuan atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Jawa dan Sumatera saja.

Usul balasan dari pemerintah kabinet Syahrir II tersebut, sebenarnya merupakan rahasia. Akan tetapi berita tentang isi surat balasan tersebut dengan cepat tersebar, justru dari pers Belanda di Jakarta. Desas-desus tersebut cepat menyebar ke Jawa Tengah, dan isinya bukan hal yang sebenarnya lagi, akan tetapi sudah diputarbalikkan.⁶¹⁾

60) Movis rose, Indonesia Merdeka : Biografi Politik Muhammad Hatta, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 225.

61) Ben Anderson, Op.cit., hal. 415.

Situasi ini menimbulkan ketegangan, terutama di pihak oposisi. Kecurigaan atas kebenaran berita tersebut sangat meresahkan, baik dari pihak oposisi sebagai pihak penentang, maupun pihak pemerintah sebagai pelaksana politik. Hal inilah yang mendorong Dwitunggal Sukarno-Hatta, dengan Hatta sebagai juru bicara, mengumumkan isi dari balasan yang dikirimkan Syahrir kepada Belanda.

Pidato Hatta yang menyatakan kebenaran tersebut, bukannya ditanggapi dengan gembira, akan tetapi justru dengan kegemparan. Kegemparan terjadi karena ternyata Syahrir tidak menjalankan kabinet koalisi yang bersedia melaksanakan perundingan untuk pengakuan kedaulatan atas wilayah Indonesia 100%.⁶²⁾ Kekecewaan dari pihak oposisi, tidak lagi bisa dibendung. Satu-satunya jalan yang mungkin dilakukan untuk menghentikan langkah Syahrir adalah dengan mengambil alih kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Akan tetapi bagaimana cara untuk mengambil alih kekuasaan tersebut, masih belum ditentukan.

Segera setelah menghadiri perayaan hari besar umat Islam tersebut, para tokoh oposisi, yaitu Buntaran, Budhyarto, Akhmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Chaerul Saleh, Sayuti Melik, Mayor Jenderal Sudarsono, dan seorang

62) Kabinet koalisi harus melaksanakan program lima pokok yang telah dibuat oleh Presiden Sukarno, yang isinya antara lain pengakuan kedaulatan 100% atas wilayah Indonesia.

bawahannya yaitu Abdulkadir Jusuf, mengadakan pertemuan di rumah Budhyarto. Mereka berkumpul dengan kesadaran bahwa mereka harus melakukan sesuatu, supaya pemerintah tidak menerima kedaulatan hanya atas wilayah Jawa dan Sumatera saja. Akan tetapi, setelah melalui pembahasan yang panjang, dan tidak ditemui pemecahan atas apa yang akan dilakukan, maka pertemuan tersebut dibubarkan. Dalam perjalanan pulang, Mayor Jenderal Sudarsono pergi dengan diikuti A.K.Jusuf.⁶³⁾ Ketika sampai di rumah Sudarsono, Jusuf berbicara dengan nada sengit mengenai pengkhianatan Syahrir terhadap Indonesia Merdeka.⁶⁴⁾

Abdulkadir Jusuf mempunyai sebuah pendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan perundingan yang pada dasarnya sangat merugikan bangsa Indonesia tersebut adalah dengan menyingkirkan pemegang kuasa atas pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Sutan Syahrir. Dengan menyingkirkan Syahrir, maka secara otomatis, perundingan tersebut dapat dihentikan. Meskipun perundingan tetap akan dilakukan, tetapi melainkan orang-orang dari golongan yang lebih revolusioner, maka diharapkan dalam perundingan tersebut paling tidak akan dipertahankan kedaulatan 100% atas wilayah Indonesia seperti yang diinginkan oleh banyak

63) Iwa Ksuma Sumantri, Op.cit., hal. 141.

64) Ben Anderson, Op.cit., hal. 418.

pihak. Demikianlah pemikiran A.K.Jusuf yang diungkapkan kepada Mayor Jenderal Sudarsono. Lebih parah lagi, A.K. Jusuf mendesakkan pemikirannya tersebut, dengan melihat bahwa Mayor Jenderal Sudarsono adalah orang yang cukup mempunyai pengaruh, terutama terhadap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hal itu berarti apa yang akan dilakukan oleh Sudarsono, akan mudah diterima dan mendapatkan dukungan dari Sudirman.

Pemikiran A.K. Jusuf yang ditawarkan kepada Mayor Jenderal Sudarsono memang masuk akal, sebab dengan disingkirkannya Syahrir dari kedudukan sebagai Perdana Menteri, maka akan lebih mudah lagi bagi pihak oposisi untuk mengambil alih kekuasaan, dengan melaksanakan program-program yang mereka miliki. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyingkirkan Syahrir dari kedudukannya sebagai perdana menteri. Hal itu dikarenakan banyaknya pendukung-pendukung Syahrir, serta keberadaan Sukarno-Hatta yang telah terlanjur menyerahkan kendali pemerintahan kepada Syahrir sejak awal mulanya.

Bukanlah hal yang mengherankan apabila Dwitunggal Sukarno-Hatta telah memihak kepada Syahrir daripada kaum oposisi yang radikal pimpinan Tan Malaka, ataupun militer yang selalu ingin menunjukkan kekuatannya. Dwitunggal Sukarno-Hatta adalah orang-orang yang dididik secara Barat dengan mengesampingkan perjuangan-perjuangan fisik (bidang

bersenjata) dan lebih memusatkan perhatian pada perjuangan demokrasi yang lebih terkesan moderat dan evolusioner. Sementara itu pula ialah Tan Malaka dalam skandal "surat wasiat", telah membuat Sukarno mempunyai alasan untuk tidak menyukai Tan Malaka sehingga tidak heran apabila rasa tidak suka itu juga ditujukan kepada organisasi yang dipimpin Tan Malaka yaitu persatuan perjuangan. Mungkin hal ini adalah masalah pribadi antara Sukarno dan Tan Malaka. Akan tetapi melihat keakraban hubungan antara Sukarno dengan Syahrir dikemudian hari, bahkan memberikan dukungannya atas pemerintahan Syahrir, maka jelas bahwa hubungan Sukarno dengan Tan Malaka dan juga dengan pihak militer, tidak membawa keuntungan bagi oposisi-oposisi pemerintahan tersebut. Sementara keharmonisan hubungan baik Sukarno, Hatta maupun Syahrir, telah membawa keuntungan yang besar bagi pihak Syahrir. Bahkan menurut Soebadio, salah seorang pengikut Syahrir.

"Tritunggal Sukarno-Hatta-Syahrir, merupakan pimpinan yang paling efektif di Indonesia. Syahrir menghormati integritas dan sifat kepemimpinan Hatta, sedang Hatta mengagumi ketajaman politik Syahrir.⁶⁵⁾

Sikap saling menghormati dan saling mendukung ini, telah membuat kedudukan Syahrir menjadi semakin kuat.

65) Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo, 22 Februari 1982, dikutip dari Movis Rose, Op.cit., hal. 183.

Untuk menghentikan Syahrir melalui cara yang lebih lunak, dalam hal ini adalah berunding dengan Syahrir, tentu akan mendapat kesulitan, tidak hanya dari Syahrir sendiri sebagai pihak yang bersangkutan, tetapi juga dari tokoh-tokoh utama bangsa Indonesia yang mendukung Syahrir yaitu Sukarno-Hatta. Dengan pertimbangan akan adanya dukungan dari presiden dan wakil presiden, maka jalan satu-satunya yang bisa dilakukan tanpa harus terlibat langsung dengan presiden dan wakilnya, adalah dengan menyembunyikan Syahrir. Tindakan ini memang radikal, dan tentu saja akan sangat bertentangan dengan tawaran-tawaran damai dari pemerintah yang telah memberi kesempatan pada pihak oposisi untuk membentuk sebuah kabinet, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bukan salah para pemimpin negara, apabila mereka mendukung pemerintahan Syahrir, sebab dukungan dari Presiden dan Wakil Presiden, berarti kekuatan bagi pemerintah dan juga negara dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mayor Jenderal Sudarsono ternyata menyerah begitu saja pada desakan A.K. Jusup. Tindakan menculik memang sudah menjadi kebiasaan dalam diri para pemuda.⁶⁶⁾ Tindakan itu telah menunjukkan tingkat keradikalan dari para pemuda Indonesia pada waktu itu. Di pihak militer sendiri, sebagai pejuang-pejuang fisik yang terkenal

66) Siasat penculikan rupanya telah menjadi trend pemuda pada waktu itu, seperti peristiwa di Rengasdengklok.

keras, rupanya telah mendapatkan tekanan yang besar dari pada pemuda untuk menunjukkan dan membuktikan keberanian serta semangat tidak mementingkan diri sendiri, dan dengan demikian, mempertahankan martabat mereka sebagai orang-orang revolusioner sejati.⁶⁷⁾ Dengan alasan itulah, maka Mayor Jenderal Sudarsono menyetujui usul A.K. Jusup untuk menangkap Syahrir dengan menandatangani surat penangkapan tersebut. Untuk pelaksanaan rencana tersebut, Jusup akhirnya menemui Iwa Kusuma Sumantri dan akhirnya mereka berangkat ke Surakarta, karena mengetahui bahwa setelah perjalanan keliling ke Jawa Timur, Syahrir akan menginap di Surakarta.

B. PELAKSANAAN PENGGULINGAN SYAHRIR

Telah diketahui sebelumnya, bahwa satu-satunya rencana yang ada pada pihak oposisi untuk mencegah perundingan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia hanya wilayah Jawa dan Sumatera saja, adalah rencana yang dikemukakan Jusup kepada Mayor Jenderal Sudarsono, yaitu menyingkirkan Syahrir dari kedudukannya sebagai perdana menteri. Sudarsono menandatangani rencana tersebut dengan menandatangani surat perintah penangkapan terhadap Syahrir. Pada hari itu, yaitu pada tanggal 29 Juni 1946, A.K. Jusup bersama dengan Iwa Kusuma Sumantri berangkat ke Surakarta, karena diketahui bahwa Syahrir akan menginap di sebuah

67) Ben Anderson, *Op.cit.*, hal. 418-419.

hotel di kota tersebut. Dalam hal ini dapatlah dimengerti, apabila dalam pembelaan Mohammad Yamin dikemudian hari, Yamin menolak bahwa 6 orang tertuduh di rumah Baciro menyebabkan Syahrir dilarikan dan dirampas kemerdekaannya.⁶⁸⁾ Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa yang terlibat dalam penculikan tersebut hanyalah Sudarsono dan A.K. Jusup, sementara terdakwa yang lain tidak tahu menahu tentang rencana penculikan tersebut.

Penangkapan terhadap Syahrir itu sendiri bukanlah suatu yang yang mudah. Dikatakan demikian karena penjaga keamanan kota tersebut masih ragu-ragu untuk bekerjasama. Akan tetapi hal itu tidak berjalan lama, karena beberapa saat kemudian, pemimpin divisi setempat menyetujui dan mengizinkan penangkapan tersebut. Penangkapan itu akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Dengan penangkapan itu, maka Syahrir berhasil disembunyikan oleh para pemuda. Kegiatan itu sendiri sebenarnya dirahasiakan. Pemerintah juga baru mengetahuinya setelah pagi harinya diadakan rapat kabinet dan Syahrir tidak hadir. Setelah pada sore harinya masih juga tidak diketahui keberadaan Syahrir, maka atas usul Amir Syarifuddin, kekuasaan pemerintahan untuk sementara waktu diambil alih oleh presiden Sukarno. Sejak saat itu, Presiden Sukarno menyatakan keadaan darurat untuk seluruh

68) Mohammad Yamin, Sapta Darma. Bukittinggi-Jakarta-Medan : N.V. Nusantara, 1950, hal. 73.

Republik Indonesia.⁶⁹⁾ Lebih parah lagi, usaha penangkapan terhadap perdana menteri Syahrir, oleh pemerintah dianggap sebagai sebuah penculikan. Hal itu wajar, sebab apabila penangkapan itu adalah penangkapan biasa, maka pihak pemerintah dalam hal ini kabinet Syahrir, Presiden serta wakilnya harus diberi tahu, apalagi yang ditangkap adalah seorang perdana menteri.

Usaha penangkapan terhadap perdana menteri Syahrir itu sendiri sebenarnya tidak akan diberitahukan kepada pemerintah, tentang siapa sebenarnya pelaku penangkapan tersebut. Akan tetapi menjelang senja hari, Sudarsono menjadi tidak sabar. Di depan sebuah rapat di Markas Masyumi, Sudarsono memberitahukan apa yang sedang terjadi, sambil meminta untuk memberitahukan kepada anggota-anggota yang lain bahwa perdana menteri sudah diculik.⁷⁰⁾ Tindakan Sudarsono ini telah menyebabkan tersebarnya berita tentang penculikan perdana menteri Syahrir. Berita tentang diculiknya perdana menteri yang sudah tidak dapat ditutupi di depan umum ini, akhirnya membuat presiden Sukarno mengumumkan tentang diambil alihnya kekuasaan Republik Indonesia oleh presiden kembali. Hal itu diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Juni.

Dengan tidak adanya perdana menteri, maka Sudirman sebagai panglima besar memerintahkan secara lisan kepada

69) Aboe Bakar Loebis, Op.cit., hal. 162.

70) Ben Anderson, Op.cit., hal. 422.

Sudarsono dan pengikutnya untuk menyusun suatu daftar kabinet baru yang akan diajukan kepada Presiden. Dengan bantuan Buntaran, Budhyarto, Moh. Yamin, Iwa Kusuma Sumantri, Akhmad Subardjo, dan Chaerul Saleh, maka dibuatlah konsep dokumen yang akan diajukan kepada presiden untuk ditanda tangani.

Terlepas dari apa yang sedang dilakukan oleh para pimpinan oposisi tersebut, di Yogyakarta diadakan sebuah rapat antara pimpinan-pimpinan tingkat puncak dengan jenderal Sidirman. Sukarno-Hatta dan Amir Syarifuddin menuduh Sudirman tahu tentang keberadaan Syahrir dan meminta untuk menggunakan pengaruhnya agar Syahrir dibebaskan. Sudirman menolak untuk menggunakan pengaruhnya. Penolakan ini terbukti setelah rapat tersebut, Sudirman tidak melakukan tindakan untuk kebebasan Syahrir. Melihat gejala ini, maka Sukarno pada tanggal 30 Juni, berpidato melalui radio, yang intinya menyatakan penyesalannya akan mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh pihak oposisi tersebut. Pidato ini ternyata membawa hasil, sehingga pada hari berikutnya Syahrir dibebaskan. Sudirman sendiri menolak permintaan untuk menggunakan pengaruh dalam pembebasan Syahrir, karena menyadari bahwa apabila Syahrir sudah dibebaskan, maka akan segera dilakukan tindakan pembalasan dari pemerintah.

Sudirman berusaha mencegah tindakan pembalasan dari pemerintah. Akan tetapi usaha ini menemui kegagalan, karena pada tanggal 1 Juli, polisi negara diberi kewen-

gan untuk melakukan pembersihan di seluruh Yogyakarta. Buntaran, Budhyarto, Chaerul Saleh, Mohammad Saleh, Sayuti Melik, Akhmad Subardjo dan sejumlah tokoh lainnya ditangkap. Hanya Iwa Kusuma Sumantri dan Moh. Yamin saja yang lolos dari penangkapan tersebut. Dengan adanya penangkapan-penangkapan tersebut, maka Sudarsono dan A.K. Jusup berangkat ke Solo untuk menemui Panglima Besar Sudirman. Panglima Besar Sudirman menanggapi berita tersebut dengan mengeluarkan perintah lisan kepada Sudarsono agar melepaskan tawanan-tawanan politik tersebut dan mengusahakan kepada Presiden Sukarno supaya diadakan pergantian kabinet, karena kabinet yang berkuasa pada waktu itu telah mengadakan perundingan terus menerus dengan Belanda⁷¹⁾, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan pengakuan kedaulatan 100%.

Dengan adanya perintah lisan dari Panglima Besar Sudirman tersebut, maka Sudarsono bersama dengan A.K. Jusup pergi ke Wirogunan untuk membebaskan para tawanan politik. Setelah berhasil membebaskan tawanan-tawanan politik tersebut, rombongan berangkat ke markas besar resimen dekat dengan kota Yogyakarta, yaitu Wiyoro. Ditempat inilah dibuat empat buah konsep naskah rancangan maklumat

71) Iwa Kusuma Sumantri, Op.cit., hal. 143.

untuk diajukan kepada presiden agar ditandatangani.⁷²⁾ Rancangan Maklumat⁷³⁾ itu pada hakikatnya hanyalah usul-usul belaka kepada presiden untuk mengganti kabinet sesuai dengan sasaran panglima Besar Sudirman.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah usaha untuk menghadirkan tokoh-tokoh oposisi yang ditangkap pada razia bulan Maret. Akan tetapi usaha ini menemui kegagalan. Di samping itu, untuk kelancaran usaha memajukan rancangan maklumat kepada presiden, maka Amir Syarifuddin dan Hatta harus dinetralisir terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah pengaruh mereka terhadap presiden, dan supaya presiden dapat bersikap terbuka dalam menanggapi dan menghadapi ke lima rancangan maklumat atau petisi tersebut. Usaha untuk menetralsisir Amir dilakukan dengan cara menculiknya. Akan tetapi penculikan terhadap Amir ini menemui kegagalan, bahkan sempat terjadi baku tembak diantara penculik dengan pangawal Amir. Baku tembak di rumah Amir Syarifuddin telah membuyarkan pasukan yang telah disiapkan untuk mendukung pengajuan petisi. Sementara itu, setelah pasukan yang berada di alun-alun Utara Yogyakarta bubar, pasukan yang telah dijanjikan oleh Panglima Besar Sudirman akan turut bergabung dengan Laskar Rakyat kota itupun juga tidak

72) Rancangan maklumat yang pertama sudah dibuat di rumah Budhyarto pada tanggal 29 Juni, sebelum terjadi penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi.

73) Rancangan maklumat 3 Juli 1946, dapat dilihat dalam lampiran.

muncul.

Situasi ini tidak diketahui oleh Sudarsono. Dengan sebuah truk dan empat buah mobil pengawal, rombongan Sudarsono tiba di Yogyakarta. Namun yang ditemui adalah sasana yang tampak sepi dan aman tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Laskar Rakyat tidak nampak, begitupun dengan anggota-anggota pasukan Hizbullah, sementara itu tidak ada waktu lagi untuk meminta bantuan ke Wiyoro. Satu-satunya yang ada adalah ketegangan dari rombongan itu, yang sudah tidak dapat muncul dari rencana semua, karena sudah sampai di depan gerbang istana kepresidenan. Konfrontasi dengan presiden harus berlangsung, meskipun yang menghadapi sekarang hanya tinggal 14 orang bekas tahanan yang sudah kelelahan. Dengan tekad yang bulat, akhirnya rombongan tersebut memasuki istana presiden yang ternyata sudah dijaga dengan ketat. Sudarsono pergi menghadap presiden, sementara yang lainnya menunggu diluar.

BAB VI

DITUDUH MELAKSANAKAN CUOP d'ETAT

A. SIKAP PEMERINTAH TERHADAP PETISI TERTANGGAL 3 JULI 1946

Pengajuan empat petisi tertanggal 3 Juli 1946 tersebut dilaksanakan di istana presiden di Yogyakarta. Akan tetapi ternyata proses pengajuan petisi itu tidak seperti apa yang diharapkan. Peristiwa-peristiwa yang telah mendahului pengajuan ke empat petisi ini telah membuat istana presiden dan kediaman para menteri dijaga dengan ketat. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya penculikan terhadap tokoh-tokoh pening pemerintahan tidak merajalela. Usaha untuk mengumpulkan laskar-laskar rakyat guna mendukung pengajuan petisi tersebut telah dikacaukan dengan adanya upaya penculikan terhadap Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Baku tembak yang terjadi dalam upaya penculikan tersebut telah menyiagakan pasukan yang berada di alun-alun utara Yogyakarta, sehingga pemimpinnya memerintahkan pasukan tersebut untuk mengundurkan diri dari tempat tersebut.⁷⁴⁾

Kegagalan upaya penculikan terhadap Menteri pertahanan Amir Syarifuddin, membust suasana menjadi tegang. Amir Syarifuddin menghadap presiden dan wakil presiden untuk memberitshukan apa yang telah terjadi. Dr.Sukiman salah seorang tokoh politik dari Masyumi yang

74) Ben Anderson, Op.cit., hal. 436

menerima undangan Sudarsono juga hadir di situ tanpa tahu apa yang akan terjadi. Situasi ini telah membuat presiden dibantu para pengikutnya menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Pasukan pengawal presiden disiagakan untuk menghadapi pihak oposisi.

Sudarsono sendiri sebenarnya sudah merasakan adanya kejanggalkan, karena ketika akan sampai di Yogyakarta tidak menemukan pasukan-pasukan dari laskar rakyat yang diharapkan dapat memperlihatkan kekuatan sehingga dapat mendukung pengajuan ke lima petisi tersebut. Dengan tidak ditemukannya pasukan-pasukan tersebut, maka berarti tindakan itu tidak mendapatkan dukungan yang berarti lagi. Sudarsono sendiri tidak mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya hingga usaha untuk memamerkan kekuatan kepada pemerintah menemui kegagalan. Namun demikian Sudarsono tidak dapat mundur, konfrontasi dengan presiden akan tetap berlangsung.

Pada tanggal 2 Juli, Sudarsono dengan Moh. Yamin dan disertai dengan beberapa bekas tahanan yang sudah terlihat sangat lelah, datang menghadap presiden untuk mengajukan empat buah petisi yang dibuat di Wiyoro. Sudarsono menghadap Presiden, sementara yang lain menunggu di luar, di bawah penjagaan yang ketat dari Pesindo. Sudarsono disuruh menunggu di ruang tunggu, sementara Presiden, wakil Presiden, Amir Syarifuddin serta beberapa orang tokoh politik yang lain mengadakan pertemuan singkat guna bertukar informasi tentang apa yang sedang terjadi.

Setelah itu, Sudarsono baru diijinkan masuk ke dalam ruang pertemuan.

Sudarsono menyodorkan lima buah petisi yang sudah disiapkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Setelah membacanya, Presiden tampak terkejut, akan tetapi Presiden dapat mengendalikan diri dan berusaha bersikap setenang mungkin. Namun salah seorang pendamping presiden yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa apa apa yang sedang terjadi adalah usaha kudeta. Setelah menerima petisi-petisi tersebut, Presiden menyuruh Sudarsono untuk keluar. Sudarsono ditangkap dan ditempatkan sendirian dalam sebuah kamar samping selama sisa hari itu.⁷⁵⁾ Sudarsono tidak dapat melawan, karena sebelum menghadap presiden, senjatanya telah dilucuti terlebih dahulu oleh pengawal Presiden.

Penangkapan juga dilakukan terhadap sisa rombongan yang masih menunggu di luar. Sesuatu yang tidak pernah di duga, yaitu bahwa mereka ditangkap. Hal tersebut diungkapkan Moh. Yamin dalam pembelaannya :

"Pada suatu ketika itu melihat bahwa yang datang adalah Perdana Menteri Sutan Syahrir dalam auto bersama pengawal bersenjata dan beberapa orang putri. Sorenya kita diajak oleh ajudan istana untuk ikut masuk suatu kamar di sebelah kiri dalam istana. Kita ikut, mula-mula dengan persangkaan bahwa kita akan berunding atau bertemu muka dalam

75) Ibid., hal. 438.

suatu ruangan. Tetapi kita lama-lama mendapat kesan bahwa tangkapan itu dijalankan pada kita."76)

Penangkapan tersebut begitu rapi sehingga terkesan telah terencana sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan wakil Presiden telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi upaya Sudarsono beserta dengan teman-temannya dalam usaha untuk mencari pengaruh dan mengajukan petisi. Sangatlah sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan kesalahpahaman atau bukan. Kedua belah pihak memiliki pendirian yang berbeda-beda mengenai arah perjuangan bangsa. Usaha untuk mengajukan petisi adalah suatu upaya yang wajar bagi pihak pelaku, karena itu berarti telah menunjukkan partisipasi mereka dalam perjuangan politik Indonesia. Akan tetapi pandangan tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Sikap pemerintah ternyata lebih keras dari apa yang diperhitungkan. Pemerintah tidak mau menerima kompromi dalam bentuk apapun dengan penentangannya. Disamping itu, peristiwa-peristiwa lain yang melatarbelakangi munculnya petisi tersebut, seperti diculiknya Perdana Menteri Sutan Syahrir, secara tidak langsung telah membuat simpati para pimpinan politik, terutama presiden dan wakil Presiden

76) Mohammad Yamin, *Op.cit.*, hal 73

memudar.

Sikap pemerintah yang selalu menaruh curiga dan berusaha untuk selalu menghalangi gerak dari golongan oposisi, serta selalu berusaha untuk menyingkirkan tokoh-tokoh oposisi dapat dimengerti, mengingat kaum oposisi sendiri dalam melancarkan perjuangannya juga tidak mengenal kompromi dengan kebijakan pemerintah. Perjuangan dari kaum oposisi bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mungkin apabila dalam beberapa peristiwa, termasuk peristiwa 3 Juli, pihak oposisi tidak menggunakan kekerasan, dan mau sedikit terbuka kepada pemerintah, maka usulan-usulan diajukan akan dapat diterima atau paling tidak dipertimbangkan lagi.

Pemerintah mempunyai sifat yang lebih moderat dan lebih suka dengan perdamaian. Andaikata hal itu bisa dimengerti oleh pihak oposisi, sehingga setiap usaha yang berhubungan dengan pemerintah dilaksanakan sesuai keinginan pemerintah, maka pemerintah mungkin akan lebih memberi kelonggaran dan perhatian kepada usulan-usulan yang mereka ajukan.

B. TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARA PELAKU PERISTIWA

3 JULI

Di atas telah dikemukakan bahwa pemerintah tidak mengenal kompromi kepada pihak oposisi, dikarenakan pihak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

71

oposisi sendiri juga terlalu keras dalam pendiriannya. Pihak oposisi bahkan berani menculik Perdana Menteri Syahrir sebagai pimpinan pemerintahan pada waktu itu. Hal ini telah menjadi alasan bagi pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang tidak mau berkompromi dengan pemerintah itu dengan cara mengambil tindakan yang keras.

Sebelum diajukannya petisi kepada Presiden, pemerintah telah mulai mengadakan penangkapan-penangkapan kepada orang-orang yang terlibat dalam penculikan Sutan Syahrir, serta dicurigai akan menghambat perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya penangkapan atas para pelaku peristiwa 3 Juli 1946 inipun telah direncanakan sebelumnya, hanya saja alasan penangkapan tersebut belum ada. Pemerintah tidak hanya berhenti pada penangkapan orang-orang yang ikut serta menghadap ke istana kepresidenan pada saat pengajuan usulan, akan tetapi juga kepada mereka yang dicurigai telah ikut terlibat dalam pembuatan naskah petisi tersebut.

Abdulkadir Jusup pada tanggal 2 Juli itu dicegat di Klaten dalam perjalanannya untuk mengantarkan Iwa Kusuma Sumantri ke Solo. Setelah dicegat, dikatakan bahwa Abdulkadir Jusup dipanggil oleh resimen yang ada ditempat tersebut. Sesampainya di sana, Abdulkadir Jusup diberi minuman kopi yang sudah diberi obat tidur. Segera setelah tertidur, ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sel

yang tidak dapat ditembus sinar matahari, sehingga setelah keluar dari penjara tersebut, matanya rusak.⁷⁷⁾ Sementara itu, Iwa Kusuma Sumantri sendiri meneruskan perjalanannya dari Klaten ke Solo, dan ditempat inilah Iwa Kusuma Sumantri di tangkap.

Dengan adanya peristiwa 3 Juli 1946 ini, maka lengkaplah upaya pemerintah untuk menyingkirkan saingan-saingan politiknya. Namun demikian bukanlah berarti bahwa pemerintah dapat dengan tenang menjalankan program-programnya. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dianggap terlalu keras. Negara masih dalam keadaan darurat adalah wajar apabila semua pihak menginginkan yang terbaik untuk negaranya. Hanya saja kabinet Syahrir mempunyai kesempatan yang lebih baik karena berhasil menguasai pemerintahan. Dengan kata lain, Syahrir berhasil menanamkan pengaruhnya lebih kuat kepada Presiden dan wakil Presiden dari pada pihak saingannya. Banyak yang mengatakan bahwa Sukarno-Hatta bukanlah orang yang cocok untuk jabatan pemimpin negara.⁷⁸⁾ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sukarno-Hatta sendiri banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Namun demikian karisma

77) Iwa Kusuman Sumantri, Op.cit., hal. 144.

78) Di antara yang tiak menyukai Sukarno adalah Tan Malaka. Hal itu terbukti dengan adanya skandal surat wasiat, di mana Tan Malaka menginginkan kedudukan Sukarno.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73

Sukarno-Hatta tetap satu-satunya yang dapat meredakan gejolak yang ada. Meskipun banyak yang menyukainya, namun kedudukan sebagai Presiden telah mampu menimbulkan keseganan dan kesetiaan dari pihak-pihak lain, dalam hal ini lawan-lawan politiknya. Kesetiaan tersebut dapat terlihat dalam diri panglima Besar Sudirman misalnya. Meskipun Sudirman kurang cocok dengan perjuangan Sukarno-hatta yang mendukung Syahrir, namun Sudirman tidak dapat berbuat sesuatu karena segan serta kesetiannya mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Sudirman sebagai panglima besar merasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan anak buahnya, yaitu Sudarsono serta beberapa anggota Angkatan Bersenjata yang terlibat dan turut mendukung terjadinya peristiwa 3 Juli 1946. Sudirman berusaha memberikan pertolongan kepada para anggota Angkatan Bersenjata yang terlibat tersebut. Akan tetapi dapat dimengerti apabila Sudirman harus menghadapi sebuah dilema antara setia kepada pemerintah dan setia kepada tugasnya sebagai panglima besar yang harus melindungi anak buahnya. Untuk itulah, Sudirman mempertahankan kedudukannya, sebab kedudukannya dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan posisi. Dalam hal ini, Sudirman bertindak sebagai penengah di antara keduanya, sehingga dapat meredakan pertikaian yang ada.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

74

Kedudukan ini juga berguna dalam peristiwa 3 Juli. Insiden penculikan Syahrir, telah menimbulkan penangkapan terhadap pihak-pihak terlibat. Dengan kedudukannya, Sudirman dapat menyelamatkan Sudarsono dan A.K. Jusup dari penangkapan tersebut. Dengan pengaruhnya pula, akhirnya para tahanan politik itu dapat dibebaskan, meskipun untuk sementara waktu. Setelah peristiwa pengajuan petisi kepada presiden, Sudirman tidak dapat membebaskan anggota Angkatan Bersenjata yang terlibat, akan tetapi Sudirman dalam peristiwa tersebut tidak dapat memberikan sanksi kepada anggotanya, sehingga setelah bebas kemudian hari, mereka masih tetap dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada sebelum terjadinya peristiwa 3 Juli.

Meskipun pemerintah mengeluarkan tindakan yang keras pada para pelaku peristiwa 3 Juli pada khususnya, dan para tokoh oposisi pada umumnya, namun tindakan itu bukanlah tindakan yang dilaksanakan oleh negara yang sudah mempunyai pemerintahan yang stabil. Bagaimanapun juga, pemerintah yang berkuasa pada masa itu adalah pemerintahan sementara, sehingga tindakan maupun hukuman yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dicurigai telah menentang pemerintah juga sifatnya sementara. Tindakan keras dengan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik pihak oposisi dan pihak lain yang menentang, dilakukan hanya untuk mempertahankan kedudukan kabinet yang sedang

berkuasa.

Dari sinilah posisi presiden sebagai pimpinan negara yang harus dapat mendamaikan dan mencegah pertumpahan darah di wilayah negaranya dapat dilihat. Dalam peristiwa 3 Juli, mungkin presiden dapat mengadakan atau menyatakan hal itu sebagai sebuah kudeta, akan tetapi presiden tidak dapat mendendam terhadap para pelakunya, sebab mungkin suatu saat, presiden juga membutuhkan tokoh-tokoh tersebut dalam perjuangan-perjuangan selanjutnya. Hal itu terbukti ketika presiden akhirnya memberikan grasi, tidak hanya pada para pelaku peristiwa 3 Juli saja, akan tetapi juga tokoh-tokoh oposisi lain yang ditangkap pada razia bulan Maret 1946.

C. KEGAGALAN USAHA Mencari Pengaruh

Sudah diketahui akhirnya bahwa peristiwa 3 Juli yang dilaksanakan, juga dalam rangka mencari pengaruh dikalangan elite politik bangsa Indonesia untuk dapat menunjukkan keberadaan serta kemampuan untuk ikut serta menjalankan roda pemerintahan, menemui kegagalan. Ada banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi kegagalan ini. Di antaranya faktor pribadi yang dimiliki oleh para



pelaku.⁷⁹⁾ Faktor lain yang juga dapat dikatakan sebagai penyebab gagalnya peristiwa 3 Juli, adalah kurang mantabnya strategi yang digunakan. Disamping itu, kondisi dan situasi pada saat itu masih belum stabil dan dapat memperburuk keadaan.

Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabinet Syahrir II menimbulkan kekecewaan dibanyak pihak.⁸⁰⁾ Bagi tokoh-tokoh oposisi yang sudah tua, mungkin hal tersebut bukanlah masalah yang penting. Yang terpenting bagi mereka adalah memikirkan cara untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan 100% atas seluruh tanah airnya. Meskipun demikian, banyak pula pihak-pihak yang telah dirugikan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, mendendam kepada Syahrir. Dendam tersebut bukan ditujukan kepada presiden atau Syahrir, karena Syahrirlah yang menjadi otak atas semua kebijakan yang dikeluarkan. Dendam ini, umumnya dimiliki oleh para pemuda yang emosinya masih belum terkendali. Satu-satunya cara untuk menghentikan kesewenang-wenangan pemerintah Kabinet Syahrir II adalah dengan menyingkirkan Syahrir, bagaimanapun caranya. Menculik adalah satu-

79) Banyak tindakan dan kebijakan pemerintahan Kabinet Syahrir II yang memunculkan dendam pada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

80) Dapat dilihat bab III.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77

satunya cara untuk menjauhkan Syahrir dari posisinya. Inilah satu-satunya cara yang dianggap terbaik yang dapat dilaksanakan. Yang membuat lebih buruk adalah bahwa para tokoh-tokoh tua, khususnya dari pihak militer mengikuti kehendak pihak yang lebih muda. Hal ini terjadi karena pihak tua tersebut ingin mempertahankan martabat mereka sebagai orang-orang revolusioner sejati, ini terjadi pada Mayor Jenderal Sudarsono.

Masalah pribadi, baik karena dendam, maupun karena martabat seperti yang diuraikan di atas, membuat pelaksanaan penculikan dan juga pengajuan usul atau petisi tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, karena dengan adanya masalah pribadi, maka rencana yang akan disusun juga akan kurang matang. Rencana yang kurang matang inilah yang menyebabkan dengan mudah para pelaku diringkus oleh pemerintah.

Sejak mulainya insiden, yaitu dengan penculikan Syahrir, tidak semua yang terlibat mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal ini menyebabkan banyak terdapat hambatan pada saat pelaksanaan rencana. Salah satu contoh yang dapat dilihat dari kurangnya koordinasi dalam peristiwa tersebut adalah ketika polisi Surakarta yang menjaga keamanan di hotel tempat Syahrir dan rombongan menginap tidak mau bekerjasama dengan penculik karena

tidak adanya ijin dari pimpinan setempat.⁸²⁾ Meskipun akhirnya pimpinan setempat mau bekerjasama, akan tetapi hal itu telah memakan waktu dan menunjukkan kurang perhitungan dalam melaksanakan rencana.

Kurang matangnya rencana tersebut juga dapat dilihat ketika pada hari yang telah ditentukan untuk mengajukan petisi yang dibuat untuk ditandatangani presiden, telah mengalami kekacauan. Usaha untuk mengumpulkan laskar rakyat guna menunjukkan kemampuan dan kekuatan Angkatan Bersenjata yang dimiliki oleh Indonesia pada waktu itu gagal. Hal itu disebabkan karena terutama pihak-pihak yang diperintahkan untuk menggelar pasukan tidak tahu seberapa pentingnya masalah yang dihadapi.⁸³⁾ Disamping itu, kurangnya komunikasi di antara para pelaku juga telah memperburuk keadaan. Pada tanggal yang telah disepakati untuk mengajukan maklumat kepada presiden, seharusnya pihak pelaksana peristiwa tersebut mengamankan wilayah sekitar dan menjaga agar tidak terjadi kerusuhan. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pada saat yang hampir bersamaan, terdapat usaha untuk menculik Menteri pertahanan Amir Syarifuddin sehingga terjadi baku

82) Ibid., hal. 420.

83) Ketidaktahuan dari para anggota militer tersebut, juga menjadi alasan dari Jaksa Agung untuk menuntut para pelaku peristiwa telah mengadakan suatu usaha kudeta. (Lihat Moh.Yamin, Op.cit., hal. 133.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

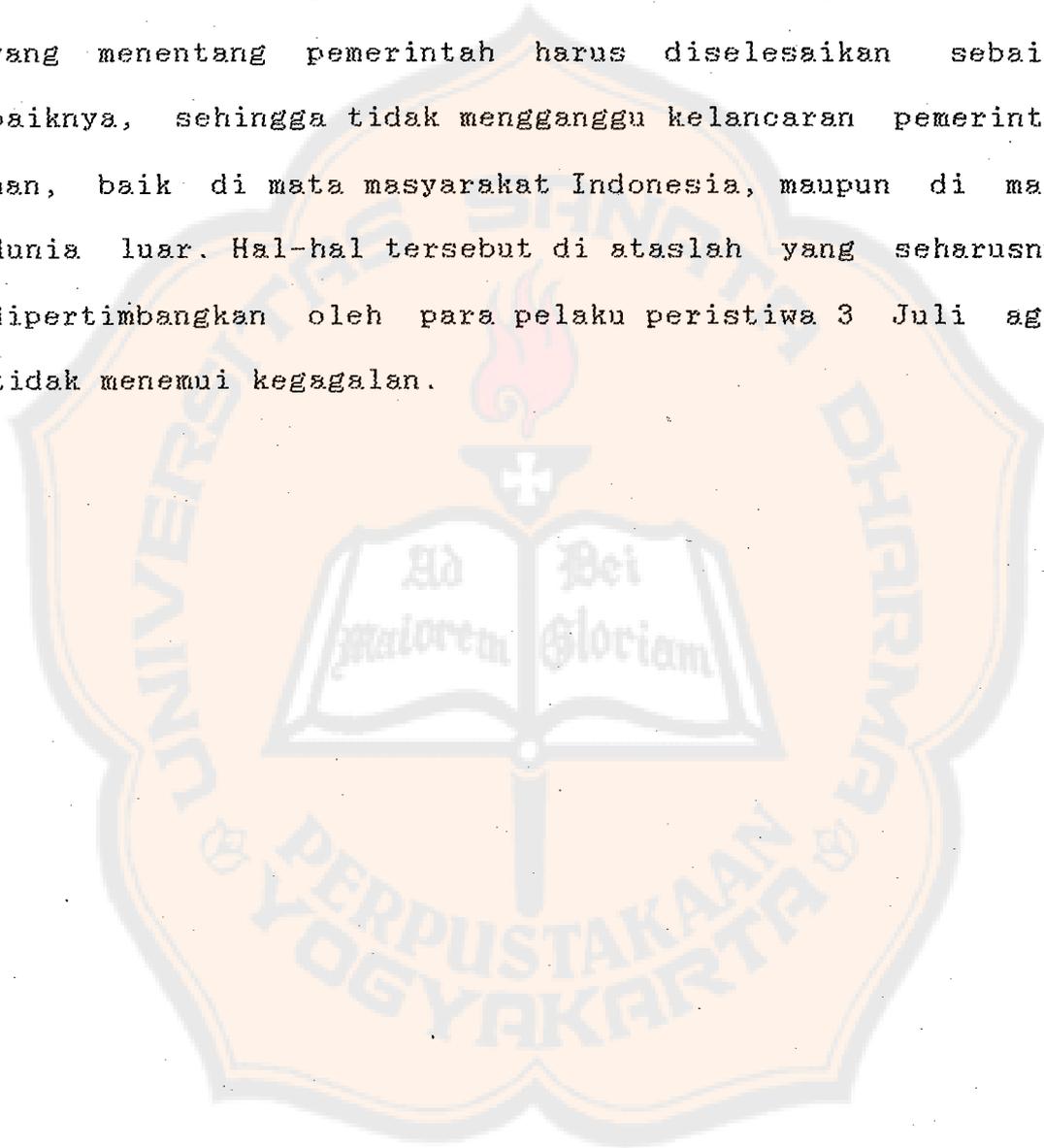
79

tembak yang kemudian telah membubarkan pasukan-pasukan yang telah berkumpul di alun-alun utara Yogyakarta.

Masalah lain yang juga kurang diperhitungkan adalah mengenai situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu, khususnya dalam masalah politik. Untuk dapat ikut serta dalam perjuangan politik bangsa Indonesia, para pemimpin oposisi telah menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintah. Mereka ditangkap karena dianggap telah menghambat proses perundingan yang akan dilaksanakan antara pemerintah Kabinet Syahrir dengan pemerintah Belanda. Penangkapan juga dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai telah terlibat dalam penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir di Solo. Apabila para pelaku peristiwa segera mengerti apa yang sedang terjadi, maka seharusnya pengajuan maklumat kepada presiden, ataupun usaha menculik Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin tidak dilaksanakan. Dengan melaksanakan hal itu, maka berarti bahwa para pelaku telah memberikan alasan kepada pemerintah untuk segera menangkap mereka.

Adalah hal yang dapat mencelakakan diri sendiri apabila pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah melakukan gerakan yang pada dasarnya mencoba untuk mengusik keberadaan pemerintah. Mungkin benar bahwa pemerintahan Kabinet Syahrir II tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Meskipun demikian, pemerintahan Kabinet Syahrir sah, sesuai dengan Maklumat

wakil presiden No. X, tahun 1945 yang menggantikan sistem pemerintahan presidential menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dengan alasan itulah maka segala tindakan yang menentang pemerintah harus diselesaikan sebaik-baiknya, sehingga tidak mengganggu kelancaran pemerintahan, baik di mata masyarakat Indonesia, maupun di mata dunia luar. Hal-hal tersebut di ataslah yang seharusnya dipertimbangkan oleh para pelaku peristiwa 3 Juli agar tidak menemui kegagalan.



BAB VII

PASCA PERISTIWA 3 JULI 1946

A. PENGADILAN OLEH PEMERINTAH

Pada awal tahun 1948, mulai disidangkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Peradilan tersebut dilaksanakan, bukan saja karena peristiwa tersebut dianggap sebagai suatu gerakan yang membahayakan bagi negara, tetapi juga dilakukan untuk mempertahankan prestise pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Benar tidaknya sebuah tindakan, apabila hal itu dianggap akan merugikan, atau lebih jauh akan membahayakan pemerintah, maka perlu diberantas. Hal ini telah menunjukkan betapa kakunya pemerintahan Indonesia pada waktu itu. "Pemerintahan Otoriter", mungkin istilah ini dapat menjelaskan situasi yang dialami oleh pihak oposisi pada waktu itu.

Sifat pemerintahan yang otoriter ini, dapat dilihat lebih lanjut pada masa pengadilan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa 3 Juli adalah sebuah peristiwa politik. Dalam peristiwa ini tidak ada tindak kekerasan yang akhirnya memakan korban jiwa. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pihak oposisi untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Revolusioner memang sudah menjadi sifat dari golongan ini. Akan tetapi sungguh tidak adil apabila sifat dari

golongan ini. Akan tetapi sungguh tidak adil apabila sifat yang revolusioner ini disamakan dengan sifat seorang penjahat. Namun sifat revolusioner dan evolusioner adalah sifat yang bertolak belakang. Perbedaan tersebut, bahkan telah memunculkan permusuhan di antara keduanya. Bahkan disertai usaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain, dengan segala macam alasan.

Golongan oposisi yang revolusioner telah berusaha untuk menjatuhkan pemerintah Kabinet Syahrir II yang evolusioner. Cara yang digunakan adalah dengan menyatakan bahwa pemerintahan Syahrir tidak cocok untuk Indonesia, karena tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntutan bersama, yaitu mendapatkan pengakuan kedaulatan 100% atas seluruh wilayah Indonesia. Mungkin cara yang mereka lakukan, yaitu dengan menculik Syahrir adalah salah. Akan tetapi kesalahan tersebut ternyata dianggap fatal oleh pemerintah, sehingga mengeluarkan tuduhan "percobaan untuk merobohkan pemerintahan yang sah".⁸⁴⁾

Dalam pengadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tokoh-tokoh pelaku Peristiwa 3 Juli 1946, pemerintah menyerahkan pengadilan tersebut kepada Mahkamah Tentara Agung. Adapun yang menjadi ketua Dewan Hakimnya adalah Dr. Mr. Kusumah Atmadja, yang juga menjabat sebagai

84) Tatang Sumarsono, Didi Kartasasmita : Pengabdian bagi Kemerdekaan. Jakarta : Pustaka Jaya, 1993, hal. 230.

ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sementara Jaksa penuntut umumnya adalah Mr. Tirtawinata yang saat itu juga menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengadilan yang bersangkutan dengan segi-segi militer ditangani oleh Didi Kartasasmita.

Adapun tuduhan telah memimpin percobaan untuk merobohkan pemerintahan yang sah, seperti telah dikemukakan di atas, diuraikan menjadi enam hal, yaitu :

1. Tujuh belas orang tertuduh telah melanggar Kitab Pidana dalam bahasa Belanda pasal 107, karena telah melakukan pangkal perbustan dengan maksud jahat dengan niat merubuhkan pemerintahan Republik Indonesia.
2. Tujuh belas orang tertuduh telah melanggar Kitab Pidana dalam bahasa Belanda pasal 107, karena telah menyediakan atau memudahkan kejahatan itu, dilakukan dengan berikhtiar akan mendapat atau mendapatkan kesempatan, daya upaya atau keterangan dengan niat merobohkan pemerintahan.
3. Enam orang tertuduh sepakat pada tanggal 29 Juni 1946 atau kira-kira pada masa itu, di rumah Baciro Jalan Gambir 15 (Yogyakarta) atau ditempat lain dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum dalam Bahasa Belanda pasal 107 dengan niat hendak menyediakan

atau memudahkan kejahatan itu dengan niat merobohkan pemerintahan dengan menyerahkan empat buah surat kepada panglima besar, supaya seluruh kekuasaan diserahkan kepada suatu pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu, sehingga menimbulkan perubahan dalam bangun dan susunan pemerintahan Republik Indonesia yang berlaku atas jalan yang bukan jalan yang ditentukan undang-undang pada masa itu.

4. Enam orang tertuduh pada tanggal 27 Juni 1946, atau kira-kira pada masa itu di rumah Baciro Jalan Gambir 15 Yogyakarta telah melanggar Kitab Pidana dalam Bahasa Belanda pasal 328 karena pada waktu itu dan di tempat itu telah menyebabkan Mayor A.K. Jusup melarikan Perdana Menteri Sutan Syahrir dari tempat kediamannya.
5. Enam orang tertuduh pada tanggal 27 Juni 1946, atau kira-kira pada masa itu di rumah Baciro Jalan Gambir 15 Yogyakarta telah melanggar Kitab Pidana dalam Bahasa Belanda pasal 333 karena pada waktu itu merampas kemerdekaan Perdana Menteri Sutan Syahrir.
6. Tujuh belas tertuduh bersama dan sepakat pada tanggal 2 dan 3 Juli 1946 telah melanggar Kitab Pidana dalam Bahasa Belanda Pasal 223 karena dengan sengaja melepaskan 15 orang tawanan politik dari

penjara dan memindahkan mereka ke Resimen Wiyoro.⁸⁵⁾ Enam tuduhan di atas, jelas telah menyebutkan bahwa para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 adalah para penjahat yang harus disingkirkan dan diadili sebagaimana mestinya.

Anggapan pemerintah terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 sebagai penjahat, tidak saja terlihat dari tuduhan yang dilontarkan pada masa persidangan, akan tetapi juga terlihat pada perilaku yang ditujukan kepada para tahanan politik selama masih dalam penjara. Para tertuduh diperlakukan dengan tidak selayaknya sebagai tawanan politik, melainkan juga sebagai seorang penjahat perang yang harus dijaga ketat dengan pengawasan yang keras, seperti dilukiskan oleh Iwa Kusuma Sumantri :

"..... sebagai seorang yang tidak bersenjata yang usianya lanjut dijaga dengan sangkur terhunus, bahkan jika beliau pergi ke kamar kecilpun, sangkur terhunus itupun selalu mengikutinya."⁸⁶⁾

Tidak hanya pengawasan dan penjagaan yang keras dan ketat yang diberikan kepada para tawanan politik tersebut. Ketidakpastian akan nasib mereka juga sangat dirasakan, terutama setelah lebih dari setengah tahun para tawanan politik yang terdiri dari 14 orang tersebut terombang-ambing dari satu penjara ke penjara lain, bahkan dengan

85) Mohammad Yamin, *Op.cit.*, hal. 15.

86) Iwa Kusuma Sumantri, *Op.cit.*, hal. 147.

ssangat tidak hormat seolah-olah seperti anak kucing yang tidak berdaya.⁸⁷⁾

Di samping sikap yang kurang menyenangkan tersebut, kebenaran tentang Peristiwa 3 Juli 1946 yang merupakan upaya mengajukan usul kepada pemerintah tersebut, disalah artikan. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya alasan dalam persidangan yang diungkapkan untuk memberikan hukuman kepada para terdakwa. Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Fakta-fakta yang dituduhkan juga berbelit-belit, sehingga terkesan seolah-olah dalam persidangan tersebut, kesalahan yang diajukan mengada-ada supaya terdakwa terlihat benar-benar seperti bersalah. Hal ini jelas bertujuan untuk memberatkan para terdakwa. Adapun tuntutan hukuman yang dijatuhkan terhadap tujuh hari tujuh belas terdakwa yang ada adalah berkisar antara dua sampai empat tahun. Ke tujuh orang yang mendapat hukuman tersebut adalah Sudarsono, Yamin, Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Budhyarto, Buntaran dan Moh. Saleh.⁸⁸⁾

B. PEMBELAAN

Sudah diketahui bahwa akhirnya tujuh tokoh dari ke tujuh belas pelaku Peristiwa 3 Juli 1946, mendapat hukuman masing-masing antara dua sampai empat tahun, yaitu :

87) Ibid., hal. 150.

88) Tatang Sumarso, Op.cit., hal. 229.

Sudarsono empat tahun, Yamin 3 tahun, Akhmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Budhyarto dan Moh. Saleh, masing-masing mendapat hukuman dua tahun, sementara Buntaran dibebaskan karena masa penahanannya telah melebihi dari ketentuan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Meskipun pengadilan itu sudah selesai, akan tetapi penulis di sini juga akan menyajikan usaha pembelaan dari para terdakwa.

Ada lima hal yang mendasari pembelaan yang dilakukan masing-masing terdakwa. Kelima hal tersebut adalah :

1. Cara pemeriksaan dalam persidangan, di mana Jaksa Agung bersikap kurang sopan dan menggunakan kata-kata yang keras sehingga menyinggung perasaan dari para terdakwa. Hal ini dianggap tidak pantas dilakukan di muka persidangan. Apalagi para terdakwa adalah tawanan politik yang telah melakukan kesalahan politik yang telah melakukan kesalahan politik dan bukan kesalahan sosial yang meresahkan masyarakat umum. Sikap Jaksa Agung itulah yang memunculkan protes keras dari para pembela.
2. Pemeriksaan yang kurang lengkap, karena tidak semua saksi yang diajukan diperiksa. Kecurigaan bahwa Mahkamah Agung tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut bukan dengan alasan kepentingan keadilan, melainkan takut akan menyulitkan saksi-saksi yang bersangkutan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh anggota mahkamah dan

mungkin oleh terdakwa sendiri.

3. Para terdakwa mempunyai hak untuk menafsirkan peristiwa yang berlangsung, akan tetapi Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat putusan yang memuat alasan-alasan tentang peristiwa 3 Juli, di mana dalam alasan tentang Peristiwa 3 Juli 1946, di mana dalam fakta-fakta yang ada, serta berbelit-belit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam persidangan tersebut, alasan dan fakta yang diajukan untuk penuntutan terkesan mengada-ada.
4. Adanya perbedaan pendirian dari kedua belah pihak tentang akibat proklamasi kemerdekaan, Moh. Yamin mengatakan bahwa proklamasi adalah piranti hukum untuk menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah memegang kekuasaan de jure di seluruh tanah air dan bangsa dan akan menyempurnakan kedaulatan de facto dengan perjuangan dan perbuatan yang nyata sebagai akibat dari pernyataan kemerdekaan itu. Sementara itu, Mahkamah Tentara Agung beranggapan bahwa proklamasi adalah hasrat rakyat Indonesia untuk mendirikan negara yang belum terwujud pada waktu itu. Anggapan ini secara tidak langsung telah membenarkan Kabinet Syahrir yang bermaksud menerima kedaulatan hanya atas wilayah Jawa dan Sumatera saja. Dari perbedaan pendirian ini, maka adalah sudah menjadi hak para terdakwa untuk meyakini pendiriannya, serta berusaha

mewujudkan harapannya. Hak tersebut seharusnya diakui karena pendirian mereka bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

5. Para terdakwa tidak dapat mengajukan banding kepada Mahkamah yang lebih tinggi, karena setelah Mahkamah Tentara Aung, tidak ada lagi mahkamah di atasnya. Dari sini, maka satu-satunya yang dapat meringankan adalah pembelaan dari para terdakwa sendiri.

Dengan dasar kelima hal tersebut di atas, maka disusunlah pembelaan oleh Moh. Yamin, dan ditulis dalam buku berjudul Sapta Darma. Buku tersebut secara harus besar dapat diuraikan sebagai usaha untuk menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya peristiwa Peristiwa 3 Juli 1946, bagaimana keberadaan pemerintah yang sedang berkuasa, serta bagaimana jalan yang harus ditempuh oleh negara Indonesia yang masih muda tersebut.

Pembelaan mengenai Indonesia muda yang baru saja merdeka dan membutuhkan pimpinan-pimpinan tangguh untuk mengatur dan memberi arah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam pembelaan ini, dikemukakan tentang arti penting proklamasi adalah awal mula dari revolusi Indonesia. Proklamasi ini sangat berharga, lebih dari hanya sekedar hasrat perjuangan bangsa. Proklamasi adalah sumber hukum, dan dari proklamasi inilah dibentuk suatu kedaulatan rakyat yang sadar akan bangsanya yang telah merdeka. Kesadaran itu mempunyai arti bahwa bangsa dan

rakyat Indonesia telah memegang kekuasaan de jure atas seluruh tanah air Indonesia. Untuk mendapatkan kekuasaan secara de facto yaitu dengan pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh dari negara-negara lain, maka rakyat Indonesia harus berjuang, kalau perlu dengan mengorbankan nyawa. Pendirian inilah yang dikatakan harus diakui sebagai pendirian nasional, yaitu dengan adanya proklamasi, maka negara-negara lain harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Pendirian yang semacam itulah yang menjadi dasar bagi kaum revolusioner⁸⁹⁾ untuk menentang segala hal yang dianggap merugikan atau bahkan membahayakan keselamatan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah Kabinet Syahrir tidak mampu memegang pendirian nasional yang dimiliki oleh kaum revolusioner. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah Kabinet Syahrir tidak menyadari bahwa bangsa Indonesia telah memegang kekuasaan de jure atas seluruh tanah air dan bangsanya. Pada dasarnya, inilah yang telah menjadi sumber pertentangan antara Kabinet Syahrir dengan kaum revolusioner. Kaum revolusioner merasa bahwa proklamasi kemerdekaan telah membentuk sebuah negara atas seluruh nusantara. Sementara itu, Syahrir merasa bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam hal ini, Syahrir beranggapan bahwa meskipun sudah mencapai puncak perjuangan, akan tetapi

89) Moh. Yamin, Op.cit., hal. 27.

Indonesia belumlah mempunyai wilayah yang pasti. Untuk mendapatkannya haruslah dengan melalui perjuangan diplomasi untuk menentukan batas-batas wilayah Indonesia.

Pembelaan lain yang telah membuat kaum revolusioner melakukan tindakan-tindakan menentang pemerintah adalah menyangkut keberadaan pemerintahan itu sendiri. Dipandang dari segi Undang-Undang yang dibuat. Negara dan politik bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan konstitusi yang telah disusun tahun 1945, yaitu UUD 1945, yang menghendaki sistem kabinet presidential, dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan atas pemerintahan. Sedangkan dalam pemerintahan pada tahun itu (1946), yang praktis juga adalah pemerintahan Kabinet Syahrir, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem kabinet parlementer yang mengangkat perdana menteri dan menteri-menteri muda disamping menteri-menteri yang ada.

Dengan alasan bahwa pemerintahan Kabinet Syahrir tidak konstitusional itulah, maka dalam Peristiwa 3 Juli 1946, pihak pelaku mencoba mengusulkan pembentukan kabinet yang lebih konstitusional. Dua pembelaan yang menyangkut keberadaan pemerintah Kabinet Syahrir dan perbedaan pendirian tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, diajukan untuk memperkuat alasan mengapa terjadi Peristiwa 3 Juli 1946.

Dengan dua pembelaan tersebut di atas, maka jelas bahwa para pelaku peristiwa tersebut menginginkan pemerintah menyadari keberadaannya dan tidak semena-mena

dalam menghadapi pihak oposisi, sebab bagaimanapun, oposisi itu penting untuk memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik.

Adapun pembelaan tentang apa itu sebenarnya Peristiwa 3 Juli 1946, para pelaku dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa itu bukanlah suatu usaha coup d'etat. Peristiwa tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai suatu usaha coup d'etat apabila dilaksanakan pada situasi yang damai dan tidak ada pertentangan. Akan tetapi peristiwa tersebut terjadi pada saat yang luar biasa, yaitu pada saat negara dalam keadaan negara dalam keadaan darurat dan sedang banyak menerima tekanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Peristiwa 3 Juli 1946 hanyalah suatu moment dalam keadaan darurat, di bawah perlindungan negara darurat.⁹⁰⁾ Dalam keadaan yang seperti itu, maka dalam mengajukan sebuah petisi tidaklah diperlukan syarat-syarat seperti yang dikemukakan sebagai berikut oleh Jaksa Agung :

1. Semua yang ikut mesti tahu yang akan dimohonkan.
2. Permohonan mesti diadakan sebagai permohonan.
3. Diajukan dalam waktu yang pantas dan secara pantas.

Dari sini, jelas dapat dilihat bagaimana sebenarnya kemsuan dari kaum oposisi yang revolusioner tersebut. Mereka tidak bermaksud melakukan kudeta, melainkan hanya meluruskan apa yang dianggap telah menyimpang dari

90) Ibid., hal. 133.

konsitusi, maupun janji proklamasi kemerdekaan. Peristiwa tersebut terjadi, karena dianggap negara dalam keadaan bahaya dan darurat. Anggapan bahwa yang telah terjadi itu suatu tindakan pemberontakan, merupakan landasan dalam pembelaan ini.

C. GRASI PRESIDEN

Pada tanggal 17 Agustus 1948, Presiden Sukarno memberikan grasi dan tahanan-tahanan politik. Di antara tahanan-tahanan politik yang mendapatkan grasi tersebut adalah para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946. Grasi presiden untuk para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut dituliskan dalam surat Keputusan Presiden No. 69/A.Civ/48. Adapun dalam surat keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para tersangka dikurangi sedemikian rupa sehingga pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1948, dibebaskan karena telah habis masa hukumannya.⁹¹⁾

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan pengurangan hukuman terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut adalah :

1. Dalam negara hukum yang demokratis, tiap-tiap warga merdeka dalam menjalankan pikirannya dan mengejar terlaksananya cita-cita politiknya, akan tetapi dalam batas-batas peraturan negara.

⁹¹⁾ Tentang Surat Keputusan Presiden No.69/A.Civ./48 tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

2. Barang siapa dalam melaksanakan cita-citanya melanggar hukum, harus dituntut di muka pengadilan, kecuali jika penuntutan tersebut benar-benar akan bertentangan dengan kepentingan negara.
3. Penuntutan di muka hakim harus diselesaikan dengan putusan peradilan, agar terang buat masyarakat seluruhnya bahwa perbuatan yang dituntut itu benar-benar melanggar hukum.
4. Dengan putusan Mahkamah Tentara Agung tersebut, pengadilan telah menyatakan bahwa perbuatan para terhukum itu benar-benar telah melanggar hukum, sehingga buat pemerintah, maksud penuntutan di muka hakim telah tercapai.
5. Pemerintahpun yakin bahwa para terhukum selanjutnya akan dapat menyesuaikan dirinya dengan putusan hakim tersebut dengan arti selanjutnya akan memperhatikan batas-batas peraturan negara di dalam melaksanakan cita-cita politiknya.
6. Perjuangan bangsa dan negara Indonesia akan diperkuat, karena mendapat bantuan yang berharga, apabila para terhukum segera mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam perjuangan tersebut.
7. Oleh karena itu, adalah menjadi kepentingan negara untuk selekasnya mengembalikan para terhukum ke tengah-tengah masyarakat.⁹²⁾

92) Tatang Sumarsono, *Op.cit.*, hal. 230

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

95

Dengan adanya keringanan hukuman tersebut, maka putusan menyatakan bahwa para pelaku peristiwa tersebut memimpin percobaan untuk merobohkan pemerintahan yang sah menjadi tidak berlaku lagi. Peristiwa tersebut, selanjutnya hanya menjadi sebuah peristiwa sejarah biasa yang telah dilupakan oleh banyak orang. Kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para pelaku peristiwa 3 Juli ini tidak lagi menjadi sebuah kesalahan yang fatal yang dapat menghambat perjalanan hidup mereka di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan presiden kepada mereka untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam proses perjuangan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan alasan politik bahwa diperlukan tenaga dan pikirannya tersebut, maka para terdakwa dapat terbebas dari pengasingan politik.

Dalam upaya pengembalian para hukuman politik tersebut ke tengah-tengah masyarakat, maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk turut serta dalam perjalanan politik bangsa Indonesia selanjutnya. Moh. Yamin tidak lama setelah keluar dari penjara, mendapat kepercayaan untuk ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Selain Moh. Yamin, Iwa Kusuma Sumantri maupun Akhmad Subardjo juga mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, bahkan berkali-kali diangkat menjadi menteri pada periode-periode

berikutnya.⁹³⁾

Pembelaan yang diajukan yang sebagian besar berisi tentang kritikan terhadap jalannya pemerintahan, rupanya tidak sia-sia. Hal ini terbukti bahwa pada masa-masa seterusnya, pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, proses perundingan hanya dijalankan dengan maksud memperoleh kekuasaan secara de facto atas seluruh Indonesia.

93) Iwa Kusuma Sumantri, *Op.cit.*, hal. 155.

BAB VIII

K E S I M P U L A N

Peristiwa 3 Juli 1946 memunculkan polemik di kalangan sejarawan. Hal itu terbukti dengan munculnya buku-buku yang dalam pembahasan tentang peristiwa ini, berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan mungkin juga bertentangan. Di satu pihak dikatakan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah gerakan yang didalangi oleh Tan Malaka dan Persatuan Perjuangannya. Di pihak lain, dikatakan bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan militer. Yang menjadi masalah selanjutnya bukan lagi tentang siapa pelaku peristiwa, melainkan apa itu Peristiwa 3 Juli 1946. Para tokoh yang terlibat menyatakan, bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 hanyalah suatu usaha untuk mengajukan petisi. Sementara itu, pemerintah pada waktu itu menyatakan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 adalah suatu kudeta.

Dengan mengesampingkan penjelasan yang sudah ada mengenai siapa pelaku dan apa itu peristiwa 3 Juli yang sebenarnya, penulis mencoba untuk mengemukakan sebuah pendapat atau pemikiran baru mengenai apa dan siapa pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut. Setelah membuat sebuah penulisan dan dengan membaca beberapa buah sumber, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peristiwa 3 Juli bukanlah sebuah kudeta dari militer ataupun dari persatuan perjuangan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

98

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah reaksi spontan dari pihak-pihak yang tidak menyetujui usaha perundingan dengan pemerintah Belanda, yang akan menghasilkan pengakuan kedaulatan hanya atas Jawa dan Sumatera saja. Reaksi spontan ini bukanlah suatu kudeta, karena tidak dipersiapkan untuk merebut kekuasaan dengan paksa dan dengan cara kekerasan. Untuk melakukan kudeta tentulah memerlukan perencanaan jauh sebelumnya, sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dalam peristiwa ini, waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan penangkapan terhadap Syahrir hanya satu hari satu malam saja. Hal tersebut adalah tidak mungkin, mengingat Syahrir, meskipun banyak mempunyai musuh, tetapi kedudukannya sebagai perdana menteri akan dapat mempersulit sebuah usaha penangkapan atau bahkan penculikan, karena seorang perdana menteri tentu akan mendapat pengawalan yang ketat, tidak hanya dari pihak tentara, tetapi juga dari para pengikutnya.

Rupanya pemerintah lebih pandai membakar emosi kaum oposisi, sehingga meskipun di kemudian hari Syahrir telah terbebas, pemerintah masih berupaya untuk memperpanjang masalah dengan mengadakan tindakan-tindakan balasan. Setelah Syahrir terbebas, pemerintah mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap turut terlibat. Sudah dapat diduga, bahwa penangkapan-penangkapan itu memunculkan amarah dari pihak oposisi. Dengan mendapat dukungan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

99

maka tokoh-tokoh yang tersisa dan yang telah dibebaskan atas perintah panglima Besar Sudirman, membuat sebuah konsep maklumat, yang isinya menghendaki agar kabinet Syahrir II diganti dengan kabinet presidentil. Dalam konsep kabinet yang diajukan kepada presiden tersebut, tokoh-tokoh oposisi yang terkenal seperti Tan Malaka mendapatkan kedudukan penting, sehingga membuat pemerintah menjadi curiga bahwa Tan Malaka yang masih dalam tahanan ikut terlibat. Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan, bahwa apabila nama Tan Malaka ikut tercantum, bukan berarti bahwa Tan Malaka ikut tercantum, bukan berarti bahwa Tan Malaka dapat dipastikan ikut terlibat, mungkin nama itu tercantum hanya karena kebetulan saja, atau karena Tan Malaka dianggap sebagai satu-satunya orang yang dianggap dapat menggantikan kedudukan Syahrir, atau mungkin pula hal itu hanya merupakan sebuah ungkapan dari kesetiaan para pengikutnya saja. Banyak kemungkinan yang perlu dijelaskan dalam hal ini. Kemungkinan bahwa Tan Malaka sendiri sebenarnya tidak tahu menahu tentang adanya peristiwa tersebut bisa jadi benar. Terlepas dari hal itu, maklumat-maklumat yang diajukan kepada presiden tertanggal 3 Juli 1946 tersebut, adalah upaya untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang dari kelompok Syahrir yang dirasa sudah sangat merugikan, tidak hanya bagi pihak oposisi, melainkan juga bagi bangsa dan negara Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

100



Tentang siapa pelaku peristiwa tersebut, memang sulit untuk dijelaskan. Sebagian dari pelaku peristiwa tersebut adalah anggota Angkatan Bersenjata, dan sebagian lagi adalah tokoh-tokoh sipil yang reaksioner. Apabila dikatakan bahwa gerakan itu adalah gerakan dari militer, tidak dapat dibuktikan adanya konfrontasi langsung antara militer dengan pemerintah. Disamping itu, tidak ditemui juga kegiatan-kegiatan militer yang serius selama peristiwa tersebut terjadi. Di sisi lain, apabila peristiwa tersebut dikatakan dilakukan oleh persatuan perjuangan, sulit untuk dibuktikan apakah para pelaku melakukan tindakan itu dengan mengatasnamakan Persatuan perjuangan atau karena inisiatif mereka sendiri sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Diketahui bahwa memang Angkatan Bersenjata bersimpati kepada program minimum dari persatuan perjuangan, dan memberikan dukungan terhadapnya. Namun demikian, masih perlu dipertanyakan keanggotaan Angkatan Bersenjata dalam organisasi persatuan perjuangan itu. Satu hal yang jelas dapat diungkapkan di sini adalah, peristiwa itu dilakukan oleh pendukung perjuangan kemerdekaan 100%. Mungkin benar bahwa perjuangan kemerdekaan 100% adalah salah satu isi dari program minimum persatuan perjuangan. Akan tetapi, perlu bahwa semua pihak yang merasa warga negara Indonesia menghendaki kemerdekaan 100%, bahkan Syahrir sendiri, mungkinjuga mempunyai keinginan yang sama. Adalah tidak adil untuk mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan 100%,

adalah perjuangan milik persatuan perjuangan saja.

Banyak terdapat ketidakjelasan dari apa dan siapa pelaku peristiwa 3 Juli 1946. Hal ini berarti sulit untuk mengatakan bahwa pihak oposisilah yang harus dipersalahkan dalam peristiwa tersebut. Tidak ditemukan adanya bukti yang memberatkan dalam peristiwa itu, kecuali tuduhan-tuduhan dari pihak pemerintahan Syahrir.

Terdapatnya sebuah kejanggalan dalam peristiwa itu, dimana pihak pemerintah, dalam hal ini kelompok Syahrir, berusaha memaksakan pendapatnya bahwa apa yang sedang terjadi adalah sebuah kudeta dari pihak oposisi. Dengan kejanggalan ini, maka penulis mengemukakan sebuah analisa baru yang bersangkutan dengan peristiwa 3 Juli 1946, yaitu bahwa apa yang sedang terjadi itu, atau istilah kudeta yang diberikan kepada kelompok yang berusaha untuk menemui dan mengajukan kepada presiden itu, sebenarnya adalah rekayasa politik dari kelompok Syahrir sendiri untuk menjatuhkan dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat perjuangan Syahrir (seperti yang tertera dalam pamflet Perjuangan Kita), sangat menentang orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang dan menganggap mereka sebagai pengkhianat bangsa yang harus disingkirkan. Dalam perjalanannya, hal itu rupanya tidak saja berlaku pada para kolaborator Jepang yang sebenarnya, tetapi juga pada orang-orang yang dianggap akan menentang dan menghambat perjuangan Syahrir.

Dari sini, penulis mencoba untuk menegaskan bahwa Peristiwa 3 Juli 1946 bukanlah sebuah kudeta. Peristiwa itu adalah suatu usaha yang wajar dari pihak yang tersingkir untuk mendapatkan pengaruh, dalam hal ini pengaruh terhadap presiden. Apabila kemudian usaha mencari pengaruh tersebut oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kelompok Syahrir dikatakan sebagai sebuah kudeta, maka hal ini dilakukan untuk mensahkan penangkapan-penangkapan dalam rangka menyingkirkan pihak-pihak yang menentang dan menghambat Syahrir dalam melaksanakan perundingan dengan Belanda.

Adalah suatu hal yang wajar dalam perjalanan politik sebuah bangsa, apabila pihak yang satu merekayasa suatu peristiwa untuk menjatuhkan pihak yang lain. Hal ini tidak saja terjadi pada negara-negara yang baru saja merdeka saja, tetapi juga pada negara-negara di seluruh dunia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Loebis
1991 Kilas Balik Revolusi : Kenangan Pelaku dan Peristiwa. Jakarta : UI Press.
- Anderson, B.R.O.G
1972 Java in A Time of Revolution, Itacha and London : Cornell usp.
- Anderson, Ben
1988 Revolusi Pemoeda. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Musyawarah Musea D.I.Y.
1985 Yogya Benteng Proklamasi. Jakarta : Gramedia.
- Wild, Colin dan Peter Carey
1986 Gelora Api Revolusi. Jakarta : Gramedia.
- Fischer, Louis
1959 The Story of Indonesia. New York : Harper and Brother.
- Feith, Herbert dan Lance Castales, ed.
1970 Pemikiran Politik Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Iwa Kusuma Sumantri
1963 Sejarah Revolusi Indonesia. (Jilid 2) Jakarta : tanpa penerbit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jahja A. Muhaimin
1971 Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1946. Yogyakarta : Seri penerbitan Skripsi terbaik UGM.
- Yahya A. Muhaimin
1982 Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1946. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Janowitz, Morris
1985 Hubungan-hubungan Sipil Militer. Jakarta : Bima Aksara.
- Kahin, George Mc Turnan
1970 Nationalism and Revolution in Indonesia. Itacha and London : Cornell Up.
- Mohammad Yamin
1957 Sapta Darma. Bukittinggi-Jakarta-Medan: N.V.Nusantara.
- Nasution A.H.
1966 Sejarah Perjuangan di Bidang Bersenjata. Jakarta : Mega Bookstore.
- Nasution A.H.
1963 Tentara Nasional Indonesia. (Jilid I) Bandung-Jakarta : Ganaco.
- Nordlinger, Eric A.
1990 Militer dalam Politik. Jakarta : Rineka Cipta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Oesman Raliaby

1953 Documenta Historica. Jakarta : Bulan
Bintang.

Poerwadarminta, W.J.S.

1984 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta :
Balai Pustaka.

Prisma, "Manusia Dalam Kemelut Sejarah". Prisma Edisi No.
8, Agustus, tahun ke VI.

Prisma, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia". Jakarta :
1990 Penerbit Prisma

Purnawan Tjondronegoro

1991 Merdeka tanahku Merdeka Negeriku.
Bandung : C.V. Harya Dyuta.

Rose, Movis

1991 Indonesia Merdeka : Biografi Mohammad
Hatta. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka
Utama.

Samawi

1970 25 Tahun Indonesia Merdeka Jogjakarta :
Badan Penerbit Kedaultan Rakyat.

Simatupang, T.B.

1987 Dari Revolusi ke Pembangunan. Jakarta :
Gunung Mulia.

Soebadio Sastrosatomo

1987 Perjuangan Revolusi. Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sundhausen, Ulf

1986

Politik Militer Indonesia 1945-1967.

Jakarta : LP3ES.

Suwarno, P.J.

1990

Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi

Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974.

Yogyakarta Kanisius.

Susanto Tirtoprodjo

1963

Sejarah Revolusi Nasional Indonesia

Jakarta : P.T. Pembangunan.

Tatang Sumarsono

1993

Didi Kartasasmita : Pengabdian bagi

Kemerdekaan. Jakarta : Pustaka Jaya.

Todiruan Dydo

1990

Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan

Sesudah G. 30 S/PKI. Jakarta : P.T.

Golden Press.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X

KOMITE NASIONAL PUSAT

Pemberian kekuasaan legislatif
kepada Komite Nasional Pusat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerjaan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

MENIMBANG bahwa selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan Badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah ;

MENIMBANG selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat ;

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

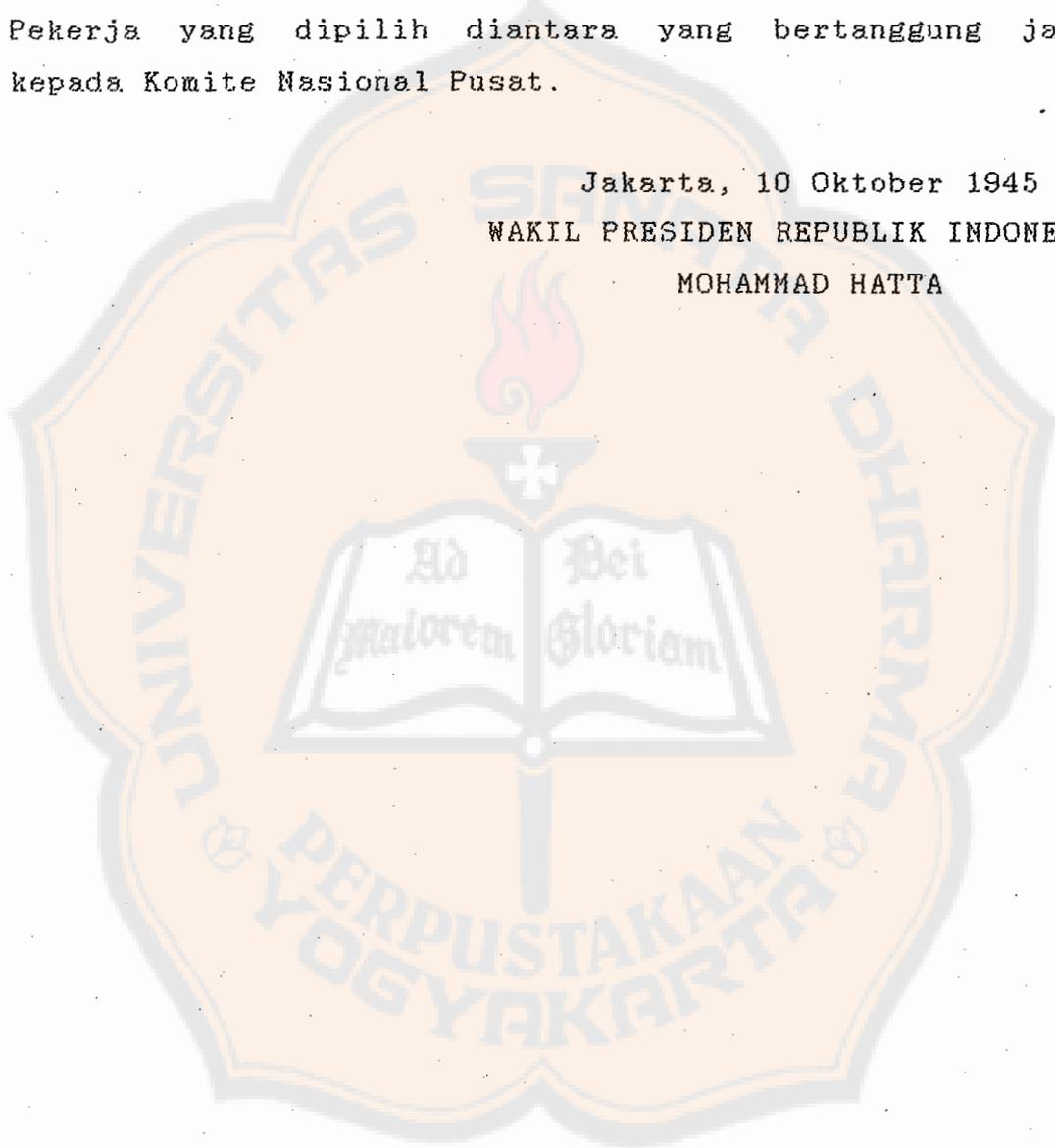
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 10 Oktober 1945

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD HATTA



Dikutip dari Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta : P.T. Pembangunan, 1963.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MAKLUMAT PRESIDEN NO. 1. Th. '46

Berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946 mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu sampai kembalinya keadaan biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya.

Jogjakarta, Jam 1 malam, 29-6-1946

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Dikutip dari Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, edisi tanggal 30 Juni 1946.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PETISI MAKLUMAT DALAM PERISTIWA 3 JULI 1946

Empat petisi maklumat yang diajukan adalah sebagai kelanjutan dari maklumat yang telah dikeluarkan oleh Presiden No. 1, tahun 1946. Keempat petisi maklumat tersebut adalah :

MAKLUMAT No. 2

Atas desakan rakyat dan Tentara dalam tingkatan kedua Revolusi Indonesia, yang berjuang untuk membela seluruh Rakyat dan seluruh kepulauan di bawah kedsulatan Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus persen, maka kami Presiden Republik Indonesia pada hari ini memberhentikan seluruh Kementrian Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin.

Jogjakarta, 3 Juli 1946

Presiden Republik Indonesia

MAKLUMAT NO. 3

Atas desakan Rakyat dan Tentara dalam tingkatan kedua Revolusi Indonesia, yang berjuang untuk membela seluruh rakyat dan seluruh kepulauan Indonesia dibawah kedsulatan Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus persen dan berhubung dengan seluruh rakyat dan seluruh kepulauan dalam bahaya perang. Maka kami Presiden Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan rakyat yang ditangan kami yang berkenaan dengan pembelaan dan pengawasan Negara kepada Panglima Besar Angkatan Laut dan Udara bersama-sama markasnya, yang berkenaan dengan pimpinan politik, sosial dan Ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.

Jogjakarta, 3 Juli 1946

Presiden Republik Indonesia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MAKLUMAT No. 4

Untuk memenuhi maklumat No. 3 tanggal 3 Juli 1946, maka kami Presiden Republik Indonesia, mengangkat bersama ini sepuluh orang anggota Dewan Pimpinan Politik :

Saudara-saudara :

1. Buntaran Martoatmodjo
2. Budhyarto Martoatmodjo
3. Chaerul Saleh
4. Gatot
5. Iwa Kusuma Sumantri
6. Mohammad Yamin
7. Subardjo
8. Sunarjo
9. Tan Malaka
10. Wahid Hajim

Jogjsakarta, 3 Juli 1946

Presiden Republik Indonesia

MAKLUMAT No. 5

Untuk memenuhi maklumat No. 2 dan No. 3 tanggal 3 Juli 1946 maka kami Presiden Republik Indonesia mengangkat bersama ini anggota Kementrian Negara :

Menteri Dalam Negeri	Budhyarto
Menteri Luar Negeri	Subardjo
Menteri Pertahanan	akan disiarkan
Menteri Kahakiman.....	Supomo
Menteri Kemakmuran	Tan Malaka
Menteri Agama	Wahid Hasjim
Menteri Sosial	Iwa Kusuma sumantri
Menteri Bangunan Umum.....	Abikusumo Tjokrosujoso
Menteri Keuangan	A.A. Maramis
Menteri Kesehatan	Buntaran Martoatmodjo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menteri Pengajaran..... Ki Hajar Dewantara
Menteri Penerangan dan Penyiaran.. Mohammad Yamin
Menteri Perhubungan..... Rooseno

Menteri Negara :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Chaerul | 7. Sunaryo |
| 2. Faturrachman | 8. Sartono |
| 3. Gatot | 9. Samsu H. Udaya |
| 4. Kartono | 10. Sukarni Kartodiwiryo |
| 5. Pasty | 11. Djody |
| 6. Sukiman | 12. Moh. Saleh |

Jogjakarta, 3 Juli 1946

Presiden Republik Indonesia

Dikutip dari Mohammad Yamin, Sapta Darma. Bukittinggi
Jakarta-Medan : N.V. Nusantara, 1957.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 69/A.CIV/48

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca putusan Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta tanggal 27-5-1948 No. 4/1947, M.T.A. yang antara lain memutuskan :

"Mempersalahkan terdakwa"

I. R.P. Sudarsono, dan

II. Mr. Mohammad Yamin

melakukan kejahatan :

"memimpin percobaan untuk merobohkan pemerintah yang sah"

III. Mr. Achmad Soebardjo

IV. Mr. Raden Iwa Koesoema Soemantri

V. Mr. Raden Soedoro Boedyarto Martostmodjo

VI. Dr. Raden Boentaran Martostmodjo, dan

VII. Raden Mohammad Saleh

melakukan kejahatan :

"percobaan untuk merobohkan pemerintahan yang sah"

Menghukum mereka oleh karenanya menjalani hukuman tutupan untuk lamanya :

Terdakwa I R.P. Soedarso : empat tahun

Terdakwa II Mr. Mohammad Yamin : empat tahun

Terdakwa III Mr. Achmad Soebardjo : tiga tahun

Terdakwa IV Mr. Iwa Koesoema Soemantri : tiga tahun

Terdakwa V Mr. R. Soedoro Boedyarto Martostmodjo :

dua tahun enam bulan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Terdakwa VI Dr. Boentaran Martoatmodjo : dua tahun

Terdakwa VII R. Mohammad Saleh : dua tahun enam bulan.

dengan penetapan, bahwa semua hukuman itu akan dikurangi dengan tempo selama para terhukum berada di dalam tahanan.

Menimbang :

- a. Dalam Negara Hukum yang demokratis tiap-tiap warga negara merdeka dalam menyatakan pikirannya dan mengejar terlaksananya cita-cita politiknya, akan tetapi dalam batas-batas peraturan negara.
- b. Barang siapa dalam melaksanakan cita-citanya melanggar hukum, harus dituntut di muka Pengadilan, kecuali jika penuntutan itu benar-benar akan bertentangan dengan kepentingan negara.
- c. Penuntutan di Muka hakim harus diselesaikan dengan putusan pengadilan, agar terang buat masyarakat seluruhnya, bahwa perbuatan yang dituntut itu benar merupakan pelanggaran hukum.
- d. Dengan putusan Mahkamah Tentara Agung tersebut, pengadilan telah menyatakan bahwa perbuatan para terhukum itu benar merupakan pelanggaran hukum, sehingga buat Pemerintah maksud penuntutan di muka Hakim telah tercapai.
- e. Pemerintahpun yakin, bahwa para terhukum selanjutnya akan dapat menyesuaikan dirinya dengan putusan Hakim tersebut dengan arti selanjutnya akan memperhatikan batas-batas peraturan-peraturan Negara di dalam melaksanakan cita-cita politiknya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f. Perjuangan Negara Bangsa Indonesia akan diperkuat, karena mendapat bantuan yang berharga, apabila para terhukum segera dapat mencurahkan tenaga dan fikirannya di dalam perjuangan tersebut.

g. Oleh karena itu, adalah menjadi kepentingan Negara untuk selekasnya mengembalikan para terhukum ke tengah masyarakat.

Menimbang selanjutnya, bahwa semua pertimbangan di atas berlaku juga bagi terhukum Dr. R. Boentaran Martoatmodjo, akan tetapi kepadanya tidak lagi mungkin diberikan grasi, karena ia telah habis menjalani hukumannya.

Mengingat pasal 14 Undang-Undang Dasar.

MEMUTUSKAN

Memberi grasi kepada para terhukum :

- I. R.P. Sodarsono
- II. Mr. Mohammad Yamin
- III. Mr. Achmad Soebardjo
- IV. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
- V. Mr. R. Soendro Boedyarto Martoatmodjo dan
- VI. R. Mohammad Saleh.

dengan mengurangi jumlah lamanya masing-masing sedemikian rupa, sehingga mereka pada hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1948 dimerdekakan karena telah habis dijalani hukumannya masing-masing.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ditetapkan di Yogyakarta pada

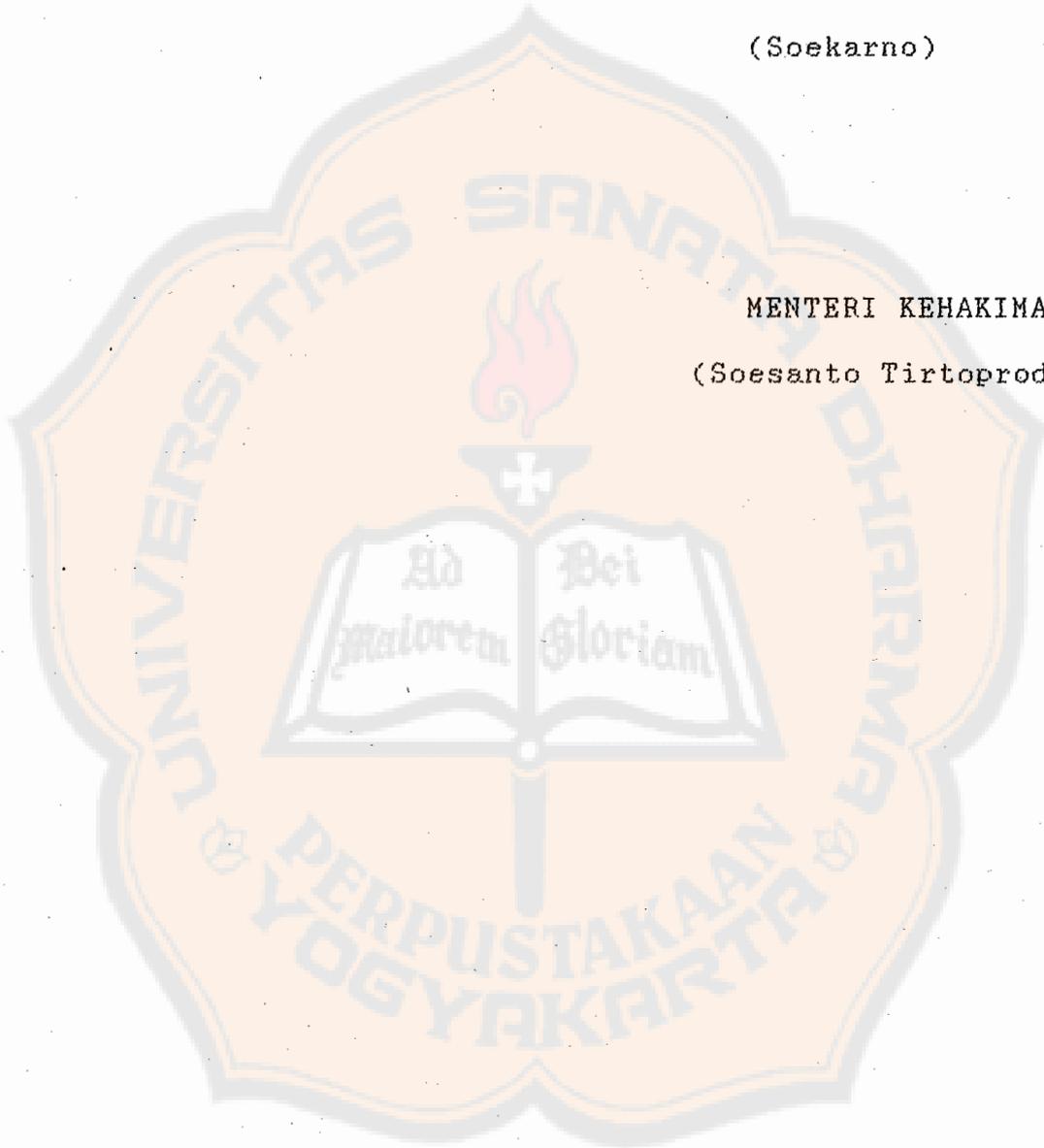
tanggal 9 Agustus 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(Soekarno)

MENTERI KEHAKIMAN

(Soesanto Tirtoprodjo)



Dikutip dari Iwa Kusuma Sumantri, Sejarah Revolusi Indonesia, (Jilid 2) Jakarta : tanpa penerbit, 1963.

o di manakah dia sekarang?

R.P. Soedarsono

o "Pelaku utama" peristiwa 3 Juli 1946.

Awal Juli 1946, terlar belia menghebohkan tentang adanya usaha pembunuhan keluasaan atas Presiden Soekarno oleh para pejabat tinggi dan polisi, tepatnya 3 Juli 1946.

Untuk mengungkapkan kembali masalah kudeta yang sebetulnya bukanlah "kudeta" itu, senganja diteliti R.P. Soedarsono, seorang pejabat tinggi waktu itu yang disebut sebagai "pelaku utama" di samping Mr. Moch. Yamin almarhum dan para tokoh polisi lainnya.

Kediamannya, sebuah rumah besar yang bukan miliknya. "Saya tidak punya rumah, disini saya menyewa sejak tahun 1952," ujar Soedarsono di kursi rotan yang didudukinya. Di kursi itu, ia pernah diwawancarai wartawan-wartawan asing termasuk Cindy Adams, penulis biografi Bung Karno. Para wartawan Barat inipun menanyakan hal serupa tentang peristiwa 3 Juli '46.

Kepala Divisi III

Sapak tojangnya ikut mewarnai sejarah Indonesia, itulah R.P. Soedarsono. Para remaja sekarang masih terlalu kabur tentang Peristiwa 3 Juli '46, apalagi mengenal R.P. Soedarsono.

Lahir di Purbalingga 6 April 1908, kini usianya sudah 79 tahun. Mengetahui, bahwa orang setua ini ternyata masih punya daya ingat kuat, ia memulai pendidikannya di Tweede Indische School atau "Sekolah Ongko Loro" di Purbalingga tahun 1909, dilanjutkan di H.I.S. tahun 1913 dan MULO Purwokerto tahun 1920. Di MULO selama 4 tahun, ia melanjutkan sekolah analisis di Jakarta selama setahun sejak 1924.

Tahun 1925 selama setahun, memasuki Sekolah Polisi di Sukabumi, dan 29 tahun kemudian, yaitu 1954, pendidikan kemiliteran ini dilanjutkan dengan tugas belajar di U.S. Coast Guard Amerika Serikat, Itabandan Muangthai.

Selama kurang dari setahun sekolah polisi di Sukabumi ia mendapat uang saku Rp 195, setiap bulan. Dandannya ke-14 murid waktu itu, hanya ada 2 orang Indonesia. Lainnya adalah Belanda. Namun Soedarsono mempunyai kependaian menonjol, sehingga ketika diadakan tes maupun ujian, ia selalu mendapat nilai nomor satu. Dan ia menang selalu nomor satu sejak sekolah.

Keluar dari sekolah polisi, Soedarsono mendapat pangkat Letda. Kelala orang Indonesia pertama yang mendang pangkat ini. Kantor kemiliteran pertamanya pada Kantor Polisi Seksi V Gondangdia Jakarta, tahun 1926. Di sana ia bertugas sampai April 1928, kemudian menjabat sebagai Komando Detasemen Polisi Karat Jakarta sampai 1933, sebelum bertugas sebagai Kepala Polisi



R.P. Soedarsono.

Kelala di Semarang, dan sampai dengan 1939, berturut-turut menjabat sebagai Komandan Detasemen Polisi di Teluk Bayu, Kalimantan dan Mempura Kalsel.

Bulan Juli 1939 dengan pangkat Inspektur Tingkat I, ia menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal pada Kantor Polisi Yogyakarta sampai 1942. Ketika Jepang masuk, ia masih bertugas di Yogya tapi pangkatnya berubah menjadi Nitto Kelas sebagai Puku Keisatsusitoco. Setelah kemudian pangkatnya naik menjadi Nitto Keisi dan bertugas sebagai pengajar pada Sekolah Polisi Sukalumi. Bulan September 1944, ia kembali ke posnya semula di kantor polisi Yogya dengan pangkat Nitto Keisi sebagai Puku Keisatsuhuco.

Menjelang Proklamasi Agustus 1945, dengan pangkat Komisaris Tingkat II, Soedarsono menjabat sebagai Kepala Polisi Pertama Daerah Yogyakarta. Selanjutnya Oktober 1945 sampai Mei 1946 menjabat sebagai Kepala Divisi Yogyakarta/Divisi IX dengan pangkat Kolonel. Tanggal 20 Mei 1946, Soedarsono naik pangkat menjadi Jendral Mayor (Memor Jendral) dan menjabat sebagai Kepala Divisi III, sampai dengan tengahnya Peristiwa 3 Juli 1946.

Selama 3 tahun sejak Peristiwa 3 Juli 1946, sampai dengan 1949, Soedarsono praktis bergelut dengan masalah penjara dari yang satu ke yang lainnya, juga dengan pengadilan terhadap tindakan keulatan yang ditimbulkan kepadanya beserta rekan-rekannya. Pangkatnya pun bukan lagi Jendral Mayor, melainkan diturunkan secara drastis menjadi mayor. Namun ia segera dapat memperoleh jenjang kepangkatannya setelah bebas dari hukuman dengan membantu Kepala Kepolisian Negara dalam perundingan dengan pihak Belanda sebagai persiapan pengoperan Angkatan Politik Belanda pada tanggal 10 November 1949 dengan pangkat Komisaris Polisi Tingkat II.

Selanjutnya sampai dengan tahun 1950 ia membantu mengorganisir dan mengorganisir kepolisian di daerah Banten, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, juga memimpin tiga kompi Polisi Bintaro menjaga keamanan di Jakarta sebelum dan sesudah penyerahan Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Kantor kemiliteran Soedarsono kembali menjabat ketika tanggal 1 November 1950 menjadi Panglima ATRUD sampai dengan bulan Desember 1954, dan tanggal 6 Juli selanjutnya tugas beralih di AS, Italia dan Muangthai, ia kembali memegang jabatan sebagai Panglima ATRUD untuk yang kesekeluhanya, dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Jabatan ini adalah yang terakhir dari karier kemiliteran Soedarsono sebelum pensiun bulan Juli 1958. "Saya pernah berpangkat Mayor Jendral tapi pensiun dengan pangkat Kolonel. Itu adalah sejarah pribadi saya," ujar Soedarsono terakhir.

Merangkap Syahid

Peristiwa 3 Juli 1946 yang menghebohkan waktu itu, memang sama sekali tidak bisa terlepas dari nama-nama seperti R.P. Soedarsono, Mr. Moch Yamin, Mr. Achmad Sitondjo, Mr. Iwa Kusumasumarta, Mr. Budyanto Martoatmaja, Dr. Buntara dan Mohammad Saleh. Ketujuh orang itulah yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh dengan hukuman terberat selama 4 tahun bagi Mawjan R.P. Soedarsono dan Mr. Mohammad Yamin karena dua orang itulah yang dituduh sebagai pemimpinnya.

Peristiwa tersebut dengan ditangkisnya para pemimpin politik dan dibebaskan ke penjara Wiraguna Yogyakarta, beberapa bulan setelah bukanya R.I. pindah kesana, dengan Kabinet Parlemen di bawah pimpinan Sutan

Syahid yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Para pemimpin politik yang dipenjara itu adalah yang dianggap sebagai lawan-lawan politik Sutan Syahid.

Sebelumnya mereka ini menyatakan ketidaksetujuan atas hasil perundingan tidak resmi antara pihak Belanda dan Indonesia yang diwakili oleh Syahid yang dinilai sangat merugikan kedaulatan Indonesia. Perundingan tidak resmi ini berlangsung tanggal 10 Februari 1946. Belanda diwakili Dr. Van Mook, sedangkan Indonesia diwakili Syahid dengan diwakili oleh Clark Kerr (Duta Besar Inggris yang bertindak sebagai penantara). Van Mook mengusulkan perbatasan Resekutan dan demarkasi antara Belanda dan Indonesia untuk satu masa tertentu sampai selanjutnya bangsa Indonesia mampu menandatangani secara bebas hasil perundingannya. Usul ini ditolak Indonesia karena dengan nasyat agar jalan berunding atas dasar Pengakuan RI 100%.

Sangat disayangkan ternyata dalam lanjutan perundingan tidak resmi 23 Maret 1946, Sutan Syahid mundur dari tuntutan semula, ia mengajukan usul kompromi yakni "Pengakuan de facto kekuasaan R.I. atas Jawa, Madura dan Sumatera, kekuasaan de jure Belanda seluruh Indonesia, Belanda dan Suidhame akan merupakan satu kesatuan politik".

Dengan gambarnya Van Mook dan Clark Kerr menyetujui usul ini dan merencanakan akan ditandatangani dengan perundingan resmi bulan April 1946 di suatu tempat di negeri Belanda. Tapi rencana ini kemudian batal. Namun hasil perundingan tidak resmi ini telah menjalar ke masyarakat dan kaum politik yang dengan jelas merasa tidak puas dan gelisah karena Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpecah menjadi dua masing-masing dibawahi kekuasaan Indonesia dan Belanda.

Bersamaan dengan itu, suasana dalam masyarakat setiap hari dihi-
 publikatogangan. Sas susubtu di
 menamena ditambah dengan
 masih bedkelianannya laskar-
 laskar liar yang pandai meman-
 faatkan kesempatan, membuat
 Masyon R.P. Soedardono segera
 mengambillangkah untuk menga-
 tashinya.

Sebagai Kepala Divisi III yang
 berkuasa atas Daerah Yogyakarta,
 ia merasa bertanggung jawab atas
 setiap kejadian di daerah kekuasa-
 saannya. Maka segera ia menge-
 luarkan suatu perintah resmi
 untuk menangkap Syahrir. Ala-
 sannya, Syahrir menangkap para
 pemimpin politik tanpa surat per-
 intah dan dengan cara yang tidak
 wajar melalui pasukan
 pasukannya. Hal ini menimbulkan
 suasana gelisah atas kota Yogya-
 karta. Ditambah dengan alasan
 alasan politik yang menuntut R.P.
 Soedardono tidak usaha untuk
 menengrong kawibawaan Pre-
 sident.

Suatu Perintah resmi penang-
 kapan Mr. Syahrir segera dikebu-
 kan, dan tugas itu diserahkan
 kepada bawahannya Mayor A.K.
 Yusuf setelah sebelumnya ia
 menandatangani surat tersebut
 Mayor Sutanto, Komandan Divisi
 Surakarta. Penangkapan atas diri
 Syahrir pun dilaksanakan dengan
 mendapat bantuan dari Kepala
 Polisi Surakarta Demoparoto
 malam tanggal 27 Juni 1946 ketika
 Syahrir dan dua orang Mentari
 sedang berada di hotel Merdeka
 Solo.

Pendana Mentari Sultan Syahrir
 kemudian dibawa ke Panas suatu
 tempat dekat Boyolali, namun
 keesokan paginya dibebaskan
 kembali atas permintaan Bung
 Karno dalam pidatonya di radio
 yang antarlain mengatakan "Pre-
 sident R.I. mengambil alih ke-
 kuasaan pemerintahan Republik
 membutuhkan Syahrir, Soekarno
 memolukannya." katanya (se-
 rat sebagai Maklumat Presiden
 No. 1/1946).

Menjelang 1 Juli 1946 tengah
 malam, mendadak listrik seluruh
 Yogyakarta padam. Bersamaan dengan
 itu polisi mendatangi rumah para
 tokoh politik ulanis dengan
 sikap seperti mengacung musuh,
 sementara pasukan pasukan yang
 berada di bawah Divisi III tetap
 berada di markas masing-masing,
 kecuali tetap waspada terhadap
 serangan Belanda.

"Ada rapat di kantor polisi,
 bapak diminta segera datang,"
 itulah alasan mereka untuk mem-
 bawa satu persatu tokoh-tokoh
 politik. Di kantor polisi telah
 duduk berderet Dr. Buatakan,
 Mohamad Saleh, Sumantoro,
 Sayuti Melik, Budhyanto dan

R.P. Soedardono

perintah tahanan lainnya terna-
 suk Ketua Dewan Pertimbangan
 Agung Wianatakusumah.

Kearah Wianatakusumah, me-
 reka kemudian diasing dan dije-
 bluskan ke penjara Wirogunan.
 Kembali Masyon R.P. Soedardono
 terengah-engang mendengar para tokoh
 politik dipenjarakan. Maka ia ber-
 niat melaporkan hal ini kepada
 Panglima Besar Sudirman dan
 Reksadilan Panglima Besar
 menyang me-ranggalaya Tanggal
 2 malam menjelang 2 Juli, Soeda-
 rono bersama Mr. Moch. Yamin
 dan Mayor A.K. Yusuf pergi ke
 Solo menghadapi Panglima Besar
 di Lohi Gandung. Di sana Pang-
 lima menanyakan tentang hilang-
 nya Syahrir. Setelah diterangkan
 persoalannya, panglima memedi-
 tasikan secara lisan agar mem-
 bebaskan para tahanan di Wi-
 rogunan.

Pulang dari menghadapi Pang-
 lima Besar, R.P. Soedardono dan
 Mr. Moch. Yamin langsung
 menuju penjara Wirogunan dan
 bertemu dengan direktur penjara
 Wongsowardono. Setelah diter-
 kakan penjelasan sepenuhnya,
 mereka kemudian membebaskan
 12 orang tahanan politik. Dengan
 titik titik penjara, mereka diang-
 gkat ke markas Batalyon Wiyono.
 Pukul 4 subuh mereka baru tiba
 dan terpaksa menunggu pagi
 untuk bersama-sama menghadap
 Presiden Soekarno untuk minta
 penjelasan atas penangkapan
 mereka tanpa surat perintah dan
 penahanan mereka tanpa tahu
 kesalahannya.

Di saat menunggu pagi itulah
 Mr. Yamin dengan dibantu oleh
 kapol lainnya menyusun konsep
 nancangan Maklumat Nomor 2, 3, 4
 dan 5 yang kemudian dihebohkan
 sebagai konsep kudeta. Konsep
 maklumat nomor 2 dan seterusnya
 itu dimaksudkan sebagai lampiran
 Maklumat Presiden No. 1 yang
 diumumkan setelah Syahrir di-
 tangkap yakni: Presiden RI telah
 mengambil alih kekuasaan peme-
 nintah berdasarkan Undang-
 undang Bahaya No. 6 bulan Juni
 1946.

Ini RUP...

Rabu 3 Juli 1946, tanggal yang
 menghebohkan. Pagi itu sudah
 sedandantuk keluar dari markas
 Batalyon Wiyono, enam kilomster
 disebelah timur Yogya, berdirikan
 menuju kota. Sebelum sampai
 istana, terlebih dulu menemuit
 Dr. Sukarno, Mr. Djodi Gondolan-
 sumodan Mr. Soenario dan rumah
 masing-masing. Jam 8 pagi
 mereka sampai di Istana presiden
 dan menadati kondemangan di sem-

ping istana. Dan sedan turun R.P. Soedarsono dan Mr. Soenarto, dan dari turuk turun Mr. Moeda, Yamin, Dr. Sukiman, Mr. Djoch Condokusumo serta para "tapol" antara lain tampak Adam Malik (sekarang Wapres), Mr. Subardjo, Dr. Buntanan, Mr. Iwa Kusumasumandji, Mr. Budiyanto, Chaimil Saleh, Sayuti Melik, Tan Malaka, Abi-Koesno, Sukamandan lain-lain yang keseluruhannya 23 orang.

Ketika turun dari kendaraan, Mr. Yamin menyerahkan berkas kepada Marjon Soedarsono. Rombongan kemudian masuk ke istana dan dijemput oleh Mayor Pramurahajo, ajudan presiden yang menanyakan maksud kedatangan rombongan. Dijelaskan oleh Soedarsono, "kami ingin bertemu dan bicara dengan Presiden Soekarno".

Pramurahajo menemui presiden dan tak lama kemudian muncul lagi dan berkata "Presiden bersedia menerima dengan syarat senjata harus dilepas". Aneh pikir Soedarsono. Sebelumnya Presiden Soekarno tak pernah mempedulkannya macam begini. Lagi pula sebagai Komandan Divisi III yang membawahi Yogyakarta, dia boleh menghadap presiden dengan pakaian lengkap dan bersenjata. Namun tak apa. Ia segera melepas pistol dan pedang panjangnya kemudian diserahkan kepada Bill Marjman pengawal pribadi presiden.

Dengan berkas Yamin ditangan, ia sendiri masuk menemui Presiden Soekarno, dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Atas perintah lisan Panglima Besar Jenderal Sudirman, kami datang ingin mendapat penjelasan atas dasar apakah para pemimpin politik ditangkap tanpa surat perintah". Selain itu juga ingin menyampaikan kepada presiden. Berkas Yamin yang dibawanya. Isi berkas itu adalah 4 nancangan maklumat masing-masing nomor 2, 3, 4 dan 5 sebagai lanjutan dari Maklumat Presiden No. 1. Keempat nancangan maklumat itu dihapken untuk mendapat tanda tangan persetujuan presiden yang pada pokoknya berisi: Menyatakan penarikan mandat Kabinet Parlementer Syahin Amir Syahidjaja. Kembali wabah Kabinet Pra-

sidentil lengkap dengan ancer-ancer personal. Jelasnya dalam nancangan maklumat nomor 2 disebutkan:

"Atas dasar maklumat dan tentara dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia yang berjuang untuk membebaskan seluruh rakyat dan seluruh kepulauan Indonesia dari kedaulatan Nagara Republik Indonesia atas kemerdekaan 100%, maka kami, presiden Republik Indonesia pada hari ini memberhentikan seluruh kementerian Sultan Syahin Amir Syahidjaja, Jakarta, 3 Juli 1948".

Idalam ruangan itu selama Presiden Soekarno yang dipanggil Pak Sumadi sebelah kirinya dan Kyai Sukanagara (guru kebatinan presiden) di sebelah kanan, juga terdapat Wapres Mohammad Hatta yang dipanggil Gunadi dan seorang pemuda lagi, Mr. Amir Syarifudin (Mentari), Mr. A.G. Punggodigo (Sekneg) dan Mayor Pramurahajo.

Presiden terkejut setelah membaca nancangan maklumat itu. Kemudian mengangkat gagang telepon mau menecek perintah lisan Panglima Besar, tapi lama tak nyambung. Kemudian mengambil wulben mau menyalin di blok, mot tapi tak jadi. Suasana jadi tegang. Tampak presiden bingung. Tiba-tiba salah seorang pendamping Presiden berentak, "ini lup...!"

Cauni R.P. Soedarsono yang

kebingungan karena mendengar terakantun, karena itu samasekali bukan tujuannya, sebab tujuan utamanya ialah ingin mengembalikan posisi Presiden pada kedudukan semestinya.

Mayor Soedarsono segera dipersiapkan menunggu di luar, ternyata ia sudah ditunggu oleh laskar yang siap meringkusnya. R.P. Soedarsono, Mr. Moeda, Yamin, tokoh-tokoh politik lainnya ditahan di paviliun kepresidenan selama dua hari kemudian dipindahkan ke Benteng Vredenburg kearah Mr. Soenarto, Dr. Sukiman dan Mr. Djoch Condokusumo yang telah dibebaskan. Selanjutnya mereka dipindahkan 17 kali dan terakhir di Medan sebelum dibebaskan tanggal 17 Agustus 1948.

Rembek "Sapta Darma"

Juli 1948, setelah "keliling" Jawa Timur berpindah-jadid dan penjara satu ke lainnya, mereka di bawa kembali ke Yogyakarta untuk dihadapkan ke pengadilan oleh Mahkamah Agung Tentara.

Sejumlah 300 orang ditahan selubungan Peristiwa 3 Juli itu, padahal hanya 23 orang saja yang ke istana. Dan ternyata hanya 7 orang saja dihadapkan ke pengadilan. Mereka adalah R.P. Soedarsono, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Iwa Kusumasumandji, Mr.

Achmad Subardjo, Mr. Budiyanto, Dr. Buntanan dan Mohammad Saleh.

Dalam persidangan yang memakan waktu 4 bulan dengan 88 kali sidang itu, oleh Jaksa Agung R.P. Soedarsono dituntut hukuman 12 tahun. Dan diberi waktu 5 hari, untuk menyusun pembelaannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di dalam penjara dengan penanganannya, Mr. Moch. Yamin dibantu R.P. Soedarsono menyusun pleidoinya siang malam tanpa bantuan buku, menghasilkan naskah pembelaan setebal 202 halaman dan diberi nama pembelaan "Sapta Dama" (kebetul di tetapkan menjadi buku "Sapta Dama" setebal 491 halaman). Pleidoinya setelah ditambah dengan naskah pleidoin R.P. Soedarsono sendiri setebal 36 halaman.

Waktu itu Yamin yang membaca, kemudian saya yang menyotusin halaman mana yang akan dibacakan selanjutnya. Begitu seterusnya," kata Soedarsono.

Ketika sampai pada halaman terakhir dari pleidoinya, Mr. Yamin membacakan syair yang dibuatnya sendiri dan mencerdakan tentang seorang putra bangsa yang mengadu kepada Ibu Pertiwi. Pantun yang dibacakan itu begitu menyentuh perasaan sehingga Ketua Mahkamah Agung Mr. Dr. Kusumahatmadjardik dapat menahan air matanya. Ia menangis tersedu-sedu di Majelis hakim ter-

panamendengar bentukan Yamin yang begitu tegasnya. Presiden kemudian memanggil 17 orang Sanjaya untuk membenturkan terhadap pembelaan Yamin, tapi tak seorangpun sanggup.

Namun, bagaimanapun usaha mereka untuk membenturkan Mahkamah Agung Tentara tetap memutuskan hukuman selama 4 tahun penjara kepada R.P. Soedarsono dan Mr. Moch. Yamin, 3 tahun untuk Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Budiyanto dan Mohammad Saleh kebajikan 2 tahun 6 bulan, dan Dr. Buntaran mendapat hukuman 2 tahun, seluruhnya dipotong masa tahanan.

Dr. Buntaran yang sampai saat ini masa tahananannya telah lebih, langsung bebas, sedang yang lainnya dikirim ke penjara tentara Jalan Wilis III Medan.

Pada tanggal 3 Juli itu terdengar berita bahwa Soedarsono menodong Bung Karno bersama Tan Malaka. Apa betul?

"Menodong pakai apa?, pistol dan pedang sudah saya serahkan kepada Bill Manjamen, jugawaku itu saya belum kenal Tan Malaka. Apa nodong pakai "pistol gombak"? Jawab Pak Darsono gah.

"Pokoknya waku itu saya tidak mau lampaui kenyataan bahwa memang yang namanya badan tua itu dan menjadi masalah biasa. Yang jelas kita tidak sejalan dengan Syahrir dengan politik berbudinnya yang sangat menggelisahkan rakyat karena sangat merugikan keadilan Republik Indonesia.

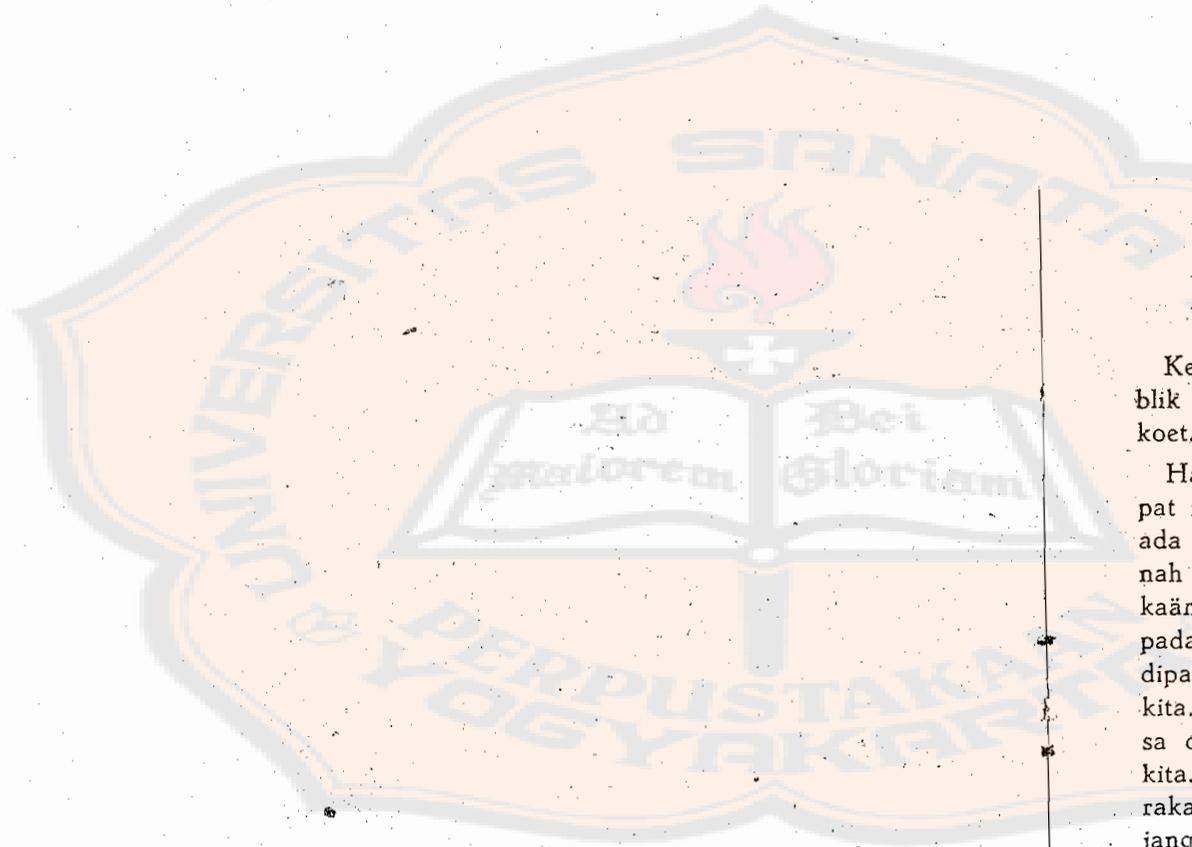
Saya dan kawan-kawan tentu saja menyahutkannya kembali seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengingikan digunakannya kembali UUD '45 sebagai dasar negara, eh..... malah disangkamau menduduki kekuasaan presiden," kata Soedarsono.

Dengan hilangnya para pemimpin politik utamaku, para pejuang yang setia kepada UUD '45, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merasa tertekan tanpa pegangan. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan para-patal mengusulkan kepada Presiden untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Agung Tentara. Presiden Soekarno menendahi baik usul ini, kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden No. 109/VCI/48, tertanggal 17 Agustus 1948 tentang pemberian grasi. Grasi yang tidak diminta pada waktu itu tentu tepat tanggal 17 Agustus 1948. R.P. Soedarsono dan 5 orang kawannya bebas merdeka kembali setelah dipenjara selama 870 hari.

Kini semuanya hanyalah nostalgia. Podsihwa 3 Juli 1948 menjadi sejarah bangsa Indonesia sekaligus sejarah pribadinya. Dalam kesenjangan usianya sekarang ini, hidupnya "digotong" oleh anak-anak yang berjumlah 13 orang, 10 diantaranya menyandang gelar sanjaya.

Sejarah R.P. Soedarsono memandang jauh ke depan, tampak senyum tipis menghis blicunya sesaat, "Jangan heran, itulah sejarah," katanya.

(S. Betty W)



PERDJOEANGAN KITA

Keadaän setelah doa boelan berdirinja Republik Indonesia dapat kita gambarkan seperti berikut.

Harapan dan keinginan oentoeck serta akan dapat mempertahankan kemerdekaan kita, oemoem ada pada segala lapisan bangsa kita. Beloem pernah ditahoen-tahoen jang laloe gerakan kemerdekaan memoentjak seperti sekarang. Teroetama pada pemoeda tampak, bahwa segenap djiwanja dipasangkannja pada perdjoeangan kemerdekaan kita. Akan tetapi lambat laoen rakjat banjak didesa dan dikota jang memperhebat perdjoeangan kita. Rakjat djelata toeroet tergolak kedalam gerakan kemerdekaan, didorong oleh kegelisahannja jang disebabkan oleh soeasana masjarakatnja. Bagi rakjat djelata njata, bahwa sembojan „merdeka” itoe tidak sadja berarti Negara Indonesia jang berdaulat, poen tidak poela sadja bendera merah-poeti baginja berarti symbol persatoean dan tjita-tjita bangsa dan negara, akan tetapi toeroetama kemerdekaan dirinja sendiri dari sewenang-wenang, dari kelaparan dan kesengsaraän, dan merah-poetih baginja toeroetama symbol perdjoeangannja itoe, jaitoe perdjoeangan kerakjatan:

Oetjapan-oetjapan kegelisahan rakjat jang kerap kali meroepakan perboeatan-perboeatan jang kedjam serta pelanggaran hak milik dengan kekerasan, dapat dimengerti, djika ditjari sebab-sebabnja jang lebih dalam. Selama tiga setengah tahoen pendjadjahan Djepang, sendi-sendi masjarakat didesa diobrak-abrik serta diroentoehkan dengan kerdja paksa, dengan pentjoelikan orang desa didjadikan romusya djaoeh dari tempat tinggalnja, didjadikan serdadoe, dengan penjerahan hatsil boemi dengan paksa, dengan penanaman hatsil boemi dengan paksa, dengan sewenang-wenang jang tiada batasnja. Demikian poela diantara rakjat djelata dikota, ketida pastian didalam kedoedoekannja, menjebabkan kegelisahan. Beriboe-riboe orang jang sebeloem Djepang datang, mempoenjai pentjaharian sebagai kaoem boeroeh, kehilangan mata pentjahariannja. Berpoeloeh riboe orang-orang desa melarikan dirinja kekota oentoek meloepoetkan diri dari sewenang-wenang serta kelaparan jang ada didesa, berpoeloeh riboe poela orang pelarian romusya, heiho dan kerdja paksa lainnja menambah banjakknja djiwa dikota jang tidak mempoenjai pentjaharian jang tentoe. Segala ini menjebabkan bahwa kegelisahan didalam masjarakat dikota teroes memoentjak. Bahaja segala ini akan meletoes didalam pemberontakan dan keroesoehan teroes bertambah besar oentoek Djepang.

Setelah Djepang roeboeh dan ia bersedia oentoek ditawan, sehingga kekoesaan pemerintahnja

mendjadi lemah, bahaja akan meledaknja tenaga jang terhimpoean didalam masjarakat itoe, teroes bertambah besar. Oentoek menghindarkan bahaja itoe, matjam-matjam moeslihat Djepang jang digoenakannja; antara lain adalah diichtiarkannja oentoek mengalirkan kegelisahan orang itoe terhadap golongan-golongan lain.

Kebentjiaan jang tambah lama tambah besar terhadap Djepang dipoetarkan oleh Djepang dengan agitasi dan propagandanja terhadap bangsa koelit poetih, orang Tionghoa, pangrehpradja dan selandjoetnja tak dapat kita moengkiri, bahwa propaganda dan agitasi Djepang itoe banjak pangaroehnja dan berhatsil djoega baginja. Selama tiga setengah tahoen negeri kita dikoentjinja dari loear negeri, sehingga kita tidak mengetahoei keadaan diloear dan ia leloeasa mendjoeal djoestanja jang mendjadi dasar propagandanja. Tatkala kebentjiaan rakjat kita terhadap Djepang telah oemoem dan disana-sini timboel keroesoehan, digoenakannja perasaan kebangsaan kita oentoek mendinginkan kepanasan terhadap dia.

Dibentoeknja Angkatan Moeda oentoek memperhebat agitasi kebangsaan, soepaja dapat menghindarkan bahaja sosial jang mengantjamnja. Agitasi kebangsaan itoe memang memoeaskan oentoek pemoeda-pemoeda serta kaoem terpeladjar kita jang berada didalam kegelisahan dan kebingangan. Pada oemoemnja adalah gerakan rahsia Djepang seperti Naga Hitam, Kipas Hitam dan lain-lain boeatan kolonne kelima Djepang, boe-

atan Kenpeitai, Kaigun dan lain-lain sangat menyoedjoean kegiatannya terhadap pemoeda-pemoeda kita dan memang ada djoega dapat mempengaruhi djiwanja, meskipun kerap kali pada lahirnja oemoem pemoeda kita membentji Djepang. Dengan tidak sadar, biasanja djiwanja terpengaruh djoega oleh propaganda Djepang itoe dan tingkah lakoenja, hingga tjara ia berfikir, adalah kerap kali menjonto-njonto Djepang. Kegiatan djiwanja teroetama terlihat sebagai kebentjiaan kepada bangsa-bangsa asing, jaitoe sebenarnya jang ditoadjoeakkan oleh Djepang oentoekek dimoesoehi, bangsa Sekoetoe, bangsa Belanda, bangsa Indo (bangsa kita sendiri), Ambon, Manado, kedoea-doeanja bangsa kita sendiri, Tionghoa, pangrehpradja; maksoednja tak lain, seloeroeh doenia boleh dibentji asalkan djangan membentji Djepang.

Demikian keadaan sebeloeem pernyataan Indonesia Merdeka, demikian poela bahan-bahan oentoekek mendirikan peroemahan Indonesia Merdeka. Tatakala Negara Indonesia Merdeka didirikan, rata-rata orang jang mengemoedikannya, adalah bekas pegawai dan pembantoe Djepang. Hal ini mendjadi halangan oentoekek membersihkan masjarakat kita dari penjakit Djepang jang berbahaja oentoekek djiwa pemoeda kita itoe. Pendidikan politik jang diwaktoe djaman djadjahan Belanda telah begitoe tipis, didalam djaman Djepang sama sekali tidak ada, djiwa pemoeda dibentoekek oentoekek dapat menerima perintah sadja, oentoekek

toendoek dan mendewa-dewakan seperti orang Djepang toendoek kepada Tenno dan mendewa-dewakannya. Demikian poela pemoeda kita hanja diadjar toendoek pada pemimpin dan mendewa-dewakannya, tidak diadjar dan tidak tjakap bertindak dengan bertanggoeng djawab sendiri. Kesadaran revoloesionner jang haroes berdasar pada pengetahoean kemasjarakatan, tipis benar. Oleh karena itoe, ketjakapannya oentoekek menjoesoen dan mempergoenakan kemoungkinan jang ada didalam masjarakat, sangat ketjil. Oleh karena itoe poela, maka sendjata dan alat perdjoengan jang seharoesnja dapat dibentoekek dari tenaga jang terhimpoean dalam masjarakat sebagai kebentjiaan terhadap penindasan dan pemerasan Djepang, tidak terbentoekek. Segala kegelisahan jang ada didalam masjarakat didjoeroeskan oleh pemoeda-pemoeda kita, pada kebentjiaan terhadap bangsa-bangsa asing jang hidoep didalam negeri kita, pada berbaris-baris dengan tombak jang sekarang djoega mendjalar mendjadi pemboenoehan dan perampokan serta roepa-roepa kegiatan lain lagi, jang ditilik dengan katja mata perdjoengan kemasjarakatan tidak berarti atau adalah reaksionner, seperti tiap-tiap tindakan fascistis itoe selamanja reaksionner.

Terlambat datangnya balatentara Sekoetoe oentoekek menggantikan balatentara Djepang jang tak berkemaoean lagi oentoekek memerintah, sebenarnya memberikan kesempatan jang baik bagi pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia

oentoek menjoesoen ke koeasaan Repoeblik Indonesia. Akan tetapi hal ini tiada tertjapai seperti seharoesnja.

Sebabnja jang pertama ialah bahwa jang mengendalikan pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia boekan orang jang berdjawa keat. Kebanjakan dari mereka telah terlaloe biasa memboengkoek serta berlari oentoek Djepang atau Belanda; djiwanja bimbang dan njata tidak sanggoep bertindak dan bertanggung djawab.

Sebab jang kedoea adalah bahwa banjak antara mereka merasa berhoetang boedi kepada Djepang, jang mengoerniakan persediaan Indonesia Merdeka pada mereka. Achirnja dianggapnja, bahwa ia mendjadi pemerintah, ialah oleh karena bekerdja bersama dengan Djepang.

Oleh karena itoe maka sesoedah kekoesaan Djepang mendjadi lemah, dan kemoedian roentoeh serta poela beloem digantikan oleh kekoesaan militer Sekoetoe, tidak poela Negara Repoeblik Indonesia dapat mendirikan kekoesaan bangsa kita sendiri sehingga beroepa negeri dan bangsa jang tak berpemerintah, sedangkan rakjat jang gelisah beloem mendapat didikan, dan beloem mempoenjai pengetahoean tentang menjelesaikan soal kemasjarakatannja berhoeboeng dengan pemerintahan. Maka timboellah kekatjauan jang mendjalar teroes; didalam keadaan begini agitasi kebangsaan berakibat roepa-roepa jang tiada dikehendaki atau dikoeasai oleh orang jang memboeat agitasi. Pemboenoehan bangsa asing serta

perampokan jang djika kita tilik keadaan rakjat, dapat dimengerti, tidak oeroeng poela menjatakan kelemahan pemerintahan Repoeblik Indonesia jang beloem dapat merasakan dirinja sebagai pemerintah jang dipandang dan dihormati oleh rakjatnja.

Pemoeda-pemoeda kita jang berichtiar mempergoenakan kegelisahan rakjat itoe, tiada poela mempoenjai sjarat-sjarat jang perloe oentoek dapat memimpin rakjat didalam perdjoeangan jang seharoesnja dilakoekan. Pemoeda kita itoe oemoemnja hanja mempoenjai ketjakangan oentoek mendjadi serdadoe, jaitoe berbaris, menerima perintah menjerang, menjerboe dan berdjibakoe dan tidak pernah diadjar memimpin.

Oleh karena ia tidak berpengetahoean lain, tjara ia mengadakan propaganda dan agitasi pada rakjat banjak itoe seperti dilihatnja dan diadjarnja dari Djepang, jaitoe fascistis. Sangat menjedihkan keadaan djiwa pemoeda kita. Mereka teroes didalam kebimbangan, meskipoen semangatnja meloeap-loeap, mereka beloem mempoenjai pengertian tentang kemoengkinan serta ke-doedoekan perdjoeangan jang diperdjoeangkanja sehingga pandangannja tak dapat djaoeh. Pergangannja banjak kali tak lain dari pada sembojan merdeka atau mati. Tiap kali kalau terasa, bahwa kemerdekaan beloem pasti serta ia beloem poela menghadapi mati, mereka berada teroes didalam kebimbangan.

Obat oentoek kebimbangan itoe oemoemnja ditjari dengan perboeatan jang teroes meroes, sehingga perboeatan didjadikan madat oentoek djiwa. Bagi bangsa kita, maboek perboeatan pemoda-pemoda kita ini, sebenarnja soeatoe keoentoengan jang besar benar, dan memang poela perboeatan-perboeatan merekalah jang mendjadi pendorong keras bagi perdjoeangan kita pada permolaannja, akan tetapi tentoe poela perboeatan jang sebenarnja tiada berpengertian ini, banjak poela salah toebroek, sehingga meroesakkan dan meroegikan perdjoeangan kita. Demikian oempamanja hasoetan dan perboeatan-perboeatan terhadap bangsa-bangsa asing, jang melemahkan kedoedoean perdjoeangan kita didalam pandangan doenia internasional.

Terhadap tjita-tjita kita hendak mendirikan negara kita sendiri, doenia loear moelanja menjatakan sympathinja. Boleh dikatakan, bahwa pandangan oemoem didoenia moela-moela memihak pada kita, teroetama seloeroeh kaoem boeroeh didoenia, akan tetapi dengan bertambah banjakknja kedjadian jang menoendjoeakkan kekatjauan diantara ra'jat kita, jang soelit dapat dipahamkan sebagai oetjapan perdjoeangan kemerdekaan, seperti pemboenoehan serta perampokan, perasaan oemoem didoenia terhadap perdjoeangan kita dapat berubah, seperti terboekti djoega diwaktoe jang achir ini.

Pada oemoemnja sekalian tanda kekatjauan dinegeri kita, hanja akan mengetjewakan tidak sa-

dja kaoem kapitalis akan tetapi djoega kaoem boeroeh diseleroeh doenia. Kaoem kapital ketjewa akan kemoengkinan oentoek modalnja jang diharapkan akan dapat memberi hatsil, djika keamanan soedah ada dinegeri kita. Kaoem boeroeh ketjewa akan tanda-tanda kekedjaman fascistis, jang telah sangat terkenal didoenia pada waktoe ini, serta akan pajah djoega akan dapat menelan pemboenoehan-pemboenoehan orang asing, apalagi pemboenoehan dan kekedjaman terhadap orang Indo, Ambon dan Menado, jang bangsa kita sendiri. Sekalian ini hanja akan dimengertikan sebagai kementahan didalam perasaan kebangsaan jang sebenarnja moesti mengandoeng kesadaran politik kebangsaan pada pokoknja.

Kebentjan terhadap orang Indo, Ambon dan Menado hanja dapat diartikan oleh loear negeri, bahwa kesadaran kebangsaan kita diantara rakjat banjak terboekti masih sangat tipis atau beloem ada sama sekali. Selama pendoeoek daerah jang satoe masih dapat diadoe-dombakan dengan pendoeoek daerah jang lain, memang soelit bagi doenia akan menerima adanja perasaan kebangsaan. I n d o n e s i a diantara ra'jat kita, dan perdjoeangan kita sekarang ini akan diartikan lain poela.

Bagi kaoem modal jang mendjadi oekoeran terhadap perdjoeangan kita, tidak lain dari perhitungangan oentoeng-roegi. Djika tidak akan meroegikan, ia akan netral, djika mengoentoengkan ia akan pro, djika meroegikan, ia akan anti. Djika

dianggapnja benar-benar meroegikan, ia akan mengerahkan sekalian tenaga oentoeq menentang kita, serta ia akan tidak ragoe-ragoe menjebakan interventie militer oentoeq membela kepentingan modalnja. Oleh karena itoe maka djika pemerintah Repoeblik Indonesia ta' dapat menghindarkan kekatjauan jang akan mengantjam keinginan dan kemoengkinan modal loear negeri, pasti ia akan dimoesoehi oleh modal loear negeri itoe, dan oleh karena itoe djoega oleh negeri-negeri dimana modal itoe berkoeasa. Oleh karena tidak mengetahoei atau mengindahkan kebenaran ini, banjak orang kita bertindak dan berboeat seolah-olah mengoendang interventie loear negeri itoe. Perboeatan jang demikian tentoe bertentangan dengan segala ilmoe perkelahian, jang meminta soepaja lawan berkedoedoeakan lemah-lemahnja, jaitoe sebolehnja djangan mempoenjai banjak kawan dan pembantoe. Perboeatan demikian dapat dimengerti dengan mengingat semangat djibakoe. Terqes meneroes kita haroes awas terhadap bahaja akan masih dapat mendjadi korban didikan atau propaganda Djepang.

Setelah menindjau dan menjatakan dengan teroes terang apa jang dianggap sebagai kekoeangan dan kelemahan perdjoeangan kemerdekaan kita sekarang ini, boleh kita mengambil kesimpulan, bahwa sekalian kekatjauan dan kebimbangan pada waktoe ini memang sebahagian besar ta' dapat dihindarkan, akan tetapi pasti dapat poela kita tetapkan, bahwa djika pengertian serta

perhitoengan benar ada pada pimpinan perdjoeangan tentang keadaan serta kemoengkinan politik loear dan dalam negeri, hatsil jang didapatkan akan lebih banjak serta kekatjauan dan kebimbangan poen tidak sebesar sekarang ini. Oentoeq menjoembang keperluan pada penerangan dan pengertian ini akan dikemoekakan disini didalam beberapa bab beberapa kenjataan politik jang seharoesnja dijadikan dasar didalam perhitoengan kita, soepaja dapat menentoeqkan arah dan langkah didalam perdjoeangan terhadap loear dan djoega dalam negeri.

I. KEADAAN SEHABIS PERANG DOENIA KE DOEA.

Kesoedahan peperangan doenia kedoea meninggalkan didoenia tiga kekoeasaan militer dan ekonomi jang menentoeqkan segala-galannya, jaitoe: Amerika-Serikat, Inggeris, dan Sovjet-Roesland. Soesoenan internasional jang menggaboengkan negeri-negeri jang terbanjak didoenia, dipimpin dan dikoeasai oleh mereka. Sekalian negeri lain sebagai perobahan kekoeasaan jang terachir ini kehilangan kedaulatannya jang dahoeloe djoega soedah sangat terbatas.

Systeem politik Sovjet-Rusland berdiri tegoeq atas dasar-dasar systeem ekonomi-sosialistis, jang telah melaloei oedjian jang seberat-beratnja didalam beberapa tahoen jang laloe dan pada pokoknja tidak begitoe tergantoeng pada keadaan eko-

nomi atau politik doenia diloeat Sovjet-Rusland.

Amerika-Serikat dan Inggris sebaliknja mem-perloekan seloeroeh doenia oentoek lapang ke-hidoepan ekonominja jang kapitalistis dan impe-rialistis. Peperangan jang ke 2 jang telah meng-hantjoerkan kekajaan benda doenia seharga beriboe-riboe djoeta roepiah, pada oemoemnja telah memiskinkan seloeroeh doenia selain dari pada Amerika-Serikat. Alat-Alat penghatsilan ma-lah kerap kali tempat penghatsilan sendiri han-tjoer dan tak dapat dipergoenakan lagi, manoe-siapoen banjak koerang oentoek didjadikan tena-ga pekerdja, serta apa jang ada koerang tenaga-nya oleh kelaparan dan kesakitan.

Ini semoeanja menjebakkan, bahwa doenia ka-pitalis lemah dan beloem dapat diketahoei bagi-mana tjaranja kapitalisme ini akan mendapat tjoe-koep kekoean oentoek melandjoedkan kehi-doepannya dengan sehat.

Keroeboehan ekonomis dibahagian terbesar di-doenia ini, meroepakan dirinja djoega sebagai kekatjauan serta pertentangan-pertentangan poli-tik jang tadjam. Desakan dari fihak kaoem boe-roeh oentoek merobah sendi-sendi masjarakat ka-pitalis dan mendjadi masjarakat sosialistis ber-tambah deras. Sebaliknja pihak jang berpegang kepada systeem lama, meskipoen terdesak, men-tjari segala djalan oentoek memperkoeat kedoedokannya dengan niat menjempoernakan systeem kapitalisme dan imperialisme. Djadi kita mengha-dapi djoega soeatoe matjam imperilisme baroe.

Kita hidoep sekarang didalam zaman jang mener-toekan systeem mana jang akan meloeas dan achirnja menentoeakan nasib kemanoesiaan, jaitoe kapitalisme baroe atau sosialisme. Perlombaan dan pertaroengan doea aliran dan kekoean ini akan memboeat pertaroengan politik doenia teroes meneroes. Kita akan mengalami krisis politik te-roes meneroes, moengkin didalam depressie eko-nomi teroes oentoek sementara dengan ke-moengkinan pada pertaroengan-pertaroengan dan moengkin djoega peperangan-peperangan baroe didoenia.

II. KEDOEDOEKAN INDONESIA DIDALAM DOENIA SEKARANG.

Letak Indonesia didalam lingkoengan daerah pengaroeh kapitalisme - imperialisme Inggeris-Amerika. Nasib Indonesia tergantoeng dari pada nasib kapitalisme-imperialisme Inggeris-Amerika.

Didalam lebih dari pada satoe abad jang ter-achir ini, kekoekaan belanda atas negeri dan bangsa kita adalah boeah dari pada perhitoengan dan penetapan politik loear negeri Inggeris. Kita ketahoei bahwa setelah dipermoelaan abad ke-sembilan, belas Inggeris merampas dan mengem-balikan Indonesia dari dan pada belanda, sebe-narnya belanda berada di negeri kita ini tidak la-gi atas kekoean sendiri akan tetapi atas koernia Inggeris serta tergantoeng semata-mata dari pada politik Inggeris. politik Inggeris terhadap Asia Timoer ini dapat didjalankannya lebih dari seabad

lamanja, meskipoen tenaga dan keadaan baroe timboel, seperti Roesia, Djepang, Amerika Serikat, Revoloesi Tiongkok, akan tetapi tak oeroeng poela kedoedoekannja berobah, teroetama di Tiongkok. Perobahan jang besar terhadap daerah kita terdjadi dengan pengoesiran kekoesaan belanda dari Indonesia oleh militer Djepang. Oleh karena Djepang kalah ia oentoek sementara, akan hilang dari alam politik Asia Tenggara ini, akan tetapi sebaliknja boleh dikatakan segala kedoedoekan Djepang itoe akan djatoeh ketangan Amerika-Sarekat jang sekarang telah mendjadi kekoesaan Pasifik jang djaoeh terbesar. Terhadap politik Inggeris jang telah lebih dari pada seabad oemoernja ia sekarang merasakan dirinja diseloe-roeh Asia dan djoega di negeri kita sebagai perobah dan pembaroe keadaan. Djika Inggeris tidak dapat menjesoeaikan dirinja dengan politik Amerika Sarekat jang dikoeasai oleh hoekoem kehidoean kapitalismenja sendiri, njata ia acfirnja akan kalah dengan tenaga Amerika Sarekat. Njata bahwa kekoesaan belanda hingga waktoe ini hanja soeatoe alat didalam pertjatoeran politik Inggeris. Njata poela bahwa oentoek politik Amerika-Sarekat kekoesaan belanda atas negeri kita tidak sama dengan oentoek politik Inggeris. Didalam kebenaran ini berada kemoengkinan oentoek kita mendapat kedoedoekan jang baroe jang tjotjok dengan kehendak politik kekoesaan raksasa pasifik Amerika-Sarekat ini, akan tetapi djoega batas kemoengkinan bagi kita selama soesoenan

doenia beroepa kapitalistis dan imperialistis seperti sekarang. Selama itoe kita tetap akan berada didalam dan dilipoeti oleh alam imperialisme-kapitalisme Amerika - Inggeris, dan bagaimana djoega oesaha kita, kita sendiri tidak akan tjoe-koep tenaga oentoek meroentoehkan alam itoe, jang akan dapat memberi kita kemerdekaan jang sepenoeh-penoehnja. Oleh karena itoe maka nasib Indonesia, lebih dari pada nasib bangsa-bangsa lain didoenia tergantoeng pada keadaan dan sedjarah internsional dan lebih poela dari bangsa lain bangsa kita memerloekan berobahnja dasar-dasar pergaoelan hidoep kemoesiaan, jang akan dapat menghilangkan imperialisme dan kapitalisme djoenia ini.

Selama ini beloem terdjadi, maka perdjoeangan kebangsaan kita akan tidak dapat memoeaskan sepenoeh-penoehnja, serta kemerdekaan jang kita dapat, djika kita peroleh sepenoehnja terhadap belanda, poen hanja beroepa kemerdekaan seperti jang terlihat pada lain-lain negeri ketjil, jang dibawah pengaroeh negeri kapitalis jang besar, jaitoe beroepa kemerdekaan nama sadja.

III. REVOLOESI KERAKJATAN.

Revoloesi kita ini jang keloear beroepa revoloesi nasional, djika dipandang dari dalam beroepa revoloesi kerakjatan. Meskipoen kita telah berpoeloeh tahoen berada didalam laloe-lintas doenia modern, meskipoen masjarakat negeri kita telah sangat dirobah dan dipengaroehi olehnja, akan

tetapi diseloeroeh kehidoepan rakjat kita teroeta-
ma didesa, alam kehidoepan serta fikiran orang
masih feodal. Pendjadjahan belanda berpegang
pada segala sisa-sisa feodalisme itoe oentoek me-
nahan kemadjoean sedjarah bangsa kita. Begitoe
oempamanja pangrehpradja ta' lain dari pada alat
jang diboeat oleh pendjadjah belanda dari warisan
feodal masjarakat kita. Beroepa-roepa atoeran
jang dilakoekan atas ra'jat kita didesa ta'lain dari
pada landjoetan jang lebih teratoer dari pada ke-
biasaan feodal, demikian penghargaan jang begi-
toe rendah terhadap diri orang desa, jang masih
dipandang setengah boedak-belian, boekan sadja
didalam mata kaoem ningrat kita, akan tetapi
djoega didalam pandangan kaoem pendjadjah
belanda.

Pendjadjahan belanda itoe mentjari kekoeatan-
nja dengan perkawinan ratio-modern dengan feo-
dalisme Indonesia, mendjadi achirnja tjonto fasci-
sime jang teroetama didoenia ini. Fascisme dita-
nah djadjahan djaoeh mendahoeloei fascisme Hit-
ler-ataupoen Mussolini. Sebeloem Hitler menga-
dakan concentrasikamp Buchenwald atau Belzen,
Boven-Digoel soedah lebih dahoeloe diadakan.
Oleh karena itoe maka pergerakan ra'jat kita da-
ri sedjak moela didalam menentang pendjadjahan
asing sebenarnja menentang feodal-bureau-kratie
dan achirnja autokratie dan fascisme djadjahan
belanda, dan oleh karena itoe pergerakan kerak-
jatan jang sedjati. Toentoetan kedaulatan rakjat
didalam pergerakan kita itoe memang sebagai

gambaran jang sebenarnja tentang persoalan
bangsa kita terhadap pendjadjahan asing jang
autokratis dan fascistis itoe. Ra'jat didalam per-
djoengan sebagai bangsa menoentoet hak-hak
kemanoesiaannja, jang akan memberi ia djaminan,
bahwa ia ta' akan dapat diperlakoekan lagi seba-
gai boedak-belian. Oleh karena itoe maka didalam
pandangan kita revoloesi kita sekarang adalah
revoloesi nasional dan revoloesi kerakjatan jang
bersangkoetan dengan alam feodal dinegeri dan
masjarakat kita, teroetama didesa. Akan tetapi
tentoe sadja kita ta' dapat menjamakan revoloesi
kita ini dengan oempamanja revoloesi Perantjis.
Kita berada didalam doenia jang telah dapat
mempergoenakan kekoekatan atoom, dengan tech-
nik dan soesoenan serta kepintaran jang sama se-
kali ta' dapat disamakan dengan doenia dan kea-
daan waktoe djaman revoloesi Perantjis. Masjara-
kat kita sendiri mengenal soesoenan trust dan kar-
tel, telegrap, radio, paberik-paberik dan peroesa-
han kapital besar, seperti minjak d.l.l., jang menja-
takan pada kita, bahwa meskipoen kita menetap-
kan bahwa revoloesi kita ini revoloesi kerakjatan,
sekali-kali kita djangan keliroe hingga hendak me-
njamakannja dengan revoloesi Perantjis, didalam
kedoedoekan dan kemoengkinannja. Tatkala re-
voloesi Perantjis beloem ada kapitalisme dan im-
perialisme doenia, seperti jang digambarkan di-
atas, serta doenia beloem poela mendjadi satoe
didalam perhoeboengan ekonomi seperti sekarang,
dan poela soesoenan dan kedoedoekan masjara-

kat serta negeri Perantjis berbeda sama sekali dengan soesoenan dan kedoedoekan masjarakat dan negeri kita Indonesia sekarang.

Perantjis serta revoloesi Perantjis adalah perintis serta pemboeka djalan oentoek doenia jang kapitalistis-imperialistis, sedangkan revoloesi kita ini sebenarnja haroes dipandang revoloesi jang akan toeroet menoetoep sedjarah kapitalistis-imperialis, sehingga perdjoeangan sosial jang telah berlakoe didoenia sebagai akibat dari pada systeem kapitalis-imperialis, jang meroepakan perdjoeangan kaoem boeroeh, perdjoeangan kaoem sosialis dan segala kemenangan-kemadjoennja, seperti terdapat didoenia pada waktoe ini, tentoe membedakan benar kedoedoekan revoloesi kita dari revoloesi Perantjis, jang hanja demokratis-burgelijk itoe.

Djadi memang revoloesi kita ini ta' dapat lain dari djoega bertjorak sosial. Bahwa didalam revoloesi kita ini kaoem boeroeh berkedoedoekan jang pada pokoknja lain dari pada kaoem boeroeh dinegeri Perantjis didalam djaman revoloesi Perantjis, meskipun didalam mentaliteitnja terdapat beberapa persamaan, jaitoe tanda moedanja dan kekoerangan kesadaran kelas.

Tjorak sosial revoloesi kita ini menoendjoekan poela kemoengkinan sosial jang ada didalam revoloesi kita. Sebab segala factor ini dynamis. Tetapi seperti telah dikemoekakan diatas segala-gala ini teroetama tergantoeng pada keadaan serta kemoengkinan internasional, oentoek negeri

kita. Subjektif memang tjorak sosial revoloesi kita akan dapat lebih djelas dan mendalam, akan tetapi objektif kemoengkinan berlandjoetnja akan sama sekali tergantoeng dari pada perobahan-perobahan jang akan berlakoe didoenia. Batas-batasnja telah saja kemoekakan diatas.

IV. REVOLUESI NASIONAL.

Keloear bentoek revoloesi beroepe nasional, kedalam menoeroet hoekoem masjarakat demokratis dengan tjorak sosial. Djika koerang memahamkan kebenaran sehingga kedalam poen jang kita andjoerkan hanja revoloesi nasional sadja dengan tidak ada atau koerang pengertian tentang kedoedoekan demokrasi didalam pengobahan masjarakat kita, bahaja sangat besar bahwa kita, oleh karena ta' dapat mengoekoer moesoeh kita feodalisme kita berkawan dengan semangat feodalisme jang masih hidoep sesoeai dengan sematjam nasionalisme, mendjadi nasionalisme jang mempoenjai sematjam solidarisme, jaitoe solidarisme-feodal (jang hierarchis), mendjadi fascisme alias moesoeh kemadjoean doenia dan rakjat jang sebesar-besarnja. Ideologi jang kelihatan seperti katjau sekarang, kerapkali tampak sebagai sematjam nasionalisme atau nasional-komunisme ala Hitler atau Mussolini. Oleh karena itoe maka didalam menjoesoen kekoeatan masjarakat kita didalam revoloesi kita ini, haroes kita sedikitpoen ta' boleh loepa, bahwa kita mengadakan revoloesi demokrasi. Revoloesi nasional itoe hanja boentoetnja

dari pada revoloesi demokrasi kita. Boekan nasionalisme haroes nomor satoe, akan tetapi demokrasi, meskipoen kelihatannja lebih gampang, kalau orang banjak dihasoet membentji bangsa asing sadja. Memang benar bahwa tjara demikian boeat sementara berhatsil, (lihat sadja sukses Mussolini, Hitler, Franco, Chiang Kai Shek d.l.l.) akan tetapi oentoek kemadjoean masjarakat perboeatan demikian tetap reaksionner dan bertentangan dengan kemadjoean doenia, dan perdjoengan sosial seloeroeh doenia, orang jang mengandjoerkannja tetap moesoeh rakjat, meskipoen sedikit waktoe didewakan rakjat seperti Hitler dan Mussolini.

V. REVOLUESI DAN PEMBERSIHAN.

Dengan penentoean alam perdjoengan kita seperti diatas, maka njata bahwa revoloesi kita ini haroes dipimpin oleh golongan demokratis jang revoloesionner dan boekan oleh golongan nasionalistis jang pernah memboedak kepada fascis-fascis lain, fascis kolonial Belanda atau fascis militer Djepang.

Perdjoengan demokrasi revoloesionner itoe memoelai dengan membersihkan diri dari nodanoda fascis Djepang, mengoengkoeng penglihatan orang-orang jang masih djiwanja terpengaroeh oleh propaganda Djepang dan didikan Djepang. Orang-orang jang soedah mendjoel djiwa dan kehormatannja kepada fascis Djepang disingkir-

kan dari pimpinan revoloesi kita (orang-orang jang pernah bekerdja didalam propaganda, polisí rahasia Djepang, oemoemnja didalam oesaha kolonne 5 Djepang). Orang-orang ini haroes dianggap sebagai pengchianat perdjoengan dan haroes diperbedakan dari kaoem boeroeh biasa jang bekerdja hanja oentoek sekedar memenoehi keboetoehan hidoepnja. Djadi sekalian politieke collaboratoren dengan fascis Djepang seperti jang disebotkan diatas haroes dipandang sebagai fascis sendiri atau andjing dan kaki tangan fascis Djepang dan tentoe soedah berdosa dan berchianat pada perdjoengan dan revoloesi rakjat.

Negara Repoeblík Indonesia jang kita djadikan alat dalam revoloesi rakjat kita, haroes kita djadikan alat perdjoengan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisa Djepang dan fascismenja. Oendang-oendang dasar jang beloem sempurna demokratis itoe ditoe kar dengan oendang-oendang dasar demokrasi jang toelen, jang menerakan sebagai pokok segala soesoenan negara adalah hak-hak pokok rakjat, jaitoe hal-hal kemerdekaan berfikir, herbitjara, beragama, menoeslis, mendapat kehidoean, mendapat pendidikan, toeroet membentoe dan menentoe kan soesoenan dan oeroesan negara dengan hak memilih dan dipilih oentoek segala badan jang mengoeroes negara.

VI. REVOLUESI DAN PARTAI.

Oentoek dapat menjoesoen segala tenaga boeat

mengerdjakan revoloesi dengan tepat dan teratoer, pimpinan haroes meroepakan soeatoe balatentara jang berbenteng ideologi dan pengetahuan jang tersoesoen rapi didalam soeatoe partai revoloesionner.

Partai revoloesionner jang berideologi dan ber teori lengkap dan rapi dan berorganisasi modern dan efficient jang perloe akan memimpin revoloesi, jaitoe mengeroes segala kekoean masjarakat jang akan dapat diperdjoeangkan, menetapkan strategi dan taktik perdjoeangan, membentok dan mempergoenakan segala alat dan sendjata perdjoeangan.

Partai ini haroes partai kerakjatan jang revoloesionner, sebaiknja dipimpin oleh orang-orang jang berpengetahoean tentang perdjoeangan revoloesionner jang modern, jang berpengetahoean dan berpengalaman tentang perdjoeangan revoloesionner jang ada didoenia dan tahoe menentoeakan langkah perdjoeangan kita dengan perubahan didoenia oemoemnja. Partai ta'oesah beranggauta banjak asal sadja dapat meroepakan balatentara jang berdisciplin rapi dan mempoenjai efficiency modern dan berbenteng ideologi dan pengetahuan jang koet' dan lengkap.

VII. REVOLUESI DAN PEMERINTAHAN.

Langkah jang pertama jang haroes dilakoekan didalam keadaan sekarang oentok memperbaiki dan merubah keadaan adalah selain dari menjoe-

soen segala kekoean revoloesionner jang sadar didalam soeatoe soesoenan partai jang berdisciplin, memperbaiki setjepat moengkin kedoedoekan Negara Repoeblik Indonesia, dan mentjegah mendjalarnja kekatjauan diantara rakjat dengan tjara jang tersoesoen.

Setjepat moengkin seloeroeh pemerintahan haroes didemokratiseer, sehingga rakjat banjak masoek tersoesoen didalam lingkoengan pemerintahan. Ini moedah dikerdjakan dengan menghidoeapkan dan dimana perloe membangoenkan dewan-dewan perwakilan rakjat dari desa hingga kepoentjak pemerintahan. Alat-alat kekoekaan poen seboleh-bolehnja didemokratiseer, sehingga menjetjilkan djoerang pertentangan pada rakjat banjak. Oentok sementara pangrehpradja lama dapat diberi kedoedoekan sebagai pengawas dan penasehat segala peroebahan pemerintah didalam daerahnja masing-masing atau ditarik kekantorkantor, kepolisi, agraria dan sebagainya. Dengan terbentoknja alat pemerintahan baroe ini dengan sendirinja kekatjauan mendapat bantahan pada poesatnja sendiri, jaitoe didesa sendiri, serta pemerintahan mendapat alat jang dapat dipergoenakan oentok mendjalankan revoloesi demokrati djoega didalam alam ekonomi dan sosial desa. Masjarakat kita mendapat alat oentok disoesoen baroe dari pokoknja, jaitoe desa. Segala tjita-tjita pembaharoean masjarakat kita dapat dimoelai membentoknja dari sitoe.

Dengan sendirinja segala kekedjaman serta ke-

koerangan kemanoesiaan terhadap bangsa-bangsa asing atau terhadap golongan bangsa kita sendiri jang beloem sadar, akan berkoerang dan hilang. Tabi'at fascistis hilang sendiri dengan berkembangnja semangat demokrasi dan kemanoesiaan.

Dengan sendirinja poela kedoedoekan kita terhadap doenia loear akan mendjadi bertambah koeat. Oesaha kita jang tersoesoen oentoek teroeseneroes memperkoeatkan kedoedoekan itoe, adalah memperkoeat organisasi negara kita setjara demokratis, dan memperbesar kepertjajaan doenia, bahwa kita sanggoep mengatoer rapih negara dan rakjat kita dengan tidak mengetjewakan perhoeboengan ekonomi, politik dan keboedajaan kita dengan loear negeri. Selama alam kita alam doenia kapitalis, terpaksa kita mendjaga djangan sampai dimoesoehi oleh doenia kapitalis itoe, djadi memboeka negara kita oentoek lapang oesaha mereka sedapat moengkin, jaitoe dengan batas, bahwa keselamatan rakjat tidak akan terganggu olehnja. Demikian poela terhadap pemasoean orang-orang asing kedalam negeri kita. Didalam masjarakat jang berdasar demokratis jang koeat dan sehat, segala ini dapat dipikoel dengan moedah, dengan tak perloe menimboelkan perbentjian golongan-golongan berdasar atas kebangsaan seperti terdapat sekarang. Segala hoekoem dan hal pendoeoek diatoer setjara-demokratis dengan semangat kemanoesiaan dan kesosialan.

VIII. MEMPERDJOEANGKAN ISI KEMERDEKAAN.

Negara Repoeblik Indonesia jang kita perdjoeangkan sebagai alat didalam revoloesi kerakjatan kita mendapat harga jang penoeh, djika kita isi dengan kerakjatan jang toelen. Bagi kita kemenangan jang berarti itoe ialah kemenangan jang berisi, boekan kemenangan nama dan kehormatan sadja. Pedoman jang sebenarnja oentoek perdjoeangan politik kita haroes ditoedjoeakan kepada isi itoe. Perdjoeangan kebangsaan pada oemoemnja, tak loepoet dari pada bahaja terlaloe terpengaroeh oleh nama dan roepa. Oleh karena itoe kerapkali apa jang dinamakan kemenangan kebangsaan itoe, terboekti kosong oentoek rakjat banjak. Djika kita hargakan Indonesia Merdeka kita dengan harga demokrasi jang toelen, maka didalam perdjoeangan politik kita terhadap doenia isinja itoe jang dipertaroengkan. Negara Repoeblik Indonesia hanja nama jang kita berikan pada isi jang kita maksoedkan dan kehendakkan itoe.

IX. PEMBENTJIAN BANGSA ASING.

Salah satoe hal jang terpenting didalam perdjoeangan kita adalah sikap dan politik kita terhadap golongan-golongan jang agak mengasing diantara pendoeoek negeri kita, jaitoe orang-orang asing, orang peranakan, Eropah atau Asia, orang jang beragama Kristen, Orang Ambon, Me-

nado dan sebagainya. Hingga sekarang kita be-
loem mempoenjai sikap dan politik jang memoeas-
kan terhadap golongan ini semoea. Malah dihari
kemoedian ini terdjadi hal-hal jang terang salah
dan meroesakkan pada perdjoengan kerakjatan
kita. Sifat membentji pada golongan dan bangsa
jang asing itoe, memang soeatoe sifat jang terse-
boenji didalam tiap-tiap gerakan kebangsaan, ter-
lebih pada golongan atau bangsa jang roepanja
berkedoedoean dengan privilege, akan tetapi tiap
gerakan kebangsaan jang memaboekkan dirinja
dengan nafsoe membentji bangsa-bangsa asing
oentoek mendapat kekoeatan, nistjaja pada achir-
nja akan berhadapan dengan seloeroeh doenia
dan kemoesiaan. Nafsoe kebangsaan jang pada
moelanja dapat meroepakan soeatoe kekoeatan
itoe, mesti tiba pada satoe djalan boentoe dan
achirnja menjekek dirinja sendiri dalam soeasana
djibakoe. Kekoeatan jang kita tjari, adalah pada
pengobaran perasaan keadilan dan kemoesiaan.
Hanja semangat kebangsaan jang dipikoel oleh
perasaan keadilan dan kemoesiaan dapat men-
gantar kita madjoe didalam sedjarah doenia.

Sebab pada achirnja semoea kebangsaan haroes
menemoei adjalnja didalam soeatoe kemoesiaan
jang melipoeti seloeroeh doenia mendjadi satoe
bangsa, jaitoe bangsa manoesia jang hidoep dida-
lam pergaoelan jang berdasar keadilan dan kebe-
naran, tidak lagi terbatas oleh perasaan-perasaan
sempit jang memetjah manoesia sesama manoesia
oleh karena koelitnja berlainan warna, atau oleh

karena toeroenan darahnja berlainan. Pada habis-
nja perasaan-perasaan sempit ini sebagai pendro-
rong tindakan dan kelakoean kita, baroe habis
ikatan boeta kita pada sedjarah kebiadaban kita.
Baroe kita dapat melihat terang perbedaan antara
tjinta pada tanah air dari perasaan membentji
orang asing atau membentji golongan-golongan
dalam negeri kita jang sebagai perboeatan sedja-
rah terasing atau mengasingkan diri oleh karena
toeroenan darahnja, darah jang bodoh dan darah
jang biadab itoe. Sikap kita terhadap sekalian ini
haroes berdasar penglihatan kemasjarakatan, ber-
dasar atas penjelidikan jang djoedjoer dan perhi-
toengan didalam berbakti kepada tjita-tjita kema-
noesiaan dan keadilan sosial.

X. KAOEM BOEROEH.

Pada tingkatan kapitalisme ini dimana kapital
doenia mengalami konsentrasi jang lebih besar,
teroetama di New-York dan London, maka se-
genap prodoeksi doenia jang kapitalistis lebih dari
doeloe dikoeasai oleh satoe atau doea poesat ka-
pital, teroetama Wallstreet. Sebagai akibat pepe-
rangan ini maka boleh dikatakan seloeroeh doenia
terikat hoetang pada Wallstreet itoe. Hal ini mem-
boeat bahwa kedoedoean dan kekoeatan doenia
itoe mendjadi soenggoeh-soenggoeh internasional.
Oleh karena itoe maka pertahanan dan perdjoen-
angan kaoem boeroeh terhadapnja hanja akan da-
pat berhatsil baik, djika disoesoen dengan menga-
koei kenjataan ini. Soesoenan dan perdjoengan

kaoem boeroeh poen haroes berdasar internasional.

Kaoem boeroeh kita sekarang menoejoeakan perdjoengan pada pertahanan Negara Indonesia Merdeka. Hal ini soedah selajaknja, akan tetapi didalam itoe perloe kita kemoekakan kebenaran jang diatas, oleh karena didalam perdjoengan selandjoetnja solidariteit kebangsaan kaoem boeroeh itoe mesti dapat meningkat mendjadi solidariteit dan soesoenan internasional, meningkatkan diri seokoer dengan perdjoengan kaoem boeroeh didoenia seloeroehnja. Bagi kaoem boeroeh semangat kebangsaan jang meloep-loeap itoe dapat mendjadi halangan oentoek melihat perdjoengan internasionalnja dan penghargaan serta kesadaran tentang kedoedoekan didalam masjarakat kapitalis, sehingga membawanja kedjoeroesan jang salah dan memoendoerkan dan melemahkan kedoedoekannja. Oentoek mengindarkan bahaya, bahwa didalam perdjoengan kebangsaan ia meloepakan dan melepaskan dasar-dasar perdjoengannja sendiri, sehingga moedah tertipoe dan diperkoeda golongan masjarakat jang lain. Maka djoega didalam perdjoengan kebangsaan kaoem boeroeh haroes tahoe memperdjoengankan kedoedoekannja sebagai orang Indonesia dengan tjaranja sendiri, jaitoe didalam soesoenan boeroeh dan dengan alat-alat perdjoengan kaoem boeroeh. Semangat jang perloe oentoek dapat mengadakan perdjoengan setjara itoe, ialah semangat kelasnja dan solidariteit kelasnja jang tak

boleh dilemahkan oleh semangat kebangsaan. Sjarat-sjarat oentoek dapat mendjernihkan kedoe-doekannja itoe, adalah didalam perdjoengan politiknja kaoem boeroeh **menoentoet segala hak kerakjatan** jang sepenoehnja, poen djoega dari Negara Indonesia Merdeka sendiri, hak berbitjara, menoejis, berkoempoel, berapat, bermogok, kepastian pentjaharian, keadaan kesehatan, pelajaran oentoek anak-anaknja, ketentoean gadji dan sebagainya. Kesadaran dan pengertian kelas itoe haroes teroes diperdalam dan diperkoeat hingga pada satoe saat jang setjepat-tjepatnja dapat mendjadi perasaan dan kesadaran kelas internasional sehingga moedah dapat rapat pada saat penggaboengan perdjoengan kaoem boeroeh kita dengan gaboengan kaoem boeroeh internasional. Soesoenan serekat sekerdja haroes disoesoen menoeeroet oekoeran modern, jaitoe didalam indoes-trieverband, pendidikan kaoem boeroeh haroes sesoeai dengan keperluan perdjoengannja, jaitoe setingkat pada kesadaran dan pengertian perdjoengan internasional oentoek menjoesoen doenia jang sosialis. Didalam berdjoeng oentoek kemerdekaan Indonesia kaoem boeroeh sedjalan haroes berdjoeng oentoek mendapat kedoedoekannja sendiri jang terkoeat soepaja sanggoep mendjadi pelopor didalam perdjoengan menentang imperialisme di Indonesia ini dan memperkoatkan perdjoengan kaoem boeroeh internasional terhadap kapitalisme doenia.

XI. PAK TANI.

Bagi kaoem tani kita perdjoeangan kemerdekaan ini hanja akan berarti djika kerakjatan dirasakan padanja. Djika revolosi bangsa Indonesia jang sedang berlakoe sepenoehnja dapat dirasakan sebagai revoloesi kerakjatan bagi Pak Tani, sehingga ia tak dapat diperlakoean sewenang-wenangnja lagi oleh pemerintahan, sehingga ia dapat mengetjap hatsil keringatnja sepenoehnja dan tidak diganggoe dengan roepa-roepa atoeran jang dimaksoedkan oentoek menjenangkan orang jang memerintah. Revoloesi kita haroes membanteras feodalisme diloear kota-kota jang beroepa toean tanah, atoeran pemerintahan feodal, pengerahan tenaga dan hatsil orang tani setjara feodal seperti digoenakan oleh pendjadjahan belanda. Pendoedoek desa soedah sesak padat, sehingga meskipoen penghatsilan tanah di Djawa dikerdjakan dengan kekoeatan jang sepenoehnja, oentoek memberi makan pendoedoeknja masih tak mentjoekoepi oentoek mempertinggi kehidoepan rakjat kita oemoemnja. Hal ini lebih hari lebih mendesak. Selain dari ichtiar oentoek membagi pendoedoek Indonesia lebih rata pada kepoelauan Indonesia dengan interimmigrasi; maka menilik bangoen dan kedoedoekan poelau Djawa tak dapat dihindarkan, bahwa djawab jang langsoeng pada soal pendoedoek dan penghatsilan di Djawa adalah indoestrialisasi. Djika kelebihan djiwa didesa itoe dikoerangkan sehingga desa lapang oen-

toek mempertinggikan kehidoepan dengan djalan oesaha bersama (kooperasi), maka dengan indoestrialisasi jang diadakan menoeroet rentjana dibawah pimpinan pemerintah, sebahagian besar dari pada kelebihan djiwa didesa dapat menhadapi kehidoepan sebagai pekerdja paberik jang tetap bertambah baik dengan bertambah kemakmoeran Indonesia oemoemnja, teroetama dengan dasar kehidoepan Pak Tani jang makmoer. Pemerintahan di desa disehatkan dengan melaksanakan kerakjatan jang sempoerna dengan menggoenakan kebiasaan lama djoega, pemilihan, rapat desa, jang diberi kekoeasaan sepenoehnja dan ditambah ketjerdasannja dengan mempertinggi peladjaran dan pendidikan didesa, mengadakan pimpinan didalam segala oesaha desa, membaharoei dasar masjarakat kita, membawa rasionalisasi dan efficiency, jang akan merombak tradisi didesa, soepaja dengan tidak mendjalani kehidoepan kota dan paberik, djoega didesa timboel modernisasi, elektrisiteit dan mesinpoen dapat masoek menolong manoesia didesa mempertinggikan deradjat kehidoepan manoesia. Sarekat tani jang haroes didirikan haroes mendjadi perintis didalam mentjotjokkan semangat kaoem tani pada tempo jang kita kehendaki itoe. Persatoean tani memোধahkan tidak sadja oeroesan ini setjara teratoer dan besar-besaran, akan tetapi djoega memoedahkan persatoean dan perhoeboengannja dengan persatoean kaoem boeroeh.

XII. PEMOEDA.

Soal jang kelihatannja besar pada waktoe ini adalah soal pemoeda. Tak dapat dipoengkir, bahwa kelihatannja kebanggoenan kebangsaan kita jang kita alami ini, seolah-olah digoegat oleh pemoeda-pemoeda kita. Seolah-olah mereka jang mentoekan tempo perdjoeangan kita. Seolah-olah revoloesi jang kita alami sekarang ini, bermoela pada semangat dan kekerasan hati pemoeda, djadi didorong oleh tjita-tjita semata-mata. Ini semoea sepintas laloe. Akan tetapi djelaslah dari apa jang dioeraikan diatas, bahwa kemoungkinan meloeapnja semangat pemoeda itoe dan kemoungkinan disamboetnja oleh masjarakat itoe, adalah terletak pada keadaan masjarakat sendiri. Bagaimana keadaan itoe telah digambarkan dengan singkat diatas, akan tetapi njata poela bahwa kaoem pemoeda, teroetama jang terpeladjar jang sekarang berkobar-kobar dengan samangat kebangsaan tak akan dapat mendjalankan teroes kewadjibannja sebagai perintis, djika semangat kebangsaannja itoe tidak diisi dengan semangat kerakjatan dan semangat kemasjarakatan. Djika tidak, ia akan menemoei djalan boentoe jang dihadapi tiap-tiap semangat kebangsaan. Ia akan menemoei saat, ia tidak akan ditoeroeti lagi oleh rakjat ataupun ia akan ditentang.

Dan ia akan mengalami bahwa boekan sedadoe jang akan dapat memenangi revoloesi kita ini, akan tetapi rakjat banjak, kaoem boeroeh dan

Pak Tani bersama-sama dengan kaoem terpeladjar, kaoem moeda. Saat kaoem moeda ini meloeaskan pandangannja kepada dasar-dasar masjarakat telah tiba, dan pada itoe ia haroes mengerti, bahwa tenaga perdjoeangan tidak berpoesat diantara angkatan moeda, akan tetapi pada rakjat banjak, teroetama pada kaoem boeroeh jang tersoesoen serta mempoenjai kesadaran jang tadjam, pengertian tentang perdjoeangan boeroeh didoenia oemoem. Djika pemoeda-pemoedi kita mengerti hal ini, ia tahoe bahwa kedoedoekannja ada sebagai pahlawan kaoem boeroeh dan kaoem tani.

Njata bahwa anggapan, jang angkatan moeda haroes memimpin perdjoeangan kemerdekaan kita, soeatoe kekeliroean jang akan dapat meroesakkan perdjoeangan kita.

Jang haroes memimpin revoloesi kita ini, tidak lain dari pada poesat kekoeatan politiknya, meroepakan partai kerakjatan jang revoloesionner. Kalau dapat ditoendjang oleh partai boeroeh jang revoloesionner, pada larasnja angkatan moeda hanja dapat mendjadi lasjkar perintis dari pada partai jang memimpin perdjoeangan. Keliroe poela sama sekali orang jang mengirakan bahwa pemoeda jang tergaboeng didalam ikatan balatantara, jaitoe barisan dan pimpinan militer, jang akan dapat memimpin revoloesi kita. Kekeliroean ini dapat dimengerti. Tahoen-tahoen jang kemoedian ini, kita terlaloe merasakan kekoeasaan militer. Tak oeroeng hal ini dan didikan militer jang diberikan pada pemoeda-pemoeda serta rakjat kita

oemoemnja, dapat menimboelkan kekeliroean, seolah-olah perdjoeangan kita ini perdjoeangan militer jang haroes dipimpin orang militer. Hanja pengertian tentang dasar kemasjarakatan perdjoeangan kita ini, dapat menghindarkan kekeliroean ini. pemoeda kita tak moengkin berpembawaan fascistis atau feodaal militeristis. Pengertian jang masih koerang benar didalam segala-gala hal terhadap soal ini diselenggarakan. Sedang pemoeda berdjoeang sekarang ini, haroes pengertiannja diisi dan penglihatannja dirobah, soepaja ia djangan merendah mendjadi binatang berkelahi sadja, akan tetapi dapat mendjadi pemoeda revoloesionner jang menghadapi doenia baroe pemoeda jang tertjinta dan mempoenjai kesadaran serta pengertian jang djernih tentang doedoek perdjoeangannja oentoek rakjat kita, serta kemanoesiaan oemoemnja.

XIII. TENTARA.

Meskipun demikian didalam keadaan doenia jang sekarang ini, memang perloe kita mempertinggi kesanggoepan kita membela tanah air serta rakjat kita dengan soesoenan pertahanan jang selengkapnja. Kita memerloekan soesoenan pembelaan itoe. Kita merloekan balatentara jang teratoer menoeroet oekoeran djaman sekarang. Pemoeda kita seloeroehnja haroes dididik didalam kesanggoepan itoe. Oleh karena itoe boekan sadja kita memerloekan balatentara jang tersoesoen dan bersendjata modern, akan tetapi djoega latihan

militer segenap rakjat kita, teroetama pemoeda. Selekas moengkin kita haroes dapat mengadakan milisi oentoek rakjat kita, pada mana seloeroeh pemoeda dan dari moelai oemoer jang tertentoe, haroes melaloei latihan militer, lamanja tertentoe. Oleh karena sjarat-sjarat serta alat-alatnja sekarang koerang, maka keperluan ini dikerdjakan dengan alat jang terbatas, serta sementara segala sjarat dan alat jang koerang dilengkapi. Teroetama sekali tentoenja haroes diadakan pendidikan. Si pendidik jaitoe akademi darat dan laet. Dalam hal ini kekoerangan dalam negeri dapat dilengkapi dengan pertolongan dari loear negeri, oentoek didjadi goeroe dan instroekteur. Oentoek melengkapi alat pertahanan jang beroepa persendjataan, pantas kita didalam keadaan kita sekarang, mengorbankan lain-lain keperluan. Pembinaan dan pembelian sendjata itoe, dimasoekkan dalam hal teroetama didalam keadaan sekarang. Akan tetapi dengan pengakoean bahwa pengertian perkara dengan setjara militer ini, sekali-kali kita tidak boleh meloepakan sekedjap mata perdjoeangan apa jang dikemoekakan diatas, bahwa sekali-kali tak boleh kita keliroe didalam penghargaan hal militer ini didalam revoloesi. Didalam perdjoeangan kita jang beroepa dan memakai alat Negara Indonesia, kita terpaksa haroes mengadakan alat perdjoeangan kenegaraan, jaitoe balatentara. Itoe tak boleh berarti, bahwa kita mendjadi abdi kenegaraan atau kemiliteran, alias fascist dan militerist.

— 36 —

Batas-batas hal ini, dengan semangat revoloesi kerakjatan kita, haroes ditadjamkan sehingga djangan kita memboenoeh semangat serta revoloesi kita oleh karena kita sesat pada militarisme dan fascisme.

